



## BALAI BESAR POM DI DENPASAR

Jl. Cut Nya Dien No. 5 Denpasar - Bali Telp. (0361) 223763, 234597, 222159

Fax. 22539, 222159 email : [bpom\\_denpasar@pom.go.id](mailto:bpom_denpasar@pom.go.id), [pomdenpasar@yahoo.com](mailto:pomdenpasar@yahoo.com)



**SAMBUTAN**  
**KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT**  
**DAN MAKANAN DI DENPASAR**

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah / Laporan Kinerja (LAPKIN) Balai Besar POM di Denpasar tahun 2016 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penyusunan LAPKIN tahun 2016 didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap instansi untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

SAKIP bertujuan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah agar tercipta pemerintah yang baik dan terpercaya, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

LAPKIN adalah media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Instansi Pemerintah. LAPKIN juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi dan pertanggungjawaban kinerja kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Penyampaian informasi kinerja melalui LAPKIN ini disamping merupakan sarana bagi Balai Besar POM di Denpasar untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pihak terkait (*stakeholders*), masyarakat dan Badan POM, juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar sebagai upaya meningkatkan kinerja di masa mendatang. Prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Balai Besar POM di Denpasar dituangkan dalam LAPKIN.

Secara garis besar LAPKIN 2016, memberikan informasi mengenai rencana kinerja, perjanjian kinerja dan capaian kinerja Balai Besar POM di Denpasar pada tahun 2016. Rencana Kinerja tahun 2016 yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja dan perjanjian

kinerja, capaian kinerja yang didapat dari Pengukuran Kinerja merupakan realisasi seluruh kegiatan selama tahun 2016,

Tahun 2016 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar tahun 2015-2019, Laporan Kinerja pada periode kedua RPJMN 2015-2019 ini lebih menekankan pada evaluasi capaian, perbandingan capaian dengan tahun pertama dan akhir Renstra. Dalam tahun 2016 ini Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar telah menetapkan kegiatan-kegiatan strategis yang mengarah kepada pencapaian target sasaran tahunan, yang telah ditetapkan dalam rangka mengantisipasi permasalahan pengawasan obat dan makanan dengan mengacu kepada target lima tahun yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Balai Besar POM di Denpasar tahun 2015 – 2019.

Hasil evaluasi kinerja dalam LAPKIN ini, baik capaian kinerja yang memenuhi maupun yang tidak memenuhi target sasaran akan dikaji lebih lanjut sebagai upaya mengidentifikasi upaya perbaikan kinerja yang dapat dilakukan pada tahun-tahun berikutnya. Informasi kinerja yang ada sepenuhnya akan dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar dalam upaya pemenuhan sasaran-sasaran yang telah dicanangkan dalam Rencana Strategis Balai Besar POM di Denpasar.

Disadari bahwa tugas dan tanggung jawab pengawasan yang diemban oleh Balai Besar POM di Denpasar sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM akan semakin luas dan kompleks. Untuk melakukan pengawasan obat dan makanan dengan ruang lingkup yang semakin luas tersebut, Balai Besar POM di Denpasar tidak mungkin melaksanakannya sendiri dan sangat membutuhkan kerjasama dengan instansi terkait baik dengan Instansi Vertikal maupun Instansi Pemerintah Daerah terutama untuk mensinergikan program/kegiatan masing-masing sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.

Disamping itu, peranan masyarakat sebagai konsumen dalam pengawasan obat dan makanan sangatlah penting. Masyarakat adalah penentu akhir apakah suatu produk akan dikonsumsi atau tidak, oleh karena itu pemberdayaan masyarakat sangat menentukan keberhasilan pencapaian kinerja Balai Besar POM di Denpasar.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiil dalam pencapaian kinerja Balai Besar POM di Denpasar. Terima kasih juga disampaikan kepada tim penyusun LAPKIN Balai Besar POM di Denpasar tahun 2016 yang telah merampungkan laporan ini

tepat pada waktunya. Laporan Kinerja ini merupakan media pertanggungjawaban kinerja atas perjanjian kinerja tahun 2016 antara Kepala Balai Besar POM di Denpasar dengan Kepala Badan POM serta digunakan dalam upaya peningkatan kinerja Balai Besar POM di Denpasar.

Akhirnya, kami berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat untuk masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Denpasar, 14 Februari 2017

Kepala

Dra. Endang Widowati, Apt.  
NIP. 19570905 198903 2 001

## DAFTAR ISI

	Halaman
SAMBUTAN KEPALA BALAI BESAR POM DI DENPASAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	1
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>6</b>
1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....	7
1.2. STRUKTUR ORGANISASI.....	8
1.3. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI.....	10
1.4. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS .....	12
1.4.1. INTERNAL .....	12
1.4.2. EKSTERNAL.....	15
1.5. ISU STRATEGIS .....	16
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>20</b>
2.1. RENCANA STRATEGIS .....	20
2.2. PERJANJIAN KINERJA .....	24
2.3. KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR.....	27
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>28</b>
A. ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	28
<b>A.1. Pencapaian Sasaran Strategis 1</b>	
<b>Menguatnya Sistem Pengawasan Obat Dan Makanan.....</b>	<b>31</b>
A.1.1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat .....	33
A.1.2. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat .....	35
A.1.3. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat .....	38
A.1.4. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat .....	40
A.1.5. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat .....	41
A.1.6. Indikator jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis .....	47
A.1.7. Pemenuhan target sampling produk obat disektor publik .....	48
A.1.8. Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan.....	49
A.1.9. Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan.....	51
A.1.10. Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan .....	53
<b>A.2. Pencapaian Sasaran Strategis 2</b>	
<b>Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat.....</b>	<b>55</b>
A.2.1. Indikator Tingkat Kepuasan Masyarakat.....	56
A.2.2. Indikator Jumlah Kabupaten/Kota yang Memberikan Komitmen untuk . Pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan dengan Memberikan Alokasi Anggaran Pelaksanaan Regulasi Obat dan Makanan. ....	58

A.2.3. Indikator Jumlah Layanan Publik BBPOM di Denpasar.....	61
A.2.4. Indikator Jumlah Komunitas yang Diberdayakan .....	62
<b>A.3. Pencapaian Sasaran Strategis</b>	
<b>Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM</b> .....	63
A.3.1. Indikator Nilai SAKIP BBPOM di Denpasar oleh BADAN POM.....	64
A.3.2. Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Sesuai Standar.....	66
A.3.3. Indikator Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang Dilaporkan Tepat Waktu.....	67
<b>B. REALISASI ANGGARAN</b> .....	68
<b>C. ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN</b> .....	74
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	77
4.1. KESIMPULAN .....	77
4.2. SARAN.....	79

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- LAMPIRAN 1a** RENCANA STRATEGIS BBPOM DI DENPASAR TAHUN 2015-2019  
MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BALAI BESAR  
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI DENPASAR
- LAMPIRAN 1b** RENCANA KINERJA TAHUN 2016 BBPOM DI DENPASAR
- LAMPIRAN 1c** PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 BBPOM DI DENPASAR
- LAMPIRAN 2** PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016 BBPOM DI DENPASAR
- LAMPIRAN 3** PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN/PROGRAM BBPOM DI  
DENPASAR TAHUN 2016
- LAMPIRAN 4** PENGUKURAN EFISIENSI KEGIATAN BBPOM DI DENPASAR  
TAHUN 2016
- LAMPIRAN 5.1** PERSENTASE OBAT DAN MAKANAN MEMENUHI SYARAT  
(SESUAI DO) BBPOM DI DENPASAR TAHUN 2016
- LAMPIRAN 5.2** DATA AUDIT SERTIFIKASI TAHUN 2016
- LAMPIRAN 5.3** JUMLAH SAMPEL YANG DIUJI DENGAN PARAMETER KRITIS  
BBPOM DI DENPASAR TAHUN 2016
- LAMPIRAN 5.4** PEMENUHAN TARGET SAMPLING PRODUK OBAT DI SEKTOR  
PUBLIK (IFK) BBPOM DI DENPASAR TAHUN 2016
- LAMPIRAN 5.5** PERSENTASE CAKUPAN PENGAWASAN BBPOM DI DENPASAR  
TAHUN 2016
- LAMPIRAN 5.6** PEMENUHAN SARANA DAN PRASARANA SESUAI STANDAR  
BBPOM DI DENPASAR TAHUN 2016
- LAMPIRAN 5.7** LAYANAN PUBLIK BBPOM DI DENPASAR TAHUN 2016
- LAMPIRAN 5.8** KOMUNITAS YANG DIBERDAYAKAN BBPOM DI DENPASAR  
TAHUN 2016
- LAMPIRAN 5.9** HASIL PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN KASUS TINDAK  
PIDANA DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN BBPOM DI  
DENPASAR TAHUN 2016

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1.1</b> Struktur Organisasi .....	8
<b>Gambar 1.2</b> Pulau Bali .....	15
<b>Gambar 3.1</b> Capaian indikator kinerja Sasaran Strategis dan Sasaran Kegiatan .	29
<b>Gambar 3.2.</b> Pengujian Obat dan Makanan.....	31
<b>Gambar 3.3.</b> Pengawasan Obat di Sektor Publik.....	48
<b>Gambar 3.4.</b> Pengawasan Sarana Produksi Kosmetik .....	49
<b>Gambar 3.5.</b> Pengawasan Sarana Distribusi Kosmetik .....	51
<b>Gambar 3.6.</b> Pemusnahan Produk Obat dan Makanan TMS.....	53
<b>Gambar 3.7.</b> Antusiasme Media akibat Kepuasan Masyarakat terhadap BBPOM di Denpasar .....	56
<b>Gambar 3.8.</b> GKPD Kabupaten Buleleng .....	58
<b>Gambar 3.9.</b> Penyebaran informasi melalui media elektronik .....	61
<b>Gambar 3.10.</b> Realisasi anggaran sebelum dan setelah self blocking Sasaran Strategis I .....	70
<b>Gambar 3.11.</b> Realisasi anggaran sebelum dan setelah self blocking Sasaran Strategis II.....	71
<b>Gambar 3.12.</b> Realisasi anggaran sebelum dan setelah self blocking Sasaran Strategis III .....	71
<b>Gambar 3.13</b> Diagram Realisasi Anggaran tahun 2016 setelah self blocking .....	72

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b> Data Kualifikasi Dan Kompetensi Personel.....	14
<b>Tabel 1.2</b> Data Alat Laboratorium yang dimiliki BBPOM di Denpasar.....	14
<b>Tabel 2.1</b> Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Kegiatan, Target Indikator tahun 2016 dan (RPJM).....	22
<b>Tabel 2.2.</b> Perjanjian Kinerja Tahun 2016 .....	24
<b>Tabel 3.1</b> Pencapaian Sasaran Strategis .....	29
<b>Tabel 3.2</b> Capaian Indikator Kinerja Utama .....	30
<b>Tabel 3.3</b> Capaian dan Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis I .....	32
<b>Tabel 3.4.</b> Capaian dan Perbandingan Indikator Sasaran Kegiatan .....	45
<b>Tabel 3.5</b> Capaian dan Perbandingan Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.....	55
<b>Tabel 3.6</b> Nilai Persepsi, Interval IKM, Interl Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan .....	56
<b>Tabel 3.7</b> Indeks Kepuasan Masyarakat BBPOM di Denpasar Tahun 2016 .....	57
<b>Tabel 3.8</b> Capaian dan Perbandingan Indikator Sasaran Kegiatan .....	60
<b>Tabel 3.9</b> Capaian dan Perbandingan Indikator Sasaran Strategis .....	63
<b>Tabel 3.10.</b> Capaian dan Perbandingan Indikator Sasaran Kegiatan .....	65
<b>Tabel 3.11.</b> Perbandingan Realisasi Anggaran .....	73
<b>Tabel 3.12.</b> Efisiensi Kegiatan pada Sasaran Strategis .....	75

**DAFTAR DIAGRAM**

<b>Diagram 1.1</b> Sebaran Pegawai Berdasarkan Umur.....	12
<b>Diagram 1.2</b> Sebaran Pegawai Berdasarkan Pendidikan .....	13
<b>Diagram 1.3</b> Profil Pegawai Menurut Penempatannya.....	13
<b>Diagram 3.1</b> Capaian Indikator Kinerja Utama .....	30
<b>Diagram 3.2</b> Perbandingan Capaian IKU .....	31
<b>Diagram 3.3</b> Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis 1 .....	32
<b>Diagram 3.4</b> Persentase Obat yang Memenuhi Syarat .....	33
<b>Diagram 3.5</b> Persentase Obat Traditional yang Memenuhi Syarat.....	35
<b>Diagram 3.6</b> Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat.....	38
<b>Diagram 3.7</b> Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat.....	40
<b>Diagram 3.8</b> Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat .....	41
<b>Diagram 3.9.</b> Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Kegiatan.....	46
<b>Diagram 3.10.</b> Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 2.....	61
<b>Diagram 3.11</b> Capaian dan Perbandingan Indikator Sasaran Strategis 3 .....	64
<b>Diagram 3.12</b> Perbandingan capaian indikator sasaran kegiatan .....	66

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Tujuan utama Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Bali tahun 2015 – 2019 adalah:

1. Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, bermanfaat dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat.
2. Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi.

Untuk mencapai Visi Misi Badan POM ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis sesuai Renstra BBPOM di Denpasar tahun 2015-2019

1. Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan
2. Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat
3. Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM

Pencapaian ketiga sasaran strategis melalui sasaran kegiatan didukung dengan Program dan kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Denpasar.

Evaluasi kinerja meliputi evaluasi pelaksanaan kinerja berdasarkan perjanjian kinerja dan akuntabilitas kinerja termasuk pengukuran kinerja dan pengukuran efisiensi kegiatan atas aspek keuangan yang digunakan. Hasil evaluasi Pencapaian Kinerja tahun 2016 tiap sasaran strategis sbb:

➤ **Sasaran Strategis1: Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan**

No.	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Kriteria
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92.50	98.86	106,88	Memuaskan
2.	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	81.00	79.24	97,82	Cukup
3.	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	90.00	97.90	108,78	Memuaskan
4.	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	80.00	99.43	124,29	Memuaskan
5.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88.60	92.69	104,62	Memuaskan

Berdasarkan hasil perhitungan capaian masing-masing indikator dapat disimpulkan Nilaian *Pencapaian Sasaran Strategis 1 adalah 108,48 % dengan kriteria memuaskan.*

**Capaian indikator Sasaran Kegiatan Untuk mendukung sasaran strategis 1**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1.	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	3.500	3.500	100.00	Baik
		Pemenuhan target sampling produk obat disektor publik (IFK)	100%	82.86%	82.86	Cukup
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	25%	25%	100.00	Baik
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	24%	24.48%	102.00	Memuaskan
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	10	10	100.00	Baik

Program dan kegiatan yang telah dilakukan untuk pencapaian sasaran strategis 1 adalah 121 sub kegiatan dengan anggaran Rp 6.981.530.000

- Sasaran Strategis 2: Meningkatkan kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat

No.	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1.	Tingkat Kepuasan Masyarakat	80.50%	89.48%	111.16%	Memuaskan
2.	Jumlah kabupaten/kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	4	5	125.00%	Memuaskan

Berdasarkan perhitungan capaian masing-masing indikator dapat disimpulkan *Nilai Pencapaian Sasaran Strategis 2 adalah 115,77% dengan kriteria memuaskan.*

Capaian indikator Sasaran Kegiatan Untuk mendukung sasaran strategis 2

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1.	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik BBPOM di Denpasar	1150	1412	122.78	Memuaskan
		Jumlah Komunitas yang diberdayakan	20	20	100.00	Baik

Program dan kegiatan yang telah dilakukan untuk pencapaian sasaran strategis 2 (dua) adalah 28 sub kegiatan dengan anggaran Rp 1.369.107.000.

➤ Sasaran Strategis 3: Meningkatkan kualitas kapasitas kelembagaan BBPOM di Denpasar

No.	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1.	Nilai SAKIP BBPOM di Denpasar oleh BPOM	A (80%-90%)	BB (72.21%)	90.26%	Cukup

*Nilai Pencapaian Sasaran Strategis 3 adalah 90,26% dengan kriteria cukup.*

Capaian indikator Sasaran Kegiatan Untuk mendukung sasaran strategis 3

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Kriteria
1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	73%	77.07%	105.58%	Memuaskan
2.	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9%	9%	100.00%	Baik

Program dan kegiatan yang telah dilakukan untuk pencapaian sasaran strategis 3 adalah 65 sub kegiatan dengan anggaran Rp 21.544.035.000.

**Yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah kelima indikator kinerja pada sasaran strategis 1 dan indikator kinerja tingkat kepuasan masyarakat**

**Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)**

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92.50	98.86	106,88%	Memuaskan
2.	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	81.00	79.24	97,82%	Cukup
3.	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	90.00	97.90	108,78%	Memuaskan
4.	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	80.00	99.43	124,29%	Memuaskan
5.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88.60	92.69	104,62%	Memuaskan
6.	Tingkat kepuasan masyarakat	80.50	89.48	111,16%	Memuaskan

Kendala - kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan terkait capaian 3 (tiga) indikator dengan kriteria cukup, sbb :

1. Persentase Obat Tradisional memenuhi syarat,
 

Tidak tercapainya target Persentase Obat Tradisional memenuhi syarat antara lain disebabkan Obat tradisional yang beredar di Provinsi Bali merupakan produksi luar Bali , sehingga sulit melakukan intervensi terhadap produsen Obat Tradisional tersebut. Upaya yang dilakukan adalah

  - a. Meningkatkan koordinasi dengan Balai POM Provinsi terkait, dalam rangka tindak lanjut Obat Tradisional yang merupakan produk luar Provinsi Bali.
  - b. Lebih meningkatkan kemandirian pelaku usaha Obat Tradisional untuk menjamin mutu dan keamanan produk Obat Tradisional sehingga mampu bersaing di pasar lokal maupun global dengan pembinaan CPOTB dan penyebaran informasi terkait Obat Tradisional.
  - c. Meningkatkan KIE kepada masyarakat untuk tidak mengkonsumsi Obat Tradisional yang tidak memenuhi syarat, mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) dan tidak memiliki ijin edar.
2. Pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik
 

Capaian Indikator Pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik dengan kriteria cukup, hal ini disebabkan jenis obat yang ada di IFK terbatas dan sering ditemukan nomor bets yang sama sehingga tidak disampling lagi. Selain itu, sampel di IFK baru tersedia pada akhir tahun,. Upaya yang sudah dilakukan adalah

melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, untuk mengantisipasi masalah tahun berikutnya adalah meningkatkan jenis sampel yang disampling dan memperluas cakupan sampling di sarana IFK seperti Rumah Sakit, Klinik dan Puskesmas, serta meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait.

### 3. Nilai SAKIP BBPOM di Denpasar oleh Badan POM,

Salah satu penyebab capaian indikator kinerja Nilai SAKIP oleh Badan POM dengan kriteria cukup adalah karena pelaporan kinerja/SAKIP yang dibuat belum sesuai dengan kriteria yang tertuang dalam Permenpan RB No.53 Tahun 2014. Untuk selanjutnya pelaporan kinerja/SAKIP akan dibuat sesuai Permenpan tersebut. Upaya lain yang dilakukan adalah meningkatkan kualitas kinerja dan tetap mempertahankan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001 serta ISO/IEC 17025 untuk penyelenggaraan sistem mutu laboratorium pengujian. Disamping itu budaya organisasi, implementasi SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) serta komitmen dan implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi juga harus terus ditingkatkan sehingga kualitas dan kapasitas kelembagaan BBPOM di Denpasar meningkat.

Anggaran BBPOM di Denpasar pada tahun 2016 setelah mengalami pemotongan dan *self blocking* adalah Rp 29.894.672.000 dan realisasi Rp 29.236.125.357. Realisasi anggaran sebelum *self blocking* adalah 93,72 % dan setelah *self blocking* 97,80%. Dari 214 sub kegiatan hanya 1(0,47%) kegiatan yang tidak efisien. Kegiatan yang tidak efisien adalah kegiatan pemberkasan di luar kota hal ini disebabkan karena lokasi kasus kejadian yang ditemukan di dalam kota.

Hasil capaian kinerja dan efisiensi kegiatan tidak terlepas dari komitmen dan dukungan seluruh pegawai di Lingkungan Balai Besar POM di Denpasar yang telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SPIP dan Reformasi Birokrasi serta budaya kerja organisasi.

Untuk meningkatkan kinerja, BBPOM di Denpasar berupaya meningkatkan Review Kegiatan /POK, evaluasi terhadap target kinerja, pengukuran kinerja kegiatan, pengukuran efisiensi kegiatan, meningkatkan monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan serta pengelolaan anggaran secara rutin. Meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM BBPOM di Denpasar untuk mengantisipasi kemajuan ilmu dan teknologi yang begitu pesat, melalui pelatihan, serta memperkuat jejaring kerja dengan lintas sektor terkait.

## **BAB I PENDAHULUAN**

BBPOM di Denpasar adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM RI yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bertugas melakukan pengawasan Obat dan Makanan. Untuk melaksanakan Tupoksi, BBPOM di Denpasar menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 yang dituangkan dalam bentuk Perencanaan Kinerja lima tahunan. Program dari kegiatan tersebut dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja. Dalam mewujudkan target kinerja tahunan maka dibuat Perjanjian Kinerja antara Kepala BBPOM di Denpasar dengan Kepala Badan POM. Pelaksanaan kinerja dievaluasi setiap triwulan sesuai dengan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBPOM di Denpasar. Selanjutnya Perjanjian Kinerja tersebut diukur dalam bentuk laporan kinerja yang akuntabilitasnya diukur atas dasar kesesuaian antara perjanjian kinerja dengan hasil kinerja yang dinyatakan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau Laporan Kinerja (LAPKIN).

*Cascading* peran dan tanggung jawab dilakukan oleh Kepala BBPOM di Denpasar dengan eselon 3 (tiga) sesuai tupoksi masing-masing bidang, kemudian dilanjutkan dengan eselon 4 (empat), sampai kepada pejabat fungsional tertentu dan pejabat fungsional umum, dengan pembuatan SKP di awal tahun. Masing – masing bertanggung jawab terhadap capaian dari SKP nya untuk memastikan tercapainya target kinerja sesuai perjanjian kinerja. Capaian SKP dan perilaku pegawai diukur dalam prestasi kerja setiap tahun, disamping itu juga dibuat perjanjian kinerja dengan Kepala Bidang, mengacu perjanjian kinerja dengan Kepala Badan.

Output Pelaksanaan program / kegiatan, realisasi anggaran dan capaian kinerja sasaran strategis dan sasaran kegiatan dievaluasi setiap bulan, triwulan sesuai dengan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBPOM di Denpasar.

## 1.1. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor 05018/SK/KBPOM tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan POM yang kemudian diperbaharui dengan Surat Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.00.05.21.4232 tahun 2004, BBPOM di Denpasar merupakan salah satu UPT di lingkungan Badan POM di bidang pengawasan Obat dan Makanan, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM. Dalam pelaksanaan tugas secara teknis dibina oleh para Deputi dan secara administrasi dibina oleh Sekretaris Utama.

### TUGAS POKOK

- Melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplement, keamanan pangan dan bahan berbahaya.

### FUNGSI

Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan

Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplement, pangan dan bahan berbahaya

Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi

Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan pada sarana produksi dan distribusi

Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum

Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan

Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen

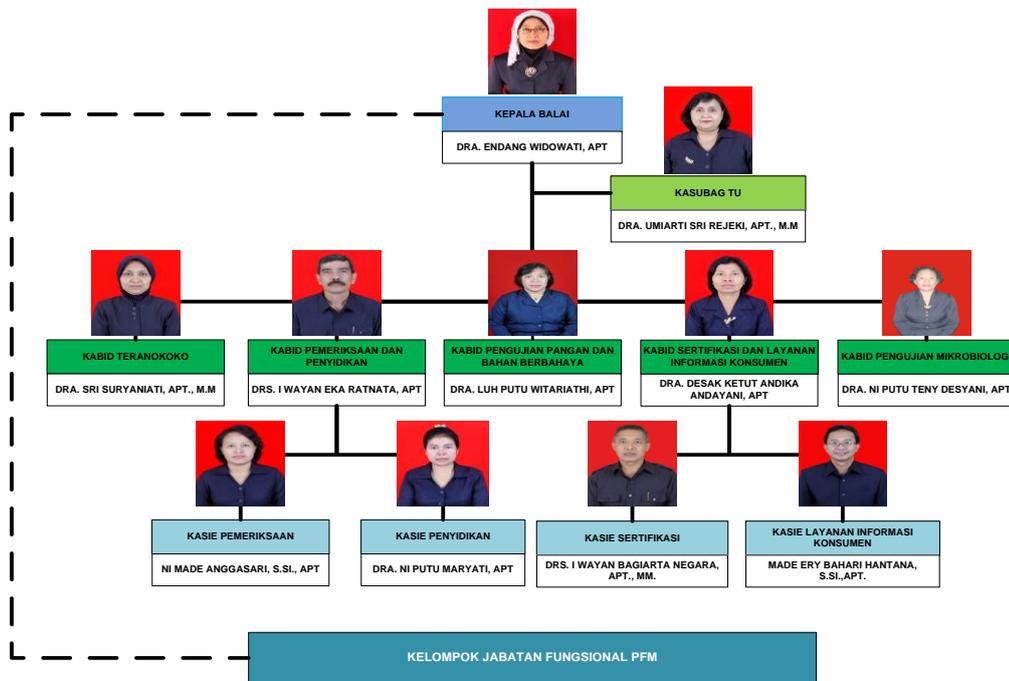
Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan

Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan

Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan, sesuai dengan bidang tugasnya

## 1.2. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI No. 05018/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan Badan POM, maka untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Balai Besar POM di Denpasar dibentuk dengan struktur organisasi sebagai berikut :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Balai Besar POM di Denpasar terdiri dari 5 Bidang, 4 Seksi, 1 Sub Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional, sebagai berikut :

- ❖ Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen.
- ❖ Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya.
- ❖ Bidang Pengujian Mikrobiologi.
- ❖ Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan, dengan 2 seksi yaitu Seksi Pemeriksaan dan Seksi Penyidikan.
- ❖ Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen, dengan 2 seksi yaitu Seksi Sertifikasi dan Seksi Layanan Informasi Konsumen.
- ❖ Sub Bagian Tata Usaha.
- ❖ Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan.

Masing-masing bidang, seksi, sub bagian dan kelompok jabatan fungsional tersebut mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

**1. Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen**

Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium pengujian dan penilaian mutu di bidang produk terapeutik, narkotika, obat tradisional, kosmetika dan produk komplemen.

**2. Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya**

Bidang Pengujian Pangan dan Bahan Berbahaya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu di bidang pangan dan bahan berbahaya.

**3. Bidang Pengujian Mikrobiologi**

Pengujian Mikrobiologi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu secara mikrobiologi.

**4. Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan**

Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, dan pemeriksaan sarana produksi, distribusi dan instansi kesehatan serta penyidikan kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.

Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan terdiri dari:

a. Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh untuk pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.

b. Seksi Penyidikan

Seksi Penyidikan mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap kasus pelanggaran hukum di bidang produk terapeutic, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.

**5. Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen**

Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program serta evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu dan layanan informasi konsumen.

Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen terdiri dari:

a. Seksi Sertifikasi

Seksi Sertifikasi mempunyai tugas melakukan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu.

b. Seksi Layanan Informasi Konsumen

Seksi Layanan Informasi Konsumen mempunyai tugas melakukan layanan informasi konsumen.

**6. Sub Bagian Tata Usaha**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi di lingkungan Balai Besar POM di Denpasar.

**7. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dan jabatan Fungsional Umum.

**1.3. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI**

BBPOM di Denpasar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan Badan POM yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor 05018/SK/KBPOM tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di lingkungan Badan POM. BBPOM di Denpasar sebagai UPT di Lingkungan Badan POM ini mempunyai peranan penting sebagai perpanjangan tangan dari Badan POM yaitu melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapeutic, narkotika, psikotropika dan zat adiktif

lain, obat tradisional, kosmetika, produk komplemen, keamanan pangan dan bahan berbahaya di wilayah Provinsi Bali.

Kemajuan ilmu dan teknologi dewasa ini membawa perubahan yang besar pada industri farmasi dan makanan dengan adanya penemuan baru maka skala produksi berkembang cepat baik dari segi jumlah, dan jenis maupun kualitas produknya. Untuk menjamin bahwa produk-produk tersebut mempunyai mutu, keamanan, khasiat/kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan saat beredar, maka harus dilakukan pengawasan oleh Balai Besar POM di Denpasar, setelah pengawasan oleh produsen sendiri, pengawasan konsumen sebagai penentu/ keputusan akhir terhadap konsumsi suatu produk juga sangat penting. Oleh karena itu perlu dilakukan Komunikasi, Edukasi dan Informasi (KIE) ke masyarakat secara rutin dan berkelanjutan. Terlebih lagi, fakta di lapangan menunjukkan adanya produsen yang melakukan pelanggaran di bidang obat dan makanan, seperti penambahan Bahan Kimia Obat pada obat tradisional dan penggunaan bahan berbahaya pada produksi makanan dan kosmetika.

Era globalisasi/ perdagangan bebas yang semakin maju dan penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menuntut kesiapan industri dalam negeri untuk dapat bersaing dengan produk dari luar negeri. Untuk itu Balai Besar POM di Denpasar perlu melakukan pemberdayaan terhadap industri secara intensif melalui pembinaan dalam penerapan *Good Manufacturing Practices* (GMP) sehingga daya saing produk Indonesia di dalam dan luar negeri meningkat terutama produk UMKM Kosmetik yang merupakan produk unggulan di wilayah provinsi Bali.

Trend pengobatan sendiri di masyarakat baik menggunakan obat kimia ataupun obat tradisional/ herbal yang diikuti dengan adanya promosi dan iklan yang gencar dengan informasi yang cenderung berlebihan/menyesatkan dapat menyebabkan penggunaan obat/obat tradisional/Herbal yang berlebihan dan tidak sebagaimana mestinya. Adanya peredaran produk tidak terdaftar dan atau palsu serta peredaran dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika pada jalur yang tidak resmi membutuhkan perhatian khusus untuk dapat ditanggulangi. Untuk itu, distribusi dan penggunaan sediaan farmasi/ Obat Tradisional/Herbal tersebut sangat perlu diawasi oleh Balai Besar POM di Denpasar.

Peran Balai Besar POM di Denpasar sebagai bagian integral dari Badan POM dalam melaksanakan pengawasan, sangat berkaitan erat dengan sistem ketahanan nasional karena pada realitanya mempunyai posisi yang strategis yaitu tugas dan fungsinya memberikan

perlindungan kepada masyarakat/ konsumen dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

## 1.4. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

### 1.4.1. INTERNAL

BBPOM di Denpasar memiliki Laboratorium yang sudah terakreditasi SNI 17025-2008, disamping itu BBPOM di Denpasar juga telah tersertifikasi ISO 9001-2008. Laboratorium BBPOM di Denpasar merupakan Laboratorium Unggulan untuk pengujian Narkotika dan Psikotropika (NAPZA). Laboratorium pangan dan bahan berbahaya telah mengikuti uji profisiensi yang diselenggarakan oleh provider International (FAPAS, APLAC) sejak tahun 2012 sampai saat ini tetap mengikuti uji profisiensi setiap tahun. Laboratorium kosmetik juga mengikuti Uji Profisiensi International. Dalam sistem INSW (*Indonesian National Single Window*) telah terhubung dengan Bea Cukai sejak tahun 2015. BBPOM di Denpasar telah memiliki Media Sosial yang selalu update setiap hari untuk memberikan Informasi mengenai Obat dan Makanan dimana sampai saat ini telah memiliki *follower twitter* sebanyak 966 dan *friend di facebook* sebanyak 1.989.

Tahun 2016 BBPOM di Denpasar memiliki 102 orang pegawai, ditinjau dari segi umur dapat dikelompokkan sebagai berikut :

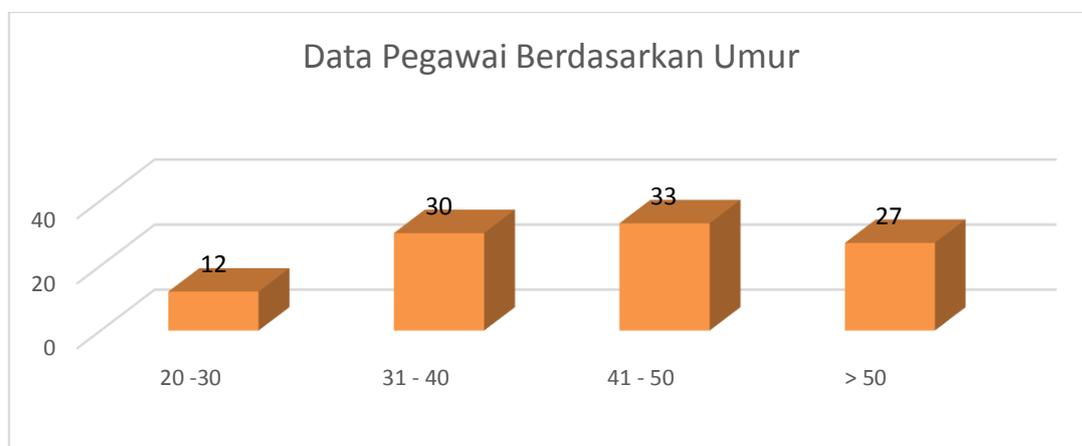


Diagram 1.1 Sebaran Pegawai Berdasarkan Umur

Ditinjau dari tingkat pendidikan, pegawai BBPOM di Denpasar dapat dikelompokkan sebagai berikut :

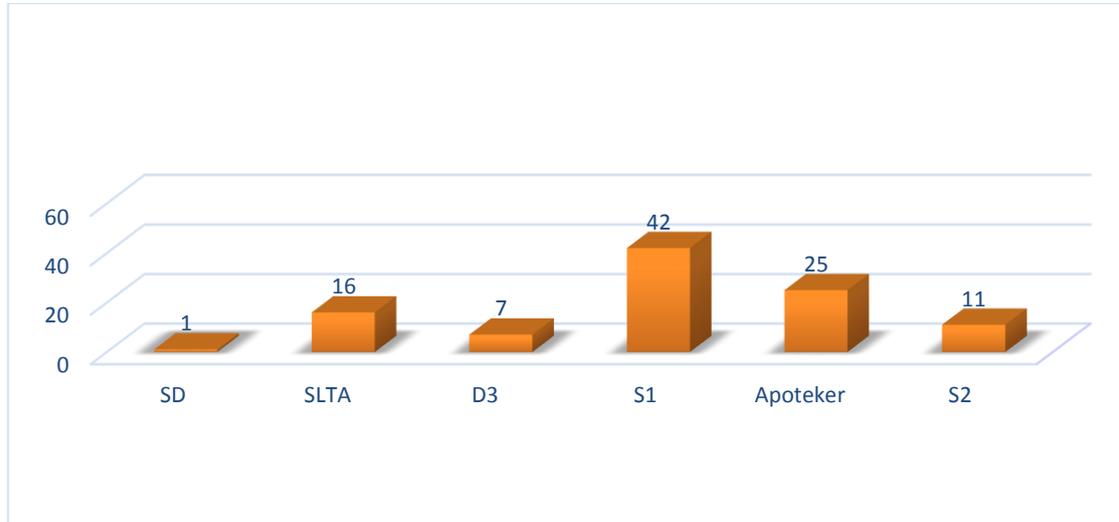


Diagram 1.2 Sebaran Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Dengan gambaran rincian 4 orang (14,71%) golongan II, 84 orang (81,381%) golongan III, dan 14 orang (14,71%) golongan IV.

Penempatan Pegawai dapat dilihat pada diagram berikut :

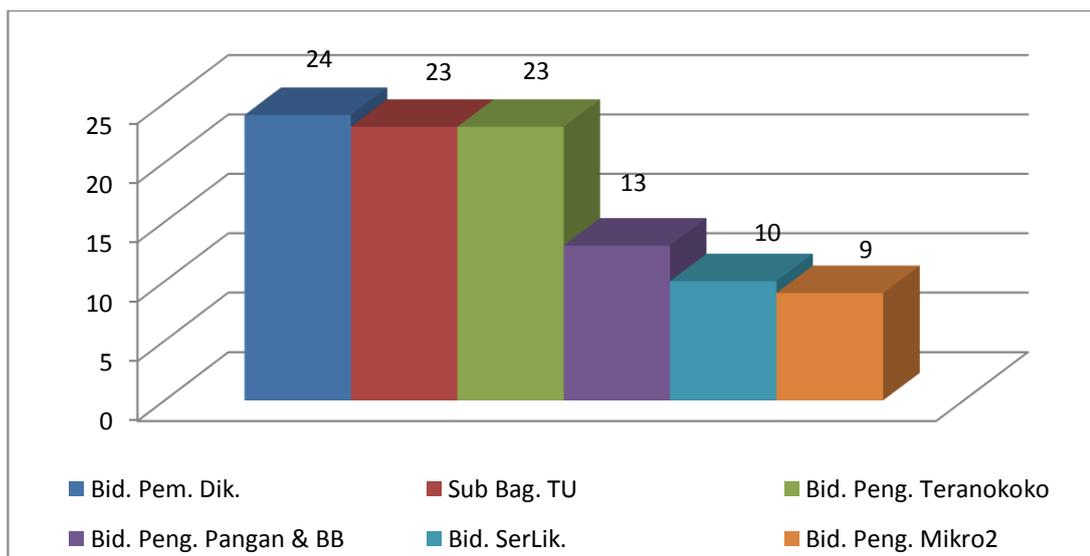


Diagram 1.3 Profil Pegawai Menurut Penempatannya

Dalam rangka pengembangan SDM, tahun 2016 sebanyak 1 orang pegawai sedang mengikuti pendidikan S1, 5 orang pegawai mengikuti Pendidikan S2, 1 orang pegawai telah berhasil menyelesaikan pendidikan S2. Selain itu pengembangan SDM juga dilakukan melalui pelatihan baik pelatihan teknis maupun manajerial

Tabel 1.1. Data Kualifikasi dan Kompetensi Personel

<b>Kualifikasi dan Kompetensi Pegawai</b>	<b>Jumlah</b>
PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil)	14
PFM (Pengawas Farmasi dan Makanan)	60
CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik)	8
Inspektur Obat Tradisional	3
Inspektur NAPZA	1
Inspektur Kosmetika	5
Food Inspektur	17
Safety Assesor Kosmetik	1
Auditor Pangan, Obat Tradisional dan Kosmetik	6
Bendahara	6
Perencana	1
Analisis Kepegawaian	2
Pranata Komputer	2
PBBJ	17

Tabel 1.2. Data Alat Laboratorium yang dimiliki BBPOM di Denpasar

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jumlah</b>
1	LC MS/MS	1
2	GC-MS	1
3.	HPLC	10
4.	UPLC	1
5.	Spektrofotometer UV – VIS	3
6.	Dissolution Tester	3
7.	GC detektor FID	1
8.	AAS dengan flame, GFA, HVG	2
9.	TLC System	1
10.	FT-IR	1
11.	ELISA Reader + Washer	1

### 1.4.2. EKSTERNAL

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM RI Nomor HK.00.05.21.3592 yang ditetapkan tanggal 9 Mei 2007 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan POM Nomor 05018/SK/KBPOM tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di lingkungan Badan POM, cakupan wilayah kerja BBPOM di Denpasar meliputi seluruh wilayah administratif Provinsi Bali yang terdiri dari 9 Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Buleleng, Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Bangli, Klungkung, Karangasem dan Kota Denpasar.



Gambar 1.2. Pulau Bali

Luas wilayah Provinsi Bali adalah 5.780 km<sup>2</sup> atau 0,29% dari luas kepulauan Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, jumlah penduduk Provinsi Bali hasil registrasi penduduk tahun 2015 sebanyak 4.152.000 jiwa, dengan jumlah penduduk laki laki sebanyak 2.091.000 dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 2.061.800.

Jumlah sarana produksi dan distribusi yang harus diawasi oleh BBPOM di Denpasar adalah 3755 sarana dengan rincian 3.308 sarana distribusi obat dan makanan, 447 sarana produksi Obat Tradisional, Kosmetika dan Pangan. Sarana produksi yang terbanyak adalah sarana produksi pangan yaitu sebanyak 398 yang terdiri dari 66 Sarana MD dan 332 sarana PIRT. Sarana produksi Obat Tradisional terdiri dari 1 sarana IOT dan 17 sarana IKOT. Sedangkan sarana produksi kosmetika sebanyak 31, sarana produksi Obat tidak ada di wilayah provinsi Bali.

Sarana distribusi terbanyak adalah sarana distribusi pangan dengan jumlah 1295, berikutnya adalah sarana distribusi Terapeutik dan Napza sebanyak 1003, sarana distribusi Kosmetik sebanyak 717, sarana distribusi Obat Tradisional sebanyak 165, sarana distribusi Bahan Berbahaya sebanyak 72 dan sarana distribusi Produk komplemen sebanyak 56 sarana.

## 1.5. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis yang merupakan isu Nasional maupun isu spesifik Provinsi Bali memiliki pengaruh besar terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Denpasar untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, antara lain :

1. Belum sepenuhnya tercapai penapisan produk dalam rangka Pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*Pre Market*).
  - a. Sebagai daerah tujuan wisata maka intensitas lalu lintas orang dan barang –barang khususnya produk kebutuhan wisatawan sangat tinggi , hal ini rentan terhadap peredaran produk ilegal dan disinyalir menjadi tempat untuk lalu lintas peredaran gelap Narkotika. Oleh karena itu Pengawasan Obat dan Makanan di daerah perbatasan/pelabuhan perlu ditingkatkan dengan melakukan kerjasama yang lebih intensif dengan instansi terkait (Bea Cukai, Dinas Perdagangan, Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Kesehatan dan instansi terkait lainnya), dalam melakukan pencegahan terhadap peningkatan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum. Untuk meningkatkan pelayanan publik menjadi perlu menempatkan petugas BBPOM di Denpasar di daerah perbatasan (Bandara dan Pelabuhan) seperti yang pernah dilakukan pada tahun sebelumnya.
  - b. Wilayah BBPOM di Denpasar merupakan daerah potensial untuk pengembangan Obat Asli Indonesia, terutama dengan tersedianya ribuan ”lontar usadha” yang merupakan warisan leluhur yang telah dimanfaatkan secara turun temurun. Produksi Obat Tradisional baik yang dilakukan oleh UMOT atau UKOT memerlukan bimbingan dan pembinaan untuk pengembangannya baik dari segi proses produksi (CPOTB) maupun pengembangan SDM nya.
  - c. UMKM kosmetik juga mengalami perkembangan yang sangat pesat di Bali khususnya produksi Kosmetika Tradisional dan terbuat dari bahan-bahan Herbal. Terhadap UMKM yang memproduksi kosmetika dari bahan herbal memerlukan pembinaan yang lebih intensif dalam pengembangannya karena membutuhkan informasi yang lebih detail menyangkut aspek keamanan bahan baku yang digunakan dan legalitas produk.

- d. Importasi OMKABA baik untuk kepentingan komersial (secara online) maupun untuk penggunaan sendiri tanpa melalui proses SKI ( Surat Keterangan Impor) dengan intensitas sangat tinggi. Hal ini membutuhkan kerjasama lintas sektor khususnya dengan Direktorat Bea dan Cukai yang lebih intensif lagi agar produk produk tersebut dapat diawasi secara ketat importasinya sehingga produk yang tidak memenuhi standar dan membahayakan kesehatan masyarakat dapat dicegah.
2. Belum optimalnya pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*Post Market*)
    - a. UMKM di daerah Bali perkembangannya sangat pesat, didorong lagi oleh kebijakan pemerintah mempermudah ijin UMKM yang dapat diterbitkan oleh pihak Kelurahan dan Kecamatan sehingga pertumbuhannya sangat pesat. Pertumbuhan tersebut tidak diiringi oleh pengetahuan dan wawasan para produsen khususnya IRTP tentang keamanan pangan. Hal ini tergambar dari hasil pengawasan BBPOM di Denpasar yaitu masih banyak hasil uji sampling produk IRTP mengandung bahan berbahaya diantaranya pengawet, pemanis dan pewarna. Untuk itu perlu dilakukan pembinaan cara pembuatan makanan, kosmetik, dan obat tradisional yang baik kepada produsen UMKM serta meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* terkait.
    - b. Dari hasil pengawasan dan uji laboratorium BBPOM di Denpasar ditemukan Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia Obat demikian juga dengan produk Kosmetik yang mengandung Bahan Berbahaya yang dilarang dan tanpa ijin edar.
  3. Belum Efektifnya Pemberdayaan Masyarakat melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam rangka peningkatan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan.

Tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap obat dan makanan yang aman, bermanfaat dan bermutu, sehingga untuk dapat melindungi dirinya dari produk obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat maka perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat konsumen melalui penyebaran informasi dan memberikan edukasi melalui penyuluhan kepada kelompok – kelompok masyarakat disetiap lini. Kepada produsen juga perlu diberikan informasi dan edukasi agar mengedepankan tanggung

jawab moral yaitu melakukan kegiatan produksi dengan mengikuti cara-cara berproduksi yang baik dan tanggung jawab hukum yaitu dengan melengkapi perijinan yang diperlukan dalam berproduksi. Pada saat ini pemberdayaan masyarakat sudah dilakukan tetapi masih perlu ditingkatkan baik dari segi kualitas dan kuantitasnya.

4. Pengawasan terhadap Obat Tradisional perlu lebih ditingkatkan terutama pada Obat Tradisional asing melalui penertiban produk obat tradisional asing atau import ilegal. Disamping itu mengingat masih diketemukannya obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat yang telah dilarang maka perlu tetap dilanjutkan upaya pembinaan terhadap produsen setempat melalui kerjasama dengan lintas sektor. Rendahnya kepatuhan terhadap standar Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik, merupakan dasar untuk meningkatkan mutu produk Obat Tradisional.
5. Di bidang pengawasan produk terapeutik/obat, hasil pengujian terhadap sampel obat yang beredar pada dasarnya telah baik. Namun demikian mengingat tingginya resiko bagi kesehatan maka pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan produk obat yang beredar terhadap standar yang berlaku tetap merupakan prioritas. Upaya ini diikuti pula dengan peningkatan kemampuan inspektur di lingkungan BBPOM di Denpasar berkaitan dengan pemberantasan Obat palsu selain kegiatan yang bersifat operasional dan peningkatan kerja sama lintas sektor.
6. Dalam menghadapi permasalahan pengawasan Obat dan Makanan yang semakin luas dan kompleks ke depan meskipun secara *de facto* tugas pokok dan fungsi telah dapat dilaksanakan, namun Badan POM belum didukung oleh perangkat hukum yang kuat berupa Undang-Undang tentang pengawasan Obat dan Makanan yang akan mendasari tugas dan tanggung jawab serta kewenangan Badan POM. Adanya undang – undang ini selain diperlukan oleh konsumen juga diperlukan oleh kalangan pelaku usaha untuk mendapatkan kepastian hukum dan dalam mengembangkan bisnis dan industri di Indonesia.
7. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)  
JKN merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin agar setiap rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang minimal layak menuju terwujudnya kesejahteraan sosial yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam JKN juga diberlakukan penjaminan mutu obat yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

Implementasi JKN mengakibatkan , jenis obat yang beredar di pasaran akan sangat bervariasi baik jumlah maupun jenisnya, sehingga BBPOM di Denpasar harus meningkatkan pengawasan terutama pada sarana distribusi . Untuk menunjang pengawasan , Kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian , kompetensi SDM BBPOM di Denpasar juga harus terus ditingkatkan.

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

### **2.1. RENCANA STRATEGIS**

Rencana Strategis (Renstra) dituangkan dalam perjanjian kinerja, yaitu suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada.

Renstra BBPOM di Denpasar tahun 2015-2019 telah disusun dengan mengacu kepada Renstra Badan POM tahun 2015-2019 yang menuangkan: Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian Tujuan/Sasaran yang dijabarkan dalam bentuk Kebijakan dan Program.

#### **1. VISI DAN MISI**

Dalam melaksanakan kegiatan BBPOM di Denpasar berpedoman pada Visi dan Misi Badan POM sebagai lembaga induk. Visi dan Misi Badan POM ditetapkan dalam Peraturan Kepala Badan POM, yaitu sebagai berikut:

#### **VISI**

**" Obat dan Makanan Aman Meningkatkan  
Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa."**



## 2. TUJUAN

Sesuai dengan Visi dan Misi Badan POM serta mengacu kepada tujuan utama pembangunan pengawasan Obat dan Makanan tahun 2015-2019 yang dicanangkan oleh Badan POM, maka tujuan utama pembangunan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Bali tahun 2015 – 2019 adalah:

1. Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, bermanfaat dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat.
2. Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi.

## 3. SASARAN STRATEGIS

Visi, Misi dan tujuan tersebut telah dijabarkan ke dalam sasaran strategis Balai Besar POM di Denpasar, yang menggambarkan target yang akan dihasilkan selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja (*performance plan*).

Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran - sasaran kegiatan yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis terkait Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang telah ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis dicapai.

Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Kegiatan, Target Indikator tahun 2016 dan Target Lima Tahun (RPJM) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Kegiatan, Target Indikator tahun 2016 dan 2019(RPJM)

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	
			2016	Akhir RPJM
		URAIAN		
1	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat *	92.50	94.00
		2. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat *	81.00	84.00
		3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat *	90.00	93.00
		4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat *	80.00	83.00
		5. Persentase makanan yang memenuhi syarat *	88.60	90.10
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	1. Tingkat Kepuasan Masyarakat*	80.50	82.00
		2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	4	7.00
3	Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP dari BPOM	A	A

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	
			2016	Akhir RPJM
<b>Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan</b>				
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	3,500	17500
		2. Pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK)	100.00	100.00
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	25.00	25.00
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	24	25
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	10	49
<b>Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat</b>				
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	1. Jumlah layanan Publik BBPOM di Denpasar	1,150	5945
		2. Jumlah Komunitas yang diberdayakan	20	29
<b>Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM</b>				
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana sesuai standar	73.00	88.00
2	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9	48

Indikator Kerja utama ( tanda\*) ditetapkan sesuai renstra BBPOM di Denpasar dalam jangka waktu periode Renstra 2015-2019 dengan Surat Keputusan Kepala Balai Besar POM di Denpasar No. HK.07.107.06.15.1.1657 tanggal 3 Juni 2015.

**2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016**

Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Balai Besar POM di Denpasar sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2015-2019. Perjanjian Kinerja merupakan komitmen Kepala Balai Besar POM di Denpasar sebagai Pelaksana Pengawas Obat dan Makanan di Provinsi Bali dengan Kepala Badan POM dengan tetap meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Di Denpasar Tahun 2016 dituangkan dalam Pernyataan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja per triwulan dan Rencana Kinerja Tahunan Nomor HK.07.107.12.15.4293 tanggal 22 Desember 2016.

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2016

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	92,50%
		2 Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	81,00%
		3 Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	90,00%
		4 Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	80,00%
		5 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88,60%
2.	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat.	1 Tingkat Kepuasan Masyarakat	80,50%
		2 Jumlah Kabupaten / Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	4
3.	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP BBPOM di Denpasar Oleh Badan POM RI.	A

<b>Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan</b>				
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	1	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	3500
		2	Pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK)	100%
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan		25
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standard	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan		24
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan		10
<b>Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat</b>				
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	1	Jumlah layanan publik BB/BPOM	1150
		2	Jumlah komunitas yang diberdayakan	20
<b>Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai BPOM</b>				
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar		73%
2	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu		9

**Kegiatan**

Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Denpasar

**Anggaran**

Rp. 32.618.542.000

CARA MENGHITUNG CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

**1** Persentase obat yang memenuhi syarat

Perbandingan produk obat yang memenuhi syarat pada tahun berjalan terhadap jumlah seluruh obat yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan.

106,88 %

**2** Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat

Perbandingan produk obat tradisional yang memenuhi syarat pada tahun berjalan terhadap jumlah seluruh obat tradisional yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan.

97,83 %

**3** Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat

Perbandingan produk kosmetik yang memenuhi syarat pada tahun berjalan terhadap jumlah seluruh kosmetik yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan.

108,78 %

**4** Persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat

Perbandingan produk suplemen kesehatan yang memenuhi syarat pada tahun berjalan terhadap jumlah seluruh suplemen kesehatan yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan.

124,29 %

**5** Makanan yang memenuhi syarat

Perbandingan produk makanan dengan Ijin Edar yang dikeluarkan Badan POM yang memenuhi syarat pada tahun berjalan terhadap jumlah seluruh makanan yang diuji dengan parameter kritis pada tahun berjalan.

104,62 %

**6** Tingkat kepuasan masyarakat

Diperoleh dari hasil survei Kepuasan Pelanggan

111,16 %

Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing - masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan seperti rumus di bawah ini :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran Nilai Pencapaian Sasaran Strategis dihitung berdasarkan capaian indikatornya, untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka diberikan pembobotan untuk masing - masing indikator. Untuk masing - masing indikator memiliki bobot yang sama. Khusus untuk IKU, memiliki bobot 2 (dua) kali dibandingkan indikator yang lain. Berikut adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian sasaran (NPS) :

Sasaran Strategi 1 "Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan"

$$NPS1 = \frac{2NPI1 + 2NPI2 + 2NPI3 + 2NPI4 + 2NPI5}{10}$$

Sasaran Strategi 2 "Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Masyarakat"

$$NPS2 = \frac{2NPI1 + NPI2}{3}$$

Sasaran Strategi 3 "Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BBPOM di Denpasar"

$$NPS3 = NPI1$$

### 2.3. KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR



### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan.

Sasaran Strategis BBPOM di Denpasar yang merupakan penjabaran dari misi dan tujuan strategis yang telah ditetapkan menggambarkan sesuatu yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan menjadi target sasaran tahunan melalui program dan kegiatan yang dilakukan. Pengukuran kinerja tahun 2016 dilakukan dengan cara membandingkan target kinerja dan realisasi kinerja setiap indikator dari sasaran strategis dan sasaran kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja tahun 2016. Realisasi kinerja dihitung berdasarkan definisi operasional setiap indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja pada Renstra 2015-2019, kemudian dihitung persentase capaian kinerja untuk masing – masing indikator, selanjutnya capaian masing – masing sasaran strategis dihitung sesuai rumus pada Bab II, seluruh pengukuran indikator kinerja dapat dilihat pada lampiran 2.

Pada Renstra Balai Besar POM di Denpasar tahun 2015-2019 ditetapkan 3 sasaran strategis dan 7 sasaran kegiatan untuk mencapai tujuan strategis sesuai dengan visi BPOM 2015-2019 “Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa”. Untuk mengukur capaian ke 3 sasaran tersebut, ditetapkan 8 indikator sasaran strategis dan 9 indikator sasaran kegiatan.

#### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Hasil pengukuran 8 indikator sasaran strategis adalah 6 indikator capaiannya lebih dari 100 % (**memuaskan**) dan 2 indikator yang capaiannya kurang dari 100 % (**cukup**), sedangkan hasil pengukuran 9 indikator sasaran kegiatan tahun 2016 adalah indikator yang capaiannya lebih dari 100 % (**memuaskan**) sebanyak 3 indikator, capaian sama dengan 100 % (**baik**) sebanyak 5 indikator, indikator yang capaiannya kurang dari 100 % (**cukup**) sebanyak 1 indikator, dapat dilihat pada lampiran 2, Pengukuran Kinerja tahun 2016

Analisis Nilai Pencapaian Sasaran Strategis pada tahun 2016 dihitung berdasarkan capaian masing – masing indikator, Hasil Nilai Pencapaian tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1. Pencapaian Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Nilai Capaian Sasaran (%)	Kriteria
1.	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	108,48	Memuaskan
2.	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	115.77	Memuaskan
3.	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BBPOM di Denpasar	90.26	Cukup

Capaian indikator sasaran strategis dan sasaran kegiatan sesuai kriteria, dapat dilihat pada gambar di bawah ini



Gambar 3.1 Capaian indikator kinerja Sasaran Strategis dan Sasaran Kegiatan

**PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

Kelima indikator di Sasaran Strategis 1 dan satu indikator Sasaran Strategi 2 yaitu Tingkat Kepuasan Masyarakat merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) BBPOM di Denpasar. Capaian IKU Balai Besar POM di Denpasar dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

No.	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92.50	98.86	106,88%	Memuaskan
2.	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	81.00	79.24	97,82%	Cukup
3.	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	90.00	97.90	108,78%	Memuaskan
4.	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	80.00	99.43	124,29%	Memuaskan
5.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88.60	92.69	104,62%	Memuaskan
6.	Tingkat kepuasan masyarakat	80.50	89.48	111,16%	Memuaskan

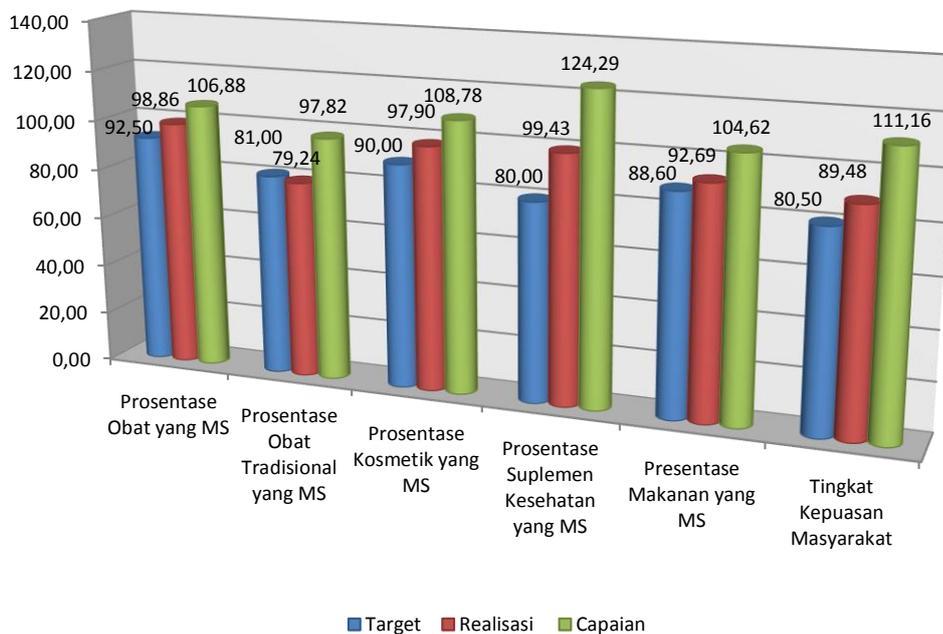


Diagram 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama

Perbandingan Capaian IKU tahun 2016 dengan tahun 2015 dan target jangka menengah (RPJM) dapat dilihat pada diagram di bawah ini

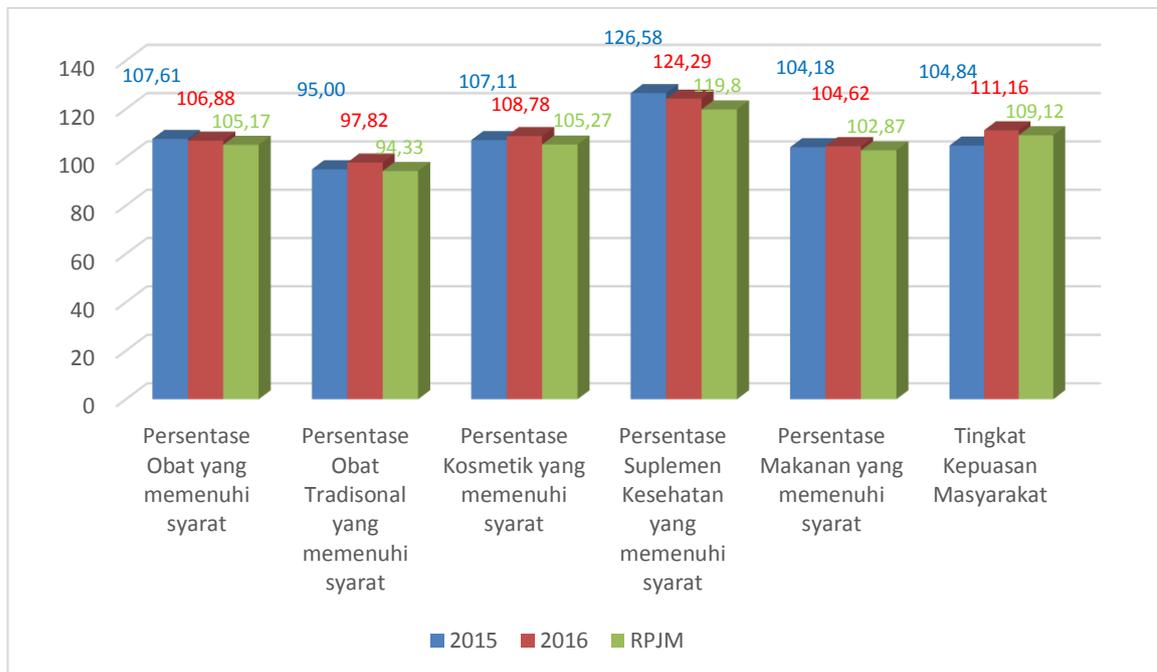


Diagram 3.2 Perbandingan Capaian IKU

Di bawah ini diuraikan capaian indikator masing-masing sasaran strategis sebagai berikut:

### A.1. Pencapaian Sasaran Strategis 1 Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan

Hasil pengukuran capaian dan perbandingan indikator kinerja pada Sasaran Strategis 1 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Gambar 3.2. Pengujian Obat dan Makanan

Tabel 3.3 Capaian dan Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis 1

No.	Indikator Sasaran Strategis 1	Target 2016	Target Akhir RPJM	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Capaian 2015	Capaian 2016	Capaian Akhir RPJM	Kriteria 2016
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92.50	94.00	99.00	98.86	107.61	106,88%	105.17	Memuaskan
2.	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	81.00	84.00	76.00	79.24	95.00	97,82%	94.33	Cukup
3.	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	90.00	93.00	95.33	97.90	107.11	108,78%	105.27	Memuaskan
4.	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	80.00	83.00	100.00	99.43	126.58	124,29%	119.80	Memuaskan
5.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88.60	90.10	91.78	92.69	104.18	104,62%	102.87	Memuaskan

Perbandingan capaian indikator Sasaran Strategis 1 tahun 2016 terhadap tahun 2015 dan target akhir RPJM, dapat dilihat pada diagram dibawah ini :

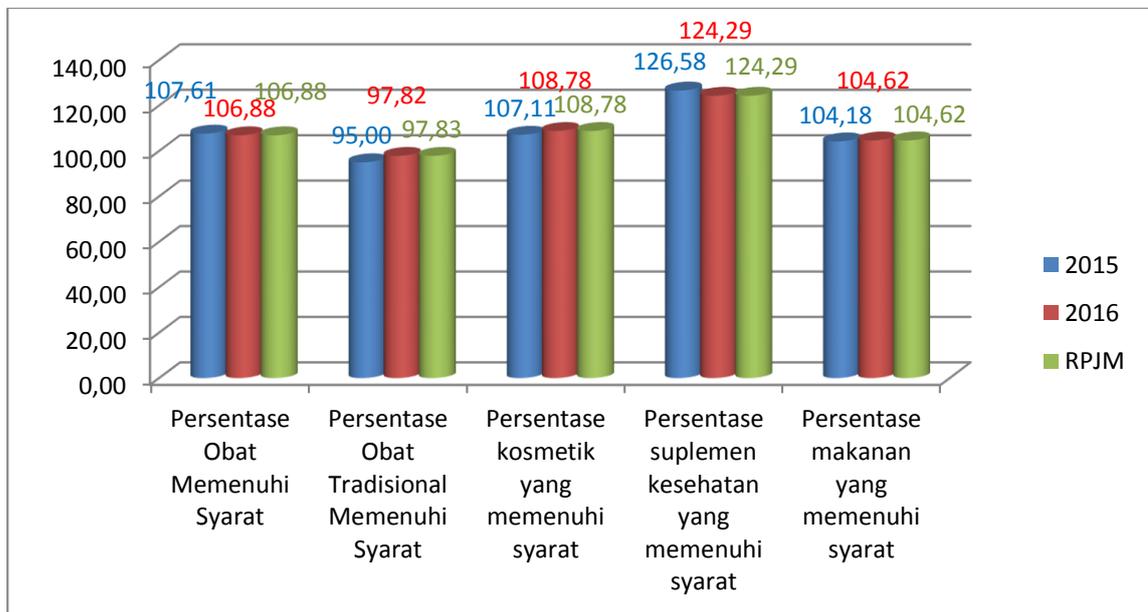


Diagram 3.3 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Strategis 1

Masing-masing indikator dan analisa capaian akuntabilitas dijelaskan sebagai berikut:

### A.1.1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat



Diagram 3.4 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Hasil Pengukuran terhadap indikator kinerja persentase Obat yang memenuhi syarat terlihat bahwa capaian indikator kinerja yaitu sebesar 106,88% dengan kriteria **memuaskan**. Realisasi kinerja indikator tersebut berdasarkan hasil pengujian sampel obat yang memiliki ijin edar Badan POM, yang dilakukan diseluruh Provinsi Bali dengan hasil memenuhi syarat sebanyak 692 sampel (98,86%) dari 700 sampel dan 8 sampel tidak memenuhi syarat kimia yaitu penetapan kadar zat aktif Deksamethason, amoksisilin, Uji disolusi dan Identifikasi DNA. Terhadap produk obat TMS tersebut telah dilaporkan ke PPOMN dengan tembusan kepada Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapeutik dan Napza cq Direktorat Pengawasan Produksi Produk Terapeutik dan PKRT dan telah dilakukan tindak lanjut berupa *recall*.

Dengan realisasi kinerja persentase obat yang memenuhi syarat sebanyak 98,86 % menunjukkan bahwa obat yang beredar di Provinsi Bali cukup aman, berkhasiat dan bermutu sehingga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Pengawasan hanya dilakukan di sarana distribusi dan sarana pelayanan karena di Provinsi Bali tidak ada sarana produksi Obat. Dari 1003 sarana distribusi dan pelayanan yang ada, 345 sarana telah diawasi pada tahun 2016. Pada saat melakukan pengawasan senantiasa disampaikan bagaimana melakukan pengelolaan produk obat yang didistribusikan sehingga mutu bisa dijaga. Terhadap hasil pengawasan yang tidak memenuhi ketentuan selalu ditindaklanjuti dengan memberikan pembinaan tertulis baik langsung ke sarana yang bersangkutan maupun berupa rekomendasi ke instansi berwenang terkait (Dinas Kesehatan) untuk memberikan tindakan. Untuk mencapai dan mempertahankan capaian saat ini tetap harus didukung dengan melakukan pengawasan dan pembinaan ke sarana.

Dalam rangka peningkatan kepatuhan sarana terhadap peraturan yang ada juga dilakukan sosialisasi peraturan dan pedoman tentang Cara Distribusi Obat yang Baik. Semua ini adalah bertujuan untuk menertibkan jalur distribusi sehingga mutu, keamanan dan manfaat produk bisa dipertahankan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.

Pelaksanaan sampling dan pengujian yang dilakukan berpedoman pada Pedoman Sampling tahun 2016 dan kemampuan uji Balai Besar POM di Denpasar yang terus ditingkatkan sesuai dengan persyaratan parameter kritis.

Perbandingan capaian dengan target RPJM tahun 2019 menunjukkan bahwa realisasi tahun 2016 sudah melampaui target tahun 2019. Adanya perbedaan prioritas sampling setiap tahun dan perbedaan tren penyakit pada masyarakat ataupun wabah penyakit setiap tahun maka kemungkinan akan ada fluktuasi capaian di setiap tahun hingga tahun 2019.

Persentase Obat yang memenuhi syarat pada tahun 2015 adalah 99,00 %, jika dibandingkan dengan tahun 2016 ada penurunan persentase tetapi tidak terlalu besar. Hal ini kemungkinan karena perbedaan jenis sampel dan parameter uji serta tempat sampling. Dibandingkan dengan BBPOM di Yogyakarta , dimana kondisi dan wilayahnya hampir sama dengan BBPOM di Denpasar dapat dilihat persentase Obat memenuhi syarat yang beredar di Provinsi Bali dan di Daerah Istimewa Yogyakarta juga hampir sama , Realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat dari BBPOM di Yogyakarta 98.28%.

Untuk selanjutnya, BBPOM di Denpasar harus lebih ketat dan inovatif dalam melakukan pengawasan terhadap distribusi Obat serta meningkatkan kemampuan SDM laboratorium untuk melakukan pengujian mengikuti perkembangan obat yang semakin pesat. Sistem Pengawasan Obat dan Makanan perlu ditingkatkan mengikuti kecenderungan pelanggaran yang terjadi atau bahkan lebih proaktif melakukan antisipasi untuk menjamin Obat yang beredar di Provinsi Bali aman dan bermutu sehingga meningkatkan kesehatan masyarakat.

### A.1.2. Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat



Diagram 3.5 Persentase Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat

Keterangan :

Terdapat 6 sampel Obat Tradisional dengan 2 parameter TMS.

Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat terlihat bahwa capaian indikator kinerja yaitu sebesar 97,82 % dengan kriteria **cukup**. Realisasi kinerja indikator tersebut berdasarkan dengan hasil pengujian sampling Obat Tradisional dengan ijin edar dari Badan POM yang dilakukan diseluruh Provinsi Bali dengan hasil memenuhi syarat sebanyak 416 sampel (79,24 %) dari 525 sampel. Hasil pengujian Obat Tradisional yang tidak memenuhi syarat sebanyak 109 sampel (20,76 %) dengan rincian tidak memenuhi syarat kimia 5 sampel, antara lain kadar air dan waktu hancur, tidak memenuhi syarat mikrobiologi 101 sampel dimana parameter uji yang tidak memenuhi syarat antara lain ALT, kapang khamir dan *Pseudomonas aeruginosa*, tidak memenuhi syarat kimia dan mikrobiologi sebanyak 3 sampel.

Capaian indikator Obat Tradisional yang memenuhi syarat pada akhir RPJM masih dibawah target tahun 2019 dengan capaian 94,33%.

Jika dibandingkan dengan tahun 2015, persentase Obat tradisional yang memenuhi syarat meningkat. Peningkatan ini kemungkinan disebabkan karena adanya perbedaan jenis sampel yang disampling dengan tahun sebelumnya. Persentase sampel yang tidak memenuhi syarat mikrobiologi sebanyak 20,76% menunjukkan bahwa Obat Tradisional yang beredar di Provinsi Bali masih banyak yang tidak memenuhi syarat mikrobiologi. Hal ini disebabkan

karena proses produksi (CPOTB) yang tidak memenuhi ketentuan terutama dalam hal higiene dan sanitasi.

Dibandingkan dengan BBPOM di Yogyakarta , dimana kondisi dan wilayahnya hampir sama dengan BBPOM di Denpasar dapat dilihat persentase Obat Tradisional memenuhi syarat yang beredar di Provinsi Bali Lebih besar hampir 2 % dibandingkan dengan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Realisasi persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat dari BBPOM di Yogyakarta 77.78%.

Obat Tradisional yang beredar di Bali selain diproduksi di Bali sendiri, sebagian besar diproduksi di luar Bali. Sarana produksi Obat Tradisional yang ada di Bali kebanyakan kategori UKOT dan UMOT yang sangat memerlukan pembinaan terutama masalah Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik. Tidak kalah pentingnya juga adalah bagaimana mendistribusikan produk Obat Tradisional agar sampai ke tangan konsumen dalam kondisi memenuhi syarat, sehingga perlu terus dilakukan pengawasan ke sarana distribusi. Dari 18 sarana produksi dan 165 sarana distribusi yang ada, tahun 2016 diawasi sebanyak 12 (66,67%) sarana produksi dan 51 (30,91%) sarana distribusi.

Dari hasil pengawasan memang masih banyak temuan yang didapat. Sarana yang tidak memenuhi ketentuan sebanyak 66,67 % sarana produksi dan 47,06 % sarana distribusi. Kalau dilihat dari produk temuan yang banyak adalah produk tanpa izin edar dan produk yang mengandung BKO. Dalam rangka penegakan hukum dari 15 kasus pelanggaran di bidang Obat Tradisional, sebanyak 3 pelaku usaha diproses *pro Justitia*, untuk memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran di bidang Obat Tradisional sesuai pedoman pola tindak lanjut.

Dengan belum tercapainya target persentase Obat Tradisional ini berarti sasaran strategi Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Bali belum optimal mencakup Obat Tradisional. Hal ini disebabkan karena Obat Tradisional yang beredar di Provinsi Bali sebagian besar merupakan produksi dari luar wilayah Provinsi Bali sehingga sulit melakukan intervensi terhadap produsen Obat Tradisional tersebut. BBPOM di Denpasar telah melakukan pembinaan kepada sarana distribusi untuk tidak menjual produk Obat Tradisional yang tidak memenuhi syarat, tidak memiliki izin edar, yang merupakan publik warning dan melakukan KIE kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih cerdas untuk tidak mengkonsumsi Obat Tradisional yang tidak memenuhi syarat dan tidak memiliki izin edar sehingga diharapkan selanjutnya capaian indikator Obat Tradisional yang

memenuhi syarat bisa tercapai sesuai dengan target. KIE juga dilakukan kepada pelaku usaha agar mampu mandiri dalam hal memberikan jaminan keamanan dan mutu produknya serta meningkatkan daya saing dipasar lokal maupun pasar global.

Terkait capaian persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat sebesar 97,83%, selanjutnya BBPOM di Denpasar meningkatkan sistem pengawasan terhadap Obat Tradisional melalui beberapa hal antara lain:

- ❖ Dilakukan strategi yang lebih fokus untuk menangani masalah Obat Tradisional melalui penyuluhan dan sosialisasi kepada pelaku usaha Obat Tradisional.
- ❖ Dilakukan koordinasi dengan BPOM / BBPOM provinsi terkait, untuk tindak lanjut Obat Tradisional yang merupakan produk luar Provinsi Bali.
- ❖ Pengawasan terhadap Obat Tradisional lebih ditingkatkan di daerah pelabuhan / bandara yang merupakan pintu masuk produk-produk dari luar.
- ❖ Memantau dan mengawal tindak lanjut produk yang tidak memenuhi syarat.
- ❖ Meningkatkan penyebaran *public warning* terkait Obat Tradisional kepada pelaku usaha dan masyarakat.
- ❖ Lebih meningkatkan kemandirian pelaku usaha Obat Tradisional untuk menjamin mutu dan keamanan produk Obat Tradisional sehingga mampu bersaing di pasar lokal maupun global dengan pembinaan CPOTB dan penyebaran informasi terkait Obat Tradisional.
- ❖ Meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha untuk tidak menjual produk Obat Tradisional yang tidak memenuhi syarat, tidak memiliki ijin edar, mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) dan merupakan publik warning.
- ❖ Meningkatkan KIE untuk tidak mengkonsumsi Obat Tradisional yang tidak memenuhi syarat, mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) dan tidak memiliki ijin edar sehingga diharapkan capaian indikator Obat Tradisional yang memenuhi syarat bisa tercapai sesuai dengan target.
- ❖ Provinsi Bali merupakan daerah potensial untuk pengembangan Obat Asli Indonesia, terutama dengan tersedianya ribuan "lontar usadha" yang merupakan warisan leluhur yang telah dimanfaatkan secara turun temurun, untuk itu kepada produsen Obat tradisional pemberian informasi dan edukasi perlu terus ditingkatkan agar mengedepankan tanggung jawab moral yaitu melakukan kegiatan produksi dengan mengikuti Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dan tanggung jawab

hukum yaitu dengan melengkapi perijinan yang diperlukan dalam memproduksi sehingga mempunyai daya saing dalam menyambut MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN).

### A.1.3. Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat

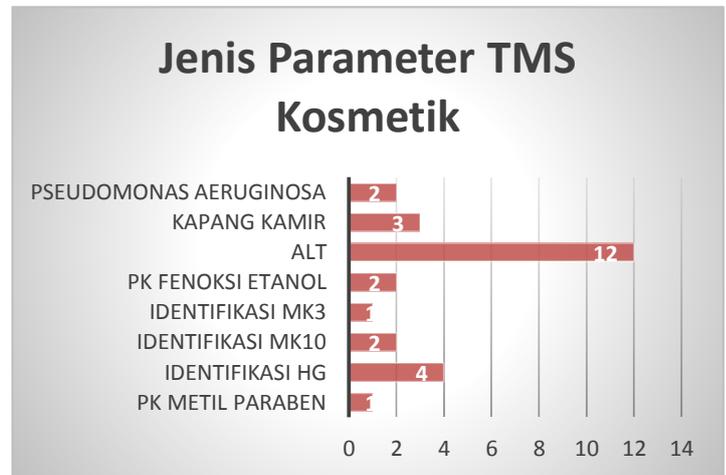
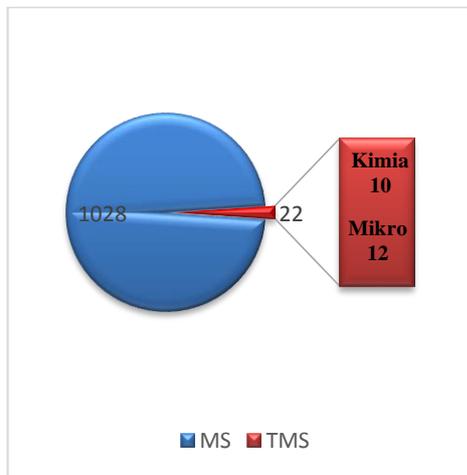


Diagram 3.6 Persentase Kosmetik yang Memenuhi Syarat

Keterangan :

Terdapat 1 sampel mikro dengan 2 parameter TMS dan 2 sampel dengan 3 parameter TMS.

Hasil Pengukuran terhadap indikator Kinerja persentase kosmetik yang memenuhi syarat terlihat bahwa capaian indikator kinerja yaitu sebesar 108,78% dengan kriteria **memuaskan**. Realisasi kinerja Indikator tersebut berdasarkan dengan hasil pengujian sampling kosmetik dengan ijin Edar Badan POM yang dilakukan diseluruh Provinsi Bali dengan hasil memenuhi syarat sebanyak 1028 sampel (97,90%) dari 1050 sampel. Jumlah sampel kosmetik yang tidak memenuhi syarat kimia sebanyak 10 sampel dengan parameter uji pengawet, pewarna Merah K3, pewarna Merah K10 dan Hg. Sedangkan tidak memenuhi syarat mikrobiologi sebanyak 12 sampel dengan parameter uji ALT, Kapang - Khamir dan *Pseudomonas aeruginosa*. Pengawasan ke sarana produksi dan distribusi Kosmetik yang telah dilakukan, dari 31 sarana produksi dan 717 sarana distribusi yang ada, tahun 2016 diawasi sebanyak 28 (90,32%) sarana produksi dan 112(15,62%) sarana distribusi. Persentase hasil pengujian kosmetik yang memenuhi syarat tahun 2015 sebesar 95,33% jika dibandingkan dengan tahun 2016 terlihat kosmetik yang memenuhi syarat meningkat.

Persentase hasil pengujian kosmetik yang memenuhi syarat tahun 2015 sebesar 95,33%, jika dibandingkan dengan tahun 2016 terlihat kosmetik yang memenuhi syarat meningkat.

Perbandingan capaian dengan target akhir RPJM tahun 2019 menunjukkan bahwa realisasi tahun 2016 sudah melampaui target tahun 2019. Namun, dengan adanya perbedaan prioritas sampling setiap tahun, dan perbedaan trend konsumsi masyarakat setiap tahun maka kemungkinan akan ada fluktuasi capaian di setiap tahun hingga tahun 2019.

Dibandingkan dengan BBPOM di Yogyakarta, dimana kondisi dan wilayahnya hampir sama dengan BBPOM di Denpasar dapat dilihat persentase Kosmetik memenuhi syarat yang beredar di Provinsi Bali dan di Daerah Istimewa Yogyakarta juga hampir sama, Realisasi persentase Obat yang memenuhi syarat dari BBPOM di Yogyakarta 97.72%

Dengan realisasi kinerja persentase kosmetik yang memenuhi syarat sebanyak 97,90% menunjukkan bahwa kosmetik yang beredar di Provinsi Bali cukup aman dan pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Provinsi Bali terhadap peredaran kosmetik efektif sehingga dapat melindungi masyarakat dari peredaran kosmetik yang membahayakan kesehatan. Hal ini berarti bahwa sasaran strategi Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan dibidang kosmetika telah dapat tercapai sehingga bisa meningkatkan kesehatan masyarakat. Kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai target kinerja tersebut adalah pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi kosmetika, KIE terhadap masyarakat berupa penyebaran informasi tentang kosmetik yang tidak memenuhi syarat dan mengandung bahan berbahaya serta sosialisasi produk kosmetik yang merupakan *public warning*.

Dengan masih ditemukannya kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan tidak mempunyai ijin edar maka fokus kegiatan yang dilakukan oleh BBPOM di Denpasar pada tahun 2016 adalah meningkatkan bimbingan / penyuluhan CPKB kepada produsen kosmetik terutama UMKM Kosmetik, untuk bisa mandiri dalam menjamin mutu dan keamanan produknya sehingga mampu mempunyai daya saing dipasar lokal maupun global dan meningkatkan pembinaan kepada sarana distribusi kosmetik untuk tidak menjual produk kosmetik yang tidak memenuhi syarat ataupun tidak memiliki ijin edar, serta melakukan KIE kepada masyarakat untuk tidak menggunakan kosmetik seperti tersebut diatas. KIE dilakukan melalui melalui penyebaran informasi kepada masyarakat serta meningkatkan

koordinasi dengan *stakeholder* sehingga sistem pengawasan obat dan makanan di bidang kosmetik berbasis risiko lebih ditingkatkan.

#### A.1.4. Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat

Jumlah sampel Suplemen Kesehatan

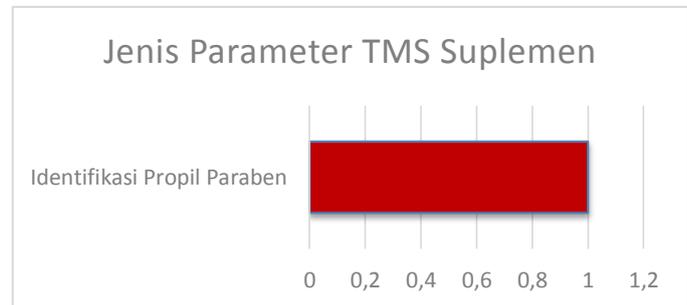
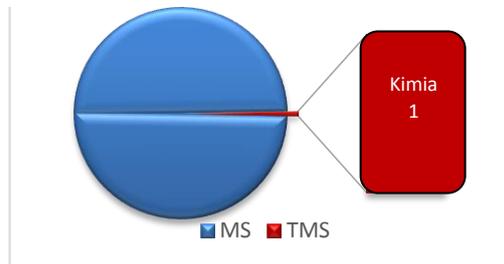


Diagram 3.7 Persentase Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat

Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat terlihat bahwa capaian indikator kinerja yaitu sebesar 124,29% dengan kriteria **memuaskan**. Realisasi kinerja indikator tersebut berdasarkan dengan hasil pengujian sampel yang disampling diseluruh Provinsi Bali dari 175 sampel, sebanyak 174 sampel memenuhi syarat (99,43%) dan 1 sampel tidak memenuhi syarat kimia pada parameter uji pengawet (propil paraben).

Persentase hasil pengujian suplemen kesehatan yang memenuhi syarat tahun 2015 sebesar 100,00 %. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 terlihat suplemen kesehatan yang memenuhi syarat mengalami penurunan. Perbandingan capaian dengan target RPJM tahun 2019 menunjukkan bahwa realisasi tahun 2016 sudah melampaui target tahun 2019. Namun dengan adanya perbedaan prioritas sampling dan peningkatan kemampuan uji setiap tahun, dan perbedaan trend konsumsi masyarakat setiap tahun maka kemungkinan akan ada fluktuasi capaian di setiap tahun hingga tahun 2019.

Dibandingkan dengan BBPOM di Yogyakarta , dimana kondisi dan wilayahnya hampir sama dengan BBPOM di Denpasar dapat dilihat persentase Suplemen Kesehatan memenuhi syarat yang beredar di Provinsi Bali Lebih besar hampir 2 % dibandingkan dengan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Realisasi persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat dari BBPOM di Yogyakarta 97.89%.

Dengan realisasi persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat sebanyak 99,43% menunjukkan bahwa suplemen kesehatan yang beredar di Provinsi Bali aman, sistem pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Provinsi Bali terhadap peredaran suplemen

kesehatan efektif melindungi masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Dengan capaian kinerja tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa sasaran strategi Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan telah tercapai. Kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai target kinerja tersebut adalah pengawasan terhadap sarana distribusi suplemen kesehatan, KIE terhadap masyarakat berupa penyebaran informasi tentang suplemen kesehatan yang tidak memenuhi syarat dan mengandung bahan berbahaya serta sosialisasi produk suplemen kesehatan yang merupakan *public warning* dan tidak memiliki ijin edar untuk membuat masyarakat cerdas memilih dan mengkonsumsi suplemen kesehatan. Hal yang perlu dilakukan adalah meningkatkan KIE kepada masyarakat, meningkatkan kompetensi petugas dalam hal pengawasan/pengujian.

#### A.1.5. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

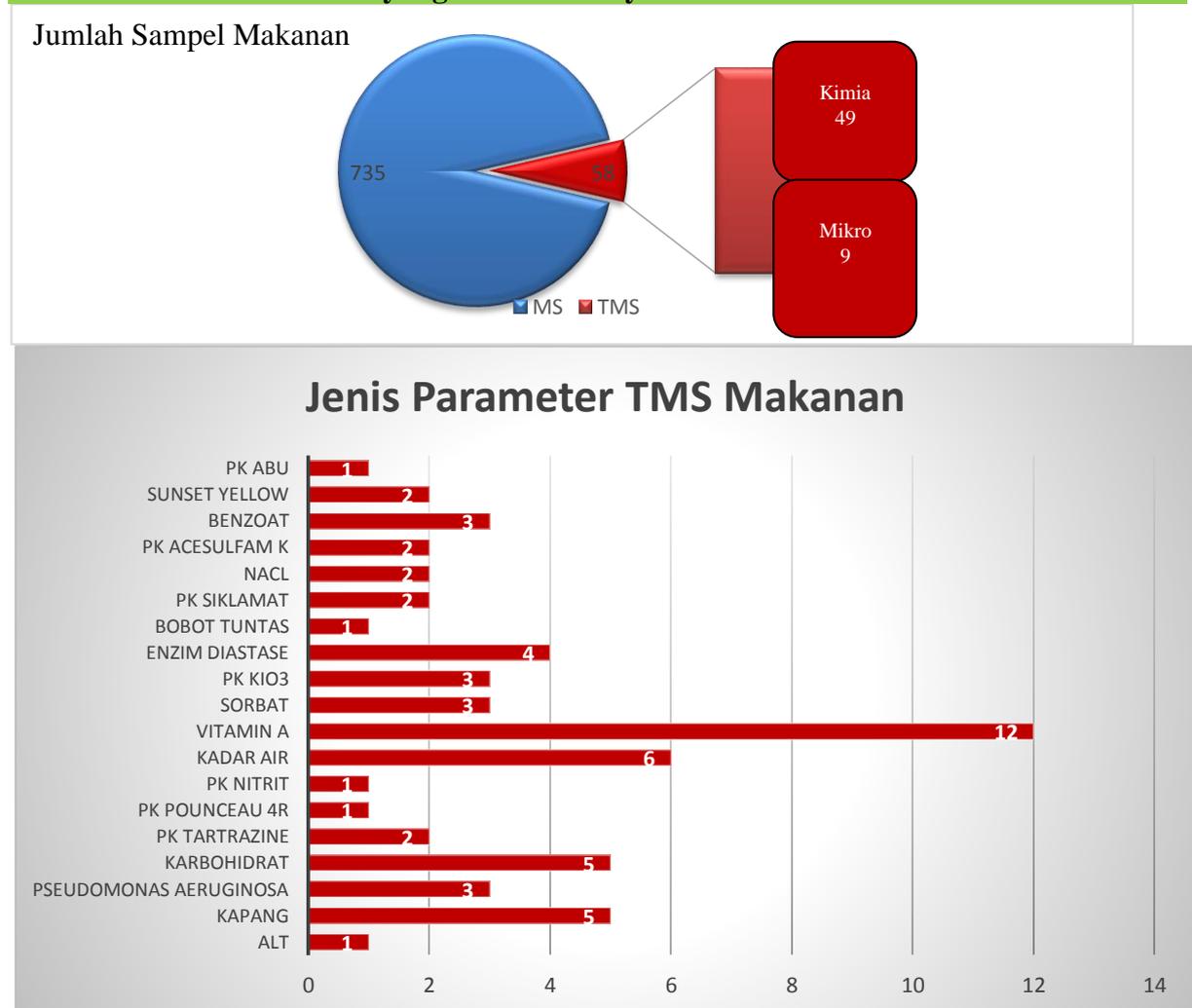


Diagram 3.8 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Keterangan :

Terdapat 1 Sampel Kimia dengan 2 Parameter TMS.

BBPOM di Denpasar telah melakukan pengujian sampel pangan secara keseluruhan 2838 sampel dengan jumlah sampel DIPA sebanyak 1050 sampel (termasuk kemasan pangan), 1516 sampel laboratorium Keliling dan sebanyak 272 sampel merupakan sampel Non DIPA termasuk didalamnya sampel uji profisiensi, ULPK-Kasus, pihak ketiga (PNBP) maupun uji Kolaborasi. Dari 1050 sampel DIPA, 793 sampel dengan ijin edar Badan POM dan 257 sampel dengan ijin edar PIRT maupun pangan dengan masa daluwarsa kurang dari 7 hari.

Perhitungan realisasi indikator presentase makanan yang memenuhi syarat berdasarkan produk pangan dengan ijin edar yang dikeluarkan oleh Badan POM (MD/ML). Pengukuran realisasi terhadap target yang telah ditetapkan terhadap indikator persentase Makanan yang memenuhi syarat terlihat bahwa realisasi telah mencapai target yang ditetapkan, dan capaian indikator kinerjanya yaitu sebesar 104,62% dengan kriteria **memuaskan**. Realisasi kinerja indikator tersebut berdasarkan dengan hasil pengujian sampling Makanan (pangan) yang dilakukan di seluruh Provinsi Bali dengan hasil memenuhi syarat sebanyak 735 sampel (92,69%) dari 793 sampel (sampel dengan nomor ijin edar MD maupun ML).

Persentase hasil pengujian Makanan yang memenuhi syarat tahun 2015 sebesar 91,78%. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 terlihat pangan yang memenuhi syarat meningkat. Perbandingan capaian dengan target akhir RPJM tahun 2019 menunjukkan bahwa realisasi tahun 2016 sudah melampaui target tahun 2019. Namun dengan adanya perbedaan produk yang disampling setiap tahun, serta perbedaan *trend* konsumsi masyarakat setiap tahun maka kemungkinan akan ada fluktuasi capaian di setiap tahun hingga tahun 2019.

Dibandingkan dengan BBPOM di Yogyakarta, dimana kondisi dan wilayahnya hampir sama dengan BBPOM di Denpasar dapat dilihat persentase Makanan memenuhi syarat yang beredar di Provinsi Bali Lebih besar 2.68 % dibandingkan dengan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Realisasi persentase Makanan yang memenuhi syarat dari BBPOM di Yogyakarta 90.01%.

Jenis sampel yang disampling selain produk dengan nomor ijin edar MD/ML yang dikeluarkan BPOM ada juga sampel dengan nomor ijin edar Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan sampel siap saji serta sampel yang kadaluwarsa dibawah 1 (satu) minggu sehingga tidak perlu ijin edar dengan

hasil uji memenuhi syarat sebanyak 206 sampel (80,16%) dari 257 sampel. Total sampel pangan yang disampling dan diuji sebanyak 1050 sampel dengan jumlah yang memenuhi syarat sebanyak 959 sampel (91,33%). Dari data tersebut terlihat bahwa persentase makanan yang memenuhi syarat produk dengan ijin edar PIRT lebih rendah dibandingkan pada produk dengan ijin edar yang dikeluarkan oleh Badan POM (MD/ML).

Selain di laboratorium pengujian sampel dilakukan juga melalui mobil laboratorium keliling, terutama untuk produk jajanan anak sekolah dan jajanan pasar yang ada dipasar tradisional, di tempat keramaian seperti pantai, lapangan olah raga, ataupun penjual pangan pada saat bulan puasa, dengan hasil uji sampel yang memenuhi syarat sebanyak 1319 sampel (87,00 %) dari 1516 sampel. Dari data tersebut terlihat bahwa sampel dengan nomor ijin edar yang dikeluarkan BPOM persentase memenuhi syaratnya lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan pangan yang dilakukan Badan POM sudah baik. Produk PIRT dan tidak terdaftar sesuai dengan PP No 28 Tahun 2004 merupakan kewenangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dimana BBPOM di Denpasar hanya memiliki kewenangan dalam hal pengawasan dan menyampaikan hasil pengawasan pangan khususnya yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk ditindaklanjuti.

Dengan realisasi kinerja persentase Makanan yang memenuhi syarat sebanyak 92,69% menunjukkan bahwa pangan yang beredar di Provinsi Bali cukup aman dan sistem pengawasan yang dilakukan oleh BBPOM di Denpasar terhadap peredaran pangan efektif sehingga dapat melindungi masyarakat dari peredaran pangan yang membahayakan kesehatan serta dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Hal ini berarti bahwa sasaran strategi Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan telah dapat tercapai. Kegiatan yang telah dilakukan untuk mencapai target kinerja tersebut adalah pengawasan terhadap sarana produksi dan distribusi pangan, KIE terhadap masyarakat berupa penyebaran informasi tentang pangan yang tidak memenuhi syarat dan mengandung bahan berbahaya serta sosialisasi produk pangan yang merupakan *public warning* dan tidak memiliki ijin edar, termasuk melalui program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) dengan membentuk kader keamanan pangan untuk membuat masyarakat cerdas memilih dan mengkonsumsi pangan yang sehat sehingga kesehatan masyarakat dapat ditingkatkan. KIE juga dilakukan kepada pelaku usaha agar mampu mandiri dalam hal memberikan jaminan keamanan dan mutu produknya serta meningkat daya saing. Dengan capaian kinerja tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa sasaran peningkatan sistem pengawasan obat dan makanan dinilai sudah

efektif melindungi masyarakat di Provinsi Bali sehingga kesehatan masyarakat dapat ditingkatkan.

Fokus kegiatan yang akan dilakukan oleh BBPOM di Denpasar pada tahun 2016 adalah meningkatkan pengawasan, bimbingan / penyuluhan kepada produsen dan sarana distribusi Makanan (Pangan) dan KIE kepada masyarakat agar cerdas dalam memilih Makanan (pangan). Kegiatan KIE dilakukan dengan penyebaran informasi melalui kegiatan talkshow, media cetak, media elektronik serta meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* terkait. KIE juga dilakukan kepada pelaku usaha agar mampu mandiri dalam hal memberikan jaminan keamanan dan mutu produknya serta meningkatkan daya saing.

Dari pencapaian 5 Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1, kemudian dihitung nilai pencapaian sasaran (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikator-indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$\begin{aligned} \text{NPS1} &= \frac{(2 \times 106,88\%) + (2 \times 97,83\%) + (2 \times 108,78\%) + (2 \times 124,29\%) + (2 \times 104,62\%)}{10} \\ &= \mathbf{108,48\%} \end{aligned}$$

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis 1 yaitu Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan adalah (108,48 %) dengan kriteria memuaskan, dapat disimpulkan bahwa tahun 2016 Balai Besar POM di Denpasar telah berhasil memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan, sehingga Obat dan Makanan yang beredar di Provinsi Bali aman, bermutu dan bermanfaat dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dan meningkatkan daya saing produk lokal Provinsi Bali

Namun demikian, Balai Besar POM di Denpasar harus terus melakukan langkah terobosan dalam rangka pengawasan obat dan makanan sebagai upaya perlindungan bagi masyarakat dari obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan terutama terkait Obat Tradisional yang masih belum mencapai target.

Untuk mendukung Sasaran Strategis 1, dilakukan Program/Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan dengan Sasaran Kegiatan, Capaian Indikator dan Kinerja Sasaran Kegiatan tahun 2016 terhadap perbandingan capaian tahun 2015 dan akhir RPJM seperti pada tabel di bawah ini

Tabel 3.4 Capaian dan Perbandingan Indikator Sasaran Kegiatan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2016	Target akhir RPJM	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Capaian 2015	Capaian 2016	Capaian Akhir RPJM	Kriteria 2016
1.	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	3.500	17500	3.500	3.500	100.00	100.00	40.00	Baik
		Pemenuhan target sampling produk obat disektor publik (IFK)	100	100	100	82.86	100.00	82.86	82.86	Cukup
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	25	25	30	25	120.00	100.00	100.00	Baik
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	24	25	27	24.48	112.50	102.00	97.92	Memuaskan
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	10	49	9	10	100.00	100.00	38.78	Baik

Perbandingan **capaian** indikator Sasaran Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis 1 tahun 2016 dengan tahun 2015 dan target jangka menengah (RPJM) dapat dilihat pada diagram di bawah ini :

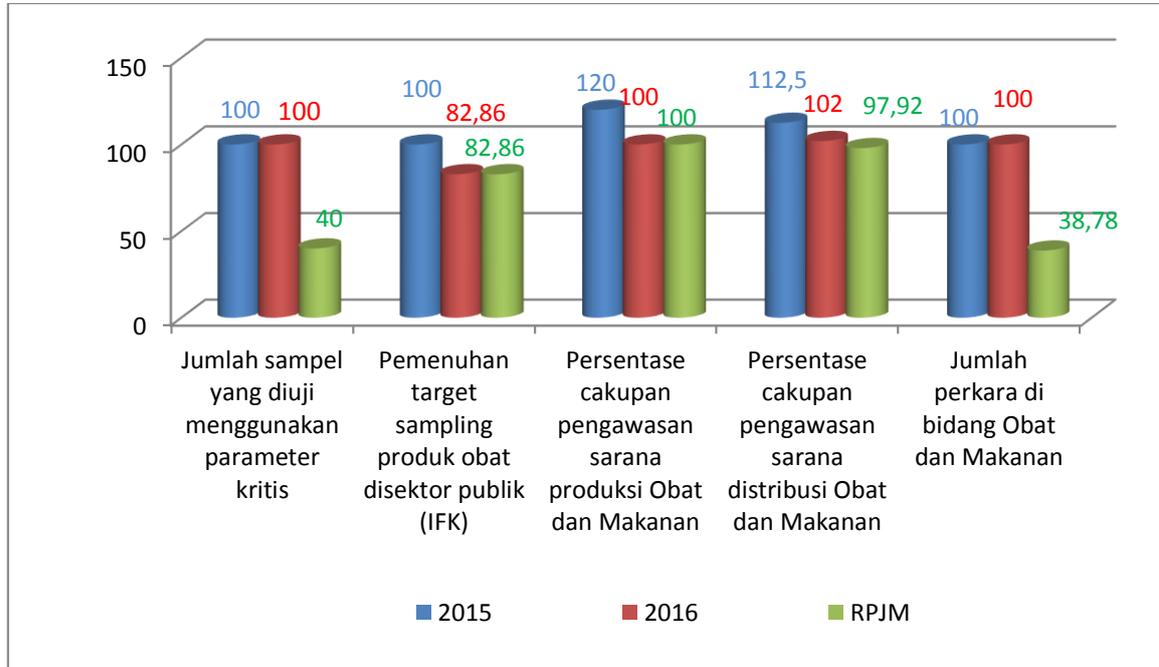


Diagram 3.9 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Kegiatan

**Masing-masing Indikator Sasaran Kegiatan dan Analisa Capaian Akuntabilitas** dijelaskan sebagai berikut:

**1. Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar**

Untuk sasaran pertama ini, terdapat 2 indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat capaiannya yaitu:

- a) Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis dengan target 3.500 sampel.
- b) Pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK) dengan target 100,00%.

Hasil pencapaian realisasi indikator kinerja terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2016 yaitu sebagai berikut :

#### **A.1.6. Indikator jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis**

Sampel yang disampling di sarana, di lakukan pemeriksaan secara laboratorium menggunakan metoda yang termutahir sesuai dengan parameter kritis pada pedoman prioritas sampling. Pedoman prioritas sampling merupakan pedoman bagi Balai untuk melakukan sampling termasuk jenis sampel yang disampling dan parameter kritis yang harus diuji. Parameter kritis adalah parameter uji yang bersifat sebagai penentu terhadap jaminan keamanan, manfaat, dan mutu produk yang diuji.

Realisasi terhadap indikator jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis adalah 3500 sampel dengan capaian indikator kinerja sebesar 100,00% dengan kriteria **baik**. Jumlah sampel yang disampling dan diuji pada tahun 2016 sama dengan tahun 2015, perbedaannya hanya pada parameter uji dimana pada tahun 2016 lebih menekankan pada parameter kritis. Sampai dengan akhir RPJM jumlah sampel yang disampling tiap tahun sama sebanyak 3500 dengan parameter uji kritis sesuai prioritas sampling yang ditetapkan tiap tahun. Target jumlah sampel sampai akhir RPJM adalah 17500, capaian tahun 2016 dibandingkan dengan target akhir RPJM adalah 40.0 %. Kemampuan uji parameter kritis didukung oleh verifikasi metode, kompetensi SDM dan peralatan yang dimiliki. Tercapainya indikator tersebut berarti bahwa sasaran meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar tercapai sehingga jaminan keamanan produk Obat dan Makanan meningkat dan masyarakat di wilayah Provinsi Bali terlindungi dari Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan. Untuk lebih mewakili produk yang beredar, variasi sampel yang disampling lebih diperluas dengan mempertimbangkan Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan masyarakat dan untuk meningkatkan kemampuan terhadap uji parameter kritis dilakukan pelatihan secara berkelanjutan sehingga jaminan produk Obat dan Makanan aman dapat ditingkatkan.

### A.1.7. Pemenuhan target sampling produk obat disektor publik

Jumlah IFK (Instalasi Farmasi Kabupaten) yang ada di Provinsi Bali sebanyak 9 terdiri dari 8 IFK di Kabupaten dan 1 IFK di Kota Denpasar. Target sampling dibagi merata ke setiap kabupaten kecuali di Kota Denpasar target samplingnya lebih banyak. Hal ini dikarenakan di Kota Denpasar terdapat gudang alokon dan Gudang Buffer Obat Dinas Kesehatan Provinsi Bali.



Gambar 3.3. Pengawasan Obat di Sektor Publik

Pemenuhan target sampling produk obat disektor publik dihitung berdasarkan jumlah sampel yang diambil pada IFK (Instalasi Farmasi Kabupaten) dibandingkan dengan target sampel yang harus disampling di IFK. Jumlah sampel yang disampling sebanyak 174 sampel dari 210 sampel yang ditargetkan untuk disampling di 9 sarana IFK. Realisasi terhadap indikator pemenuhan target sampling produk obat disektor publik (IFK) adalah 82,86% dengan capaian sebesar 82,86% dan kriteria **cukup**. Jumlah sampel yang disampling pada tahun 2016 berbeda dari tahun sebelumnya, hal ini mengacu kepada pedoman prioritas sampling yang menyebutkan bahwa sampling produk terapeutic di sektor publik minimal 30% dari total sampel produk terapeutic.

Realisasi capaian target sampling produk obat disektor publik tahun 2016 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 100%. Hal ini dikarenakan jenis obat yang ada di IFK terbatas tidak sesuai dengan variasi yang ada di pedoman sampling dan sering ditemukan nomor bets yang sama sehingga tidak disampling lagi. Selain itu, sampel di IFK baru tersedia pada akhir tahun, sedangkan jika dilakukan sampling pada awal tahun tidak selalu diijinkan karena dikhawatirkan mengganggu pelayanan obat di puskesmas.

Sampling obat publik dilakukan terhadap semua kategori sesuai dengan pedoman sampling. Waktu sampling juga menyebar sepanjang tahun dan sebelum dilakukan sampling telah disusun perencanaan internal balai. Sebelum dilakukan sampling ke sarana terlebih dahulu dilakukan koordinasi dengan sarana masalah ketersediaan jenis dan jumlah sampel.

Upaya yang akan dilakukan adalah lebih meningkatkan variasi jenis sampel yang disampling di sarana IFK. Selain itu untuk memperluas cakupan sampling perlu dilakukan sampling di sarana pelayanan seperti Rumah Sakit, Klinik dan Puskesmas lebih banyak dari tahun sebelumnya. Untuk meningkatkan kualitas hasil uji juga dilakukan peningkatan kompetensi personel penguji.

Dari 174 sampel yang diuji terdapat 2 (1,15% ) sampel tidak memenuhi syarat. Hasil pengujian sampel yang Tidak Memenuhi Syarat disampaikan ke Badan POM dan selanjutnya badan POM akan menyampaikan ke IFK/sarana publik tempat dilakukan pengambilan sampel tersebut.

Dibandingkan dengan BBPOM di Yogyakarta , dimana kondisi dan wilayahnya hampir sama dengan BBPOM di Denpasar dapat dilihat Pemenuhan target sampling Produk Obat di sektor publik ( Instalasi Farmasi Kabupaten) BBPOM di Denpasar lebih kecil dari di BBPOM Yogyakarta, Pemenuhan target sampling Produk Obat di sektor publik di BBPOM Yogyakarta 113.16%

## 2. Meningkatnya Kualitas Sarana Produksi yang Memenuhi Standar

Untuk sasaran kegiatan kedua ini, terdapat 1 indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat capaiannya yaitu:

### A.1.8. Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan

Pengukuran realisasi target dan indikator yang telah ditetapkan terhadap persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan yaitu terlihat bahwa capaian indikator kinerja sebesar 100% dengan kriteria **baik**. Pemeriksaan sarana produksi meliputi pemeriksaan sarana produksi Kosmetik, Obat Tradisional, dan Pangan pada tahun 2016 telah diperiksa



sejumlah 204 sarana dari 447 jumlah sarana yang ada di Provinsi Bali. Hasil Pemeriksaan menunjukkan 33 sarana Memenuhi Ketentuan dan 171 sarana Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Jika dibandingkan terhadap target tahun 2019 persentase capaian 100%.

Gambar 3.4. Pengawasan Sarana Produksi Kosmetik

Dari 96 Surat Rekomendasi yang telah dikirimkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota hanya 7 (7,29%) yang ditindaklanjuti. Dilihat dari jumlah angka ini relatif kecil sehingga perlu ditingkatkan koordinasi dan advokasi kepada *stakeholder* sehingga misi melindungi kesehatan masyarakat dari peredaran produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan dapat terus ditingkatkan. Strategi meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan secara internal adalah pembinaan terkait cara produksi pangan yang baik (CPPB), cara produksi kosmetika yang baik (CPKB) dan cara produksi obat tradisional yang baik (CPOTB), maupun pengawasan ataupun penindakan sarana produksi yang tidak memenuhi ketentuan.

Dalam menyusun perencanaan pengawasan dilakukan penetapan prioritas terhadap sarana-sarana yang harus diperiksa berdasarkan kajian resiko dan jumlah sarana di masing-masing kabupaten,. Sarana produksi Obat dan Makanan tersebar di kabupaten/kota, jumlah terbesar ada di Kota Denpasar.

Pemeriksaan diarahkan kepada sarana yang terdapat temuan pada pemeriksaan tahun sebelumnya dan sarana yang belum pernah dilakukan pemeriksaan serta sarana baru. Dengan cara ini diharapkan pengawasan dapat merata dan misi mendorong kemandirian pelaku usaha dalam menjamin keamanan produk yang dihasilkan dapat tercapai, sehingga Obat dan Makanan yang beredar di Provinsi Bali dapat meningkatkan kesehatan masyarakat.

Kualitas SDM terkait pengawasan sarana produksi obat dan makanan didukung dengan kompetensi personil yang telah mengikuti pelatihan berjenjang diantaranya pelatihan Food Inspektur, Pelatihan Inspektur Kosmetika dan Obat Tradisional.

Dengan tercapainya persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan sebanyak 100% diharapkan bahwa kualitas sarana produksi meningkat dan sasaran program menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Bali sudah efektif melindungi masyarakat. Untuk mempertahankan hal ini upaya yang akan dilakukan adalah melakukan pemeriksaan yang komprehensif dan memonitor CAPA sarana-sarana TMK tahun sebelumnya, melakukan koordinasi dengan bidang Serlik untuk melakukan pembinaan pada sarana tersebut serta meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan. Untuk produsen yang hasil pengujian sampelnya tidak memenuhi syarat akan dilakukan pengawasan dan pembinaan yang lebih intensif.

Dibandingkan dengan BBPOM di Yogyakarta, dimana kondisi dan wilayahnya hampir sama dengan BBPOM di Denpasar dapat dilihat Persentase cakupan pengawasan

sarana produksi Obat dan Makanan BBPOM di Denpasar lebih kecil dari di BBPOM Yogyakarta pemenuhan persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan Yogyakarta adalah sebesar 102.14 %.

### 3. Meningkatnya Kualitas Sarana Distribusi yang Memenuhi Standar

Untuk sasaran Kegiatan/program ketiga ini, terdapat 1 indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat capaiannya yaitu:

#### A.1.9. Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan

Sarana distribusi Obat dan Makanan tersebar di kabupaten/kota, jumlah terbesar ada di Kota Denpasar. Perencanaan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan berdasarkan kajian resiko dan jumlah sarana di masing-masing kabupaten.

Kualitas SDM terkait pengawasan sarana distribusi obat dan makanan didukung dengan kompetensi staf yang telah mengikuti pelatihan berjenjang diantaranya pelatihan Inspektur Cara Distribusi Obat yang Baik, pelatihan inspektur kosmetika, pelatihan inspektur obat tradisional dan pelatihan food inspektur.



Gambar 3.5 Pengawasan Sarana Distribusi Kosmetik

Pengukuran realisasi target dan indikator yang telah ditetapkan terhadap persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan yaitu terlihat bahwa capaian indikator kinerja sebesar 102,00% dengan kriteria **memuaskan**. Pemeriksaan sarana distribusi meliputi pemeriksaan sarana distribusi produk terapeutic, kosmetik, obat tradisional, suplemen kesehatan dan sarana distribusi/pelayanan narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan berbahaya serta sarana distribusi pangan. Tahun 2016 telah diperiksa sebanyak 864 (26,12%) sarana dari 3308 jumlah sarana yang ada di Provinsi Bali. Hasil Pemeriksaan menunjukkan 302 (34,95%) sarana Memenuhi Ketentuan (34,95%) dan 562 (65,05%) sarana Tidak Memenuhi Ketentuan. Jika dibandingkan terhadap target tahun 2019 persentase capaian 97,92%.

Dari 199 Surat Rekomendasi yang telah dikirimkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota hanya 66 (33,17%) yang ditindaklanjuti. Realisasi indikator tersebut dibandingkan dengan RPJM tahun 2019 sudah melebihi 100%. Dilihat dari jumlah angka ini relatif kecil namun misi melindungi kesehatan masyarakat dari peredaran produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan harus terus ditingkatkan dengan strategi meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan baik melalui pembinaan, pengawasan ataupun penindakan sarana distribusi yang tidak memenuhi ketentuan. Untuk itu telah dilakukan penetapan prioritas terhadap sarana-sarana yang harus diperiksa. Pemeriksaan diarahkan kepada sarana yang terdapat temuan pada pemeriksaan tahun sebelumnya dan sarana yang belum pernah dilakukan pemeriksaan serta sarana baru. Dengan cara ini diharapkan pengawasan dapat merata dan target pengawasan jangka panjang serta misi pembinaan dan pengawasan dapat tercapai sehingga Obat dan Makanan yang beredar di Provinsi Bali dapat terjaga keamanannya dan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Hal ini berarti bahwa sasaran kegiatan meningkatkan kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar telah dapat tercapai. Dengan tercapainya persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan sebanyak 102,00 % menunjukkan bahwa sasaran program menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Bali sudah efektif melindungi masyarakat.

Upaya yang akan dilakukan adalah meningkatkan pembinaan terhadap sarana distribusi melalui sosialisasi Cara distribusi Obat dan Makanan yang baik dan sosialisasi peraturan terbaru tentang Obat dan makanan. Sosialisasi ataupun penyebaran *public warning* sehingga tidak mendistribusikan produk yang termasuk *public warning*.

Dibandingkan dengan BBPOM di Yogyakarta, dimana kondisi dan wilayahnya hampir sama dengan BBPOM di Denpasar, Capaian indikator persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan di BBPOM di Denpasar lebih kecil dari BBPOM di Yogyakarta, Capaian indikator persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan BBPOM di Yogyakarta sebesar 103.97 %.

#### 4. Meningkatnya Hasil Tindak Lanjut Penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan

Untuk sasaran keempat ini, terdapat 1 indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat capaiannya yaitu:

##### A.1.10 Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan

Sesuai unsur-unsur manajemen, hasil kegiatan ditentukan oleh perencanaan yang disusun. Demikian juga halnya kegiatan penyidikan, perlu disusun perencanaan terkait jumlah target, sumber informasi, lokasi, tenaga yang terlibat dan unsur lain yang mendukung kegiatan penyidikan. Informasi yang bisa dijadikan bahan dalam menyusun rencana kegiatan laporan masyarakat/pengaduan, hasil pengawasan seksi pemeriksaan dan informasi dari sumber lain, sehingga dalam menyusun rencana ini sedapat mungkin melibatkan banyak pihak.



Gambar 3.6. Pemusnahan Produk TMS

Berdasarkan perencanaan tersebut kegiatan dimulai dengan melakukan investigasi awal, baik di Kota Denpasar maupun ke masing-masing kabupaten di Provinsi Bali. Setelah melakukan investigasi awal, maka dilakukan pemeriksaan/ penindakan antara lain :

- Operasi Pangea (operasi *cyber crime*)
- Operasi Opson (operasi terhadap produk pangan)
- Operasi di perbatasan (wilayah perbatasan Bali)
- Operasi Gabungan Nasional
- Penindakan/ Penyidikan

Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam kegiatan penyidikan memerlukan kompetensi khusus, yaitu PPNS. Dari 15 orang PPNS yang ada di Balai Besar POM di Denpasar, hanya 5 PPNS yang ada di Seksi Penyidikan dan kegiatannya melakukan pemberkasan. Dalam melakukan pemberkasan, PPNS melakukan koordinasi dan mendapat pembinaan dari Penyidik Umum yaitu Kepolisian Daerah Bali.

Keberhasilan dalam melakukan proses penyidikan sangat ditentukan oleh koordinasi yang dilakukan dengan *Criminal Justice System* yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Selain itu tentunya juga tidak terlepas dari peran instansi lain yang terkait dengan produksi dan distribusi produk Obat dan Makanan.

Pada tahun 2016 ditemukan 41 kasus dengan nilai barang bukti yang diamankan sebesar Rp 573.918.370,00 dengan rincian Pro-Justitia sebesar Rp. 156.388.000,00 dan Non-Justitia sebesar Rp. 417.530.370,00. Dari 41 kasus yang ditemukan, 10 kasus ditindaklanjuti dengan proses Pro-Justitia dan sisanya ditindaklanjuti secara administratif, dengan mempertimbangkan pola tindak lanjut yang ada. Dari 10 perkara yang diajukan terdiri dari 7 perkara di bidang Kosmetika dan 3 perkara di bidang Obat Tradisional. Lokasi perkara di luar kota Denpasar lebih banyak dari pada di Kota Denpasar, perkara di Kota Denpasar sebanyak 4 perkara dan di luar Kota Denpasar sebanyak 6 perkara. Untuk strategi penyelidikan tahun berikutnya akan lebih di tekankan untuk melakukan penyelidikan diluar kota Denpasar.

Capaian pengukuran realisasi kinerja indikator jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan sebesar 100,00% dengan kriteria **baik**. Realisasi indikator tersebut dibandingkan dengan akhir RPJM tahun 2019 sudah mencapai 38.78%. Hal ini berarti bahwa sasaran strategi meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran Obat dan Makanan telah dapat tercapai. Dengan tercapainya jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan 100,00%, menunjukkan bahwa sistem pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Bali semakin baik sehingga Obat dan Makanan aman, bermutu dan bermanfaat untuk melindungi masyarakat.

Dibandingkan dengan BBPOM di Yogyakarta, dimana kondisi dan wilayahnya hampir sama dengan BBPOM di Denpasar Jumlah perkara di bidang obat dan makanan persentase capaian target baik BBPOM Denpasar dan BBPOM Yogyakarta adalah sama sebesar 100 %, tetapi jumlah perkara yang di tangani dan di terbitkan SPDP di BBPOM Denpasar adalah sebanyak 10 perkara sedangkan BBPOM Yogyakarta adalah sebanyak 9 Perkara.

## A.2. Pencapaian Sasaran Strategis 2 Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat

### 1. Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Masyarakat

Untuk Sasaran kedua ini, terdapat 2 indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat capaiannya yaitu:

- a) Tingkat kepuasan masyarakat dengan target 80,50%
- b) Jumlah kabupaten/kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan dengan target 4 kabupaten/ kota.

Hasil pengukuran capaian Tahun 2016 dan perbandingan indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 2 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.5 Capaian dan Perbandingan Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2016	Target Akhir RPJM	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Capaian 2015	Capaian 2016	Capaian Akhir RPJM	Kriteria 2016
1.	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	Tingkat Kepuasan Masyarakat	80.50%	82.00%	83.87%	89.48%	104.84%	111.16%	109.12%	Memuaskan
		Jumlah kabupaten/kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	4	7	3	5	100.00%	125.00%	71.43%	Memuaskan

Perbandingan **capaian** indikator Sasaran Strategis 2 tahun 2016 terhadap tahun 2015 dan target akhir RPJM dapat dilihat pada diagram dibawah ini :

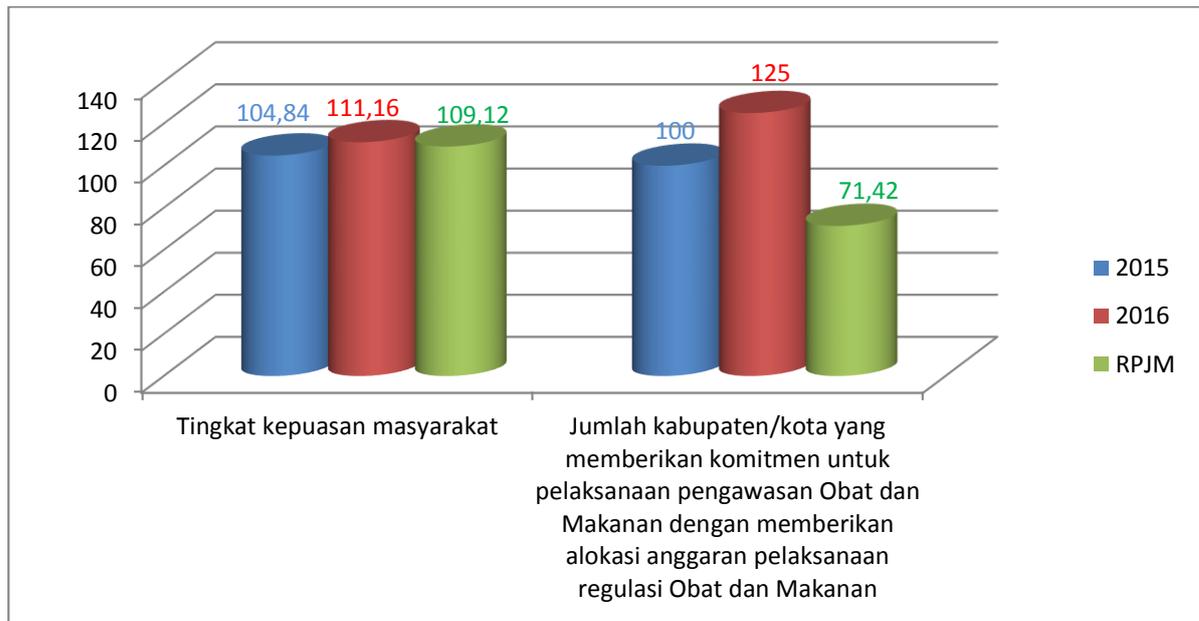


Diagram 3.9 Capaian dan Perbandingan Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

### A.2.1. Indikator Tingkat Kepuasan Masyarakat



Gambar 3.7 Antusiasme Media akibat Kepuasan Masyarakat terhadap BBPOM di Denpasar

Tabel 3.6 Nilai Persepsi, Interval IKM, Interl Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 - 1,75	25 - 43,75	D	Tidak Baik
2	1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	C	Kurang Baik
3	2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	Baik
4	3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	A	Sangat Baik

Tabel 3.7 Indeks Kepuasan Masyarakat BBPOM di Denpasar Tahun 2016

NO	UNSUR	NILAI UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA2 TERTIMBANG	NILAI KONVERSI IKM
1	Kemudahan prosedur pelayanan	3,553	0,254	88,825
2	Kesesuaian persyaratan pelayanan	3,459	0,247	86,475
3	Kejelasan petugas yang melayani	3,652	0,261	91,300
4	Kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan	3,615	0,258	90,375
5	Tanggungjawab petugas dalam memberi pelayanan	3,627	0,259	90,675
6	Kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan	3,643	0,260	91,075
7	Kecepatan pelayanan	3,590	0,256	89,750
8	Keadilan untuk mendapatkan pelayanan	3,594	0,257	89,850
9	Kesopanan dan keramahan petugas	3,639	0,260	90,975
10	Kewajaran biaya untuk mendapat pelayanan	3,529	0,252	88,225
11	Kepastian biaya pelayanan	3,488	0,249	87,200
12	Kepastian pelaksanaan terhadap jadwal waktu pelayanan	3,512	0,251	87,800
13	Kenyamanan di lingkungan unit pelayanan	3,590	0,256	89,750
14	Keamanan pelayanan	3,631	0,259	90,775
<b>Nilai Total</b>			<b>3,579</b>	<b>89,504 (A)</b>

Realisasi Tingkat Kepuasan Masyarakat dari tahun sebelumnya masih bisa dipertahankan dengan nilai sangat baik (A), dihitung berdasarkan Keputusan MenPAN Nomor : KEP/25/M.PAN/2/2004 . Hal ini disebabkan karena fasilitas yang ada di ULPK BBPOM di Denpasar sudah memenuhi standar minimal layanan publik, menerapkan sistem manajemen mutu (QMS) sebagai pedoman dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat dan SDM yang mempunyai kompetensi yang baik walaupun jumlahnya yang belum mencukupi. Pelatihan-pelatihan terkait pelayanan publik tetap harus dilakukan untuk peningkatan kompetensi petugas dalam memberikan layanan yang prima kepada masyarakat.

Perhitungan indeks kepuasan masyarakat dilakukan dengan cara mengolah data kuisisioner yang diberikan masyarakat/konsumen yang memanfaatkan layanan informasi konsumen dan konsultasi sertifikasi dengan metoda pengukuran indeks kepuasan pelanggan sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi no. KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Institusi Pemerintah. Jumlah data yang digunakan untuk mengukur adalah 244 kuisisioner dilakukan selama tahun 2016. Dibandingkan dengan tahun 2015 jumlah

kuisisioner untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat adalah meningkat 3 kalinya. Untuk selanjutnya agar memperoleh data Tingkat Kepuasan Masyarakat yang lebih mewakili akan menggunakan data yang lebih luas, lebih variatif dan melibatkan jumlah masyarakat yang lebih banyak.

Pengukuran realisasi terhadap target yang telah ditetapkan terhadap indikator persentasetingkat kepuasan masyarakat, terlihat bahwa capaian indikator kinerja yaitu sebesar 111,16 % dengan kriteria **memuaskan**. Realisasi indikator tersebut telah melebihi target akhir RPJM (109,12%). Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik yang dilakukan BBPOM di Denpasar sudah memenuhi harapan masyarakat dan mendukung kemandirian pelaku usaha. Terpenuhinya target Tingkat Kepuasan Masyarakat menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dan kemandirian pelaku usaha meningkat sehingga Obat dan Makanan yang beredar di Provinsi Bali lebih dijamin keamanan, mutu dan manfaatnya dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Dengan peningkatan partisipasi masyarakat dan koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya akan meningkatkan daya saing produk lokal.

Dibandingkan dengan BBPOM di Yogyakarta, dimana kondisi dan wilayahnya hampir sama dengan BBPOM di Denpasar dapat dilihat Tingkat Kepuasan Masyarakat di Provinsi Bali Lebih besar sekitar 12 % dibandingkan dengan di Daerah Istimewa Yogyakarta, Realisasi Tingkat Kepuasan Masyarakat di BBPOM di Yogyakarta 77.31%.

#### **A.2.2. Indikator Jumlah Kabupaten/Kota yang Memberikan Komitmen untuk Pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan dengan Memberikan Alokasi Anggaran Pelaksanaan Regulasi Obat dan Makanan.**

Jumlah kabupaten yang memberikan alokasi anggaran untuk pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan sebanyak 5 kab/kota yaitu : Denpasar, Tabanan, Badung, Gianyar dan Jembrana dengan realisasi capaiannya sebesar 125 % . Capaian ini bisa diraih karena kerjasama dan koordinasi yang baik dengan lintas sektor dan adanya komunikasi terkait program yang bisa dipadukan. Anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota terbatas hanya melaksanakan pengawasan



Gambar 3.8. GKPD Kabupaten Buleleng

bersama dan mengundang BBPOM sebagai Narasumber. Diharapkan ke depan, komitmen Pemerintah daerah lebih ditingkatkan terutama dalam hal menindaklanjuti hasil pengawasan BBPOM di Denpasar

Pengukuran realisasi terhadap target yang telah ditetapkan terhadap indikator jumlah kabupaten/kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan terlihat bahwa realisasi telah mencapai target yang ditetapkan dan capaian indikator kinerjanya yaitu sebesar 125,00% dengan kriteria **memuaskan**. Realisasi kinerja indikator tersebut berdasarkan jumlah Kabupaten/Kota yang telah mengalokasikan anggaran untuk Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerjanya yaitu Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar, Tabanan, dan Jembrana.

Jika dibandingkan dengan tahun 2015, ada peningkatan Kabupaten / Kota yang mengalokasikan anggarannya untuk kegiatan pengawasan Obat dan Makanan yaitu dari 4 menjadi 5 kabupaten/kota. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJM (7 kabupaten/kota), capaiannya menjadi sebesar 71,43%. Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki komitmen untuk pelaksanaan Pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pada pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan menunjukkan bahwa kemitraan dengan pemangku kepentingan sudah berjalan baik, sehingga dapat berpartisipasi dan saling mendukung dalam pengawasan Obat dan Makanan terutama yang menjadi tugas dan fungsi masing – masing institusi sesuai PP 28 tahun 2004, yang berdampak Obat dan Makanan yang beredar di Provinsi Bali aman, bermutu serta bermanfaat dan dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Dengan komitmen tersebut diatas diharapkan pula dapat meningkatkan kemandirian pelaku usaha terutama pelaku usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dibidang Pangan, Obat Tradisional dan Kosmetika yang merupakan usaha mayoritas di Provinsi Bali sehingga mampu menghasilkan produk Obat dan Makanan yang memenuhi standar dan mempunyai daya saing.

Dari pencapaian 2 indikator pada sasaran strategis ini, maka dapat dihitung nilai pencapaian sarannya (NPS) sebagai rata-rata dari nilai pencapaian indikator-indikatornya (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

$$\begin{aligned}
 \text{NPS2} &= \frac{(2 \times 111,16\%) + (1 \times 125,00\%)}{3} \\
 &= \mathbf{115,77\%}
 \end{aligned}$$

Dari perhitungan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tahun 2016 Balai Besar POM di Denpasar telah berhasil meningkatkan kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan telah tercapainya target dari semua indikator pada sasaran strategis "Meningkatkan kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat". Namun demikian, Balai Besar POM di Denpasar harus terus melakukan langkah terobosan dalam rangka pembinaan terhadap pelaku usaha, membangun kemitraan dengan *stakeholder* dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Untuk mendukung Sasaran Strategis 2, Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Masyarakat dilakukan Program/Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan dengan Sasaran Kegiatan :

**1. Meningkatnya Kerjasama, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi**

terdapat 2 indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat capaiannya yaitu:

- a) Jumlah layanan publik BBPOM di Denpasar
- b) Jumlah komunitas yang diberdayakan

Realisasi dan capaian indikator kinerja kegiatan yang mendukung sasaran strategis 2 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.8 Capaian dan Perbandingan Indikator Sasaran Kegiatan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2016	Target Akhir RPJM	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Capaian 2015	Capaian 2016	Capaian Akhir RPJM	Kriteria 2016
1.	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	Jumlah layanan publik BBPOM di Denpasar	1150	5945	1546	1412	135.02	122.78	49.79	Memuaskan
		Jumlah Komunitas yang diberdayakan	20	29	17	20	100.00	100.00	68.97	Baik

Perbandingan **capaian** indikator Sasaran Kegiatan Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi tahun 2016 dengan tahun 2015 dan target Akhir RPJM dapat dilihat pada diagram di bawah ini :

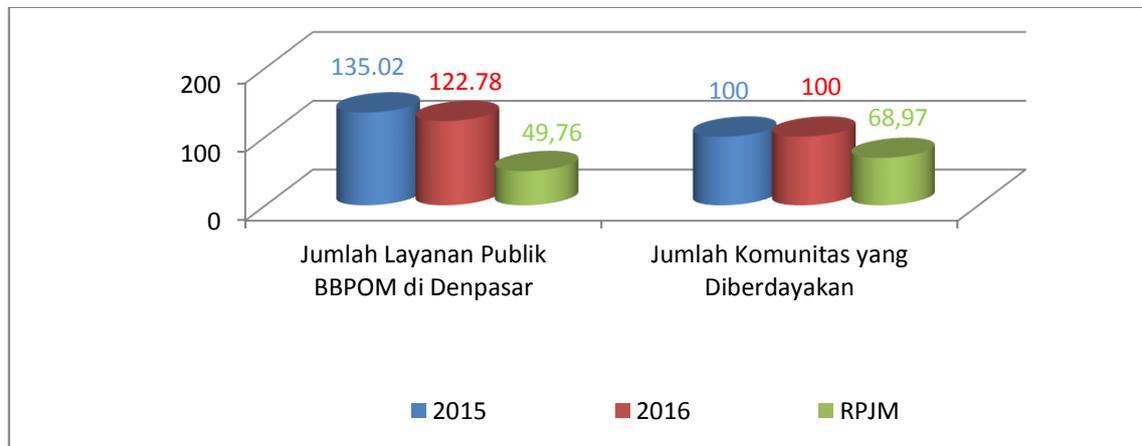


Diagram 3.10 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Kegiatan 2

**Masing-masing Indikator Sasaran Kegiatan dan Analisa Capaian Akuntabilitas dijelaskan sebagai berikut:**

### A.2.3. Indikator Jumlah Layanan Publik BBPOM di Denpasar

Jumlah Layanan Publik dihitung berdasarkan jumlah layanan di Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK), Surat Keterangan Impor/Surat Keterangan Ekspor (SKI/SKE), Audit registrasi, Pameran, Penyebaran Informasi, Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE), Mobil Laboratorium Keliling (Mobling) dan Uji sampel pihak ketiga ( lampiran 5.7).



Gambar 3.9. Penyebaran informasi melalui media elektronik

Pengukuran realisasi terhadap target yang telah ditetapkan terhadap indikator Jumlah Layanan Publik Balai Besar POM di Denpasar terlihat bahwa capaian indikator kinerja yaitu sebesar 122,78% dengan kriteria **memuaskan**. Hal ini disebabkan karena beberapa kegiatan layanan seperti ULPK, penerbitan SKI/SKE, audit sarana dalam rangka registrasi dan permintaan uji sampel pihak ketiga bersifat pasif yang bisa meningkat atau menurun sesuai dengan permintaan masyarakat dan di tahun 2016 terjadi peningkatan yang melampaui target.

Realisasi indikator tersebut dibandingkan dengan target dengan jumlah layanan publik 5945 di akhir RPJM tahun 2019 sudah mencapai 49.76%. Capaian ini menunjukkan bahwa kepercayaan dan harapan masyarakat terhadap BPOM sudah semakin meningkat terutama peningkatan layanan KIE melalui media sosial, media cetak/elektronik, penyebaran leaflet/brosur, mobil laboratorium keliling serta penyebaran informasi produk Obat dan Makanan. Sasaran kegiatan meningkatnya kerja sama, komunikasi, Informasi dan Edukasi serta Sasaran Strategis Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat tercapai sehingga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat.

Dibandingkan dengan BBPOM di Yogyakarta, dimana kondisi dan wilayahnya hampir sama dengan BBPOM di Denpasar, jumlah layanan publik di BBPOM Denpasar lebih kecil yaitu 1412 layanan dengan persentase capaian 122.78 % sedangkan di BBPOM Yogyakarta yaitu sebesar 1629 layanan dengan persentase capaian 146.10 %.

#### A.2.4. Indikator Jumlah Komunitas yang Diberdayakan

Jumlah komunitas yang diberdayakan mencapai 100% dari target meliputi pengawalan Pasar Aman di 4 sarana pasar yaitu Pasar Agung, Pasar Sindu, Pasar Intaran dan Pasar Umum Gianyar; GKPD 16 Desa yaitu 5 desa di Kota Denpasar, 5 desa di Kabupaten Gianyar, 3 desa di Kabupaten Klungkung dan 3 desa di Kabupaten Buleleng. Keberhasilan dari program ini adalah karena komitmen dari lintas sektor yang cukup baik.

Jumlah komunitas yang diberdayakan dihitung berdasarkan jumlah desa dan pasar yang diberikan intervensi keamanan pangan. Pengukuran realisasi terhadap target indikator jumlah komunitas yang diberdayakan di bidang Obat dan Makanan, terlihat bahwa capaian indikator kinerja yaitu sebesar 100,00% dengan kriteria **baik**. Realisasi indikator tersebut dibandingkan dengan target akhir RPJM tahun 2019 sudah mencapai 68,97%. Dengan realisasi jumlah komunitas yang diberdayakan 100,00% menunjukkan bahwa penyebaran informasi keamanan pangan yang dilakukan di pasar tradisional dan program GKPD berhasil membentuk Kader Keamanan Pangan yang berperan memberikan informasi kepada masyarakat sampai ke pelosok desa dan masyarakat menjadi lebih cerdas dalam memilih dan mengkonsumsi produk pangan yang aman, bermutu dan bermanfaat sehingga dapat meningkatkan kesehatan masyarakat. Hal ini berarti bahwa sasaran kegiatan meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi, dan edukasi dan sasaran strategis meningkatnya

kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat telah tercapai.

Dibandingkan dengan BBPOM di Yogyakarta, dimana kondisi dan wilayahnya hampir sama dengan BBPOM di Denpasar Target pemenuhan jumlah komunitas yang diberdayakan adalah 100 % BBPOM Denpasar sedangkan untuk BBPOM Yogyakarta adalah sebanyak 103.03 % dengan selisih sekitar 3.03 %.

### A.3. Pencapaian Sasaran Strategis 3 Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM

#### 3. Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM

Untuk sasaran ketiga ini, terdapat 1 indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat capaiannya yaitu: Nilai SAKIP BBPOM di Denpasar oleh Badan POM RI

Hasil pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran strategis ketiga terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.9 Capaian dan Perbandingan Indikator Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2016	Target Akhir RPJM	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Capaian 2015	Capaian 2016	Capaian Akhir RPJM	Kriteria 2016
1.	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP BBPOM di Denpasar oleh BPOM	A (80%-90%)	A (80%-90%)	B (67.99%)	B (72.21%)	84.99%	90.26%	90.26%	Cukup

Perbandingan **capaian** indikator Sasaran Strategis 3 tahun 2016 terhadap tahun 2015 dan target Akhir RPJM dapat dilihat pada diagram di bawah ini

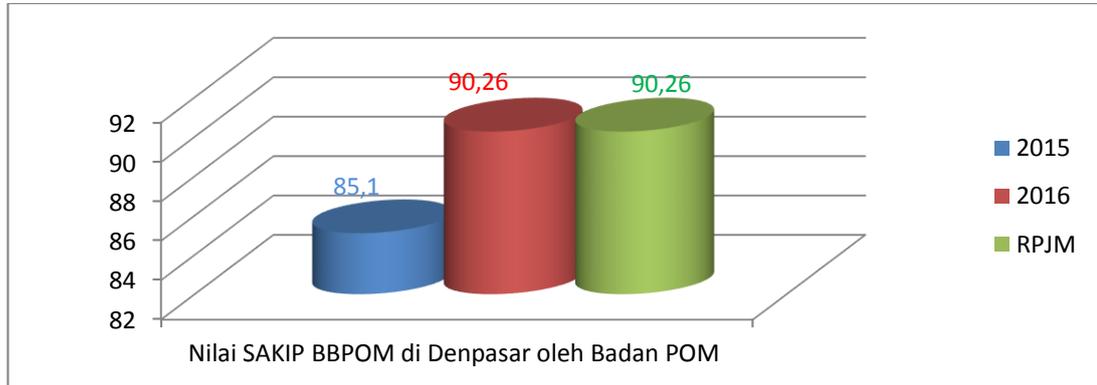


Diagram 3.11 Capaian dan Perbandingan Indikator Sasaran Strategis 3

### A.3.1. Indikator Nilai SAKIP BBPOM di Denpasar oleh BADAN POM

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dimaksudkan untuk mengukur akuntabilitas kinerja dan peningkatan kinerja dari instansi pemerintah, meliputi perencanaan strategis, pelaksanaan dan monitoring. Pengukuran capaian indikator Nilai SAKIP BBPOM di Denpasar oleh Badan POM RI yaitu nilai Laporan Kinerja dari Badan POM adalah 72,21% (**BB**) sedangkan targetnya adalah A (80-90) sehingga capaiannya 90,26% dengan kriteria **cukup**. Salah satu penyebab capaian indikator kinerja tersebut tidak tercapai karena pelaporan kinerja/SAKIP yang dibuat belum sesuai dengan kriteria yang tertuang dalam Permenpan RB No.53 Tahun 2014. Untuk selanjutnya pelaporan kinerja / SAKIP akan dibuat sesuai Permenpan tersebut dan juknis penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan POM.

Komitmen pimpinan dan seluruh pegawai merupakan hal yang sangat penting dalam penerapan Akuntabilitas Kinerja, perubahan pola pikir menuju birokrasi bersih melayani serta penerapan SPIP harus terus di internalisasi dan ditingkatkan implemntasinya agar indikator tersebut tercapai.

Sumber Daya Manusia untuk mendukung terimplentasinya SAKIP perlu terus ditingkatkan kompetensinya dan peningkatan jumlah SDM sesuai Analisa Beban Kerja

Reformasi Birokrasi (RB) dengan 8 area perubahan harus terus di internalisasi dan di implementasikan oleh seluruh jajaran Balai Besar POM di Denpasar demi mewujudkan birokrasi bersih melayani,

Dengan kategori capaian indikator nilai SAKIP BBPOM di Denpasar cukup maka kualitas kapasitas kelembagaan BBPOM di Denpasar perlu terus ditingkatkan antara lain dengan meningkatkan kualitas kinerja dan tetap mempertahankan sistem manajemen mutu sesuai ISO 9001 serta ISO/IEC17025 untuk penyelenggaraan sistem mutu laboratorium pengujian. Disamping itu budaya organisasi, implementasi SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) dan komitmen pelaksanaan Reformasi Birokrasi juga harus terus ditingkatkan implementasinya sehingga kualitas dan kapasitas kelembagaan BBPOM di Denpasar meningkat untuk menunjang peningkatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan.

Karena indikator sasaran strategis 3 hanya satu maka, Pencapaian Sasaran strategis 3 sama dengan capaian indikator Nilai SAKIP BBPOM di Denpasar oleh Badan POM.

NPS3 = 90,26%

Untuk mendukung Sasaran Strategis 3, dilakukan Program/Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan dengan 2 Sasaran Kegiatan antara lain :

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan dengan indikator Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar
2. Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu dengan indikator Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu

Realisasi dan capaian indikator kinerja kegiatan yang mendukung sasaran strategis 3 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.10 Capaian dan Perbandingan Indikator Sasaran Kegiatan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2016	Target Akhir RPJM	Realisasi 2015	Realisasi 2016	Capaian 2015	Capaian 2016	Capaian Akhir RPJM	Kriteria 2016
1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	73	88	76.04	77.07	108.63	105.58	87.58	Memuaskan
2.	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9	48	10	9	100.00	100.00	39.58	Baik

Perbandingan **capaian** indikator Sasaran Kegiatan yang mendukung sasaran strategis 3 tahun 2016 dengan tahun 2015 dan target Akhir jangka menengah (RPJM 2019) dapat dilihat pada diagram di bawah ini.

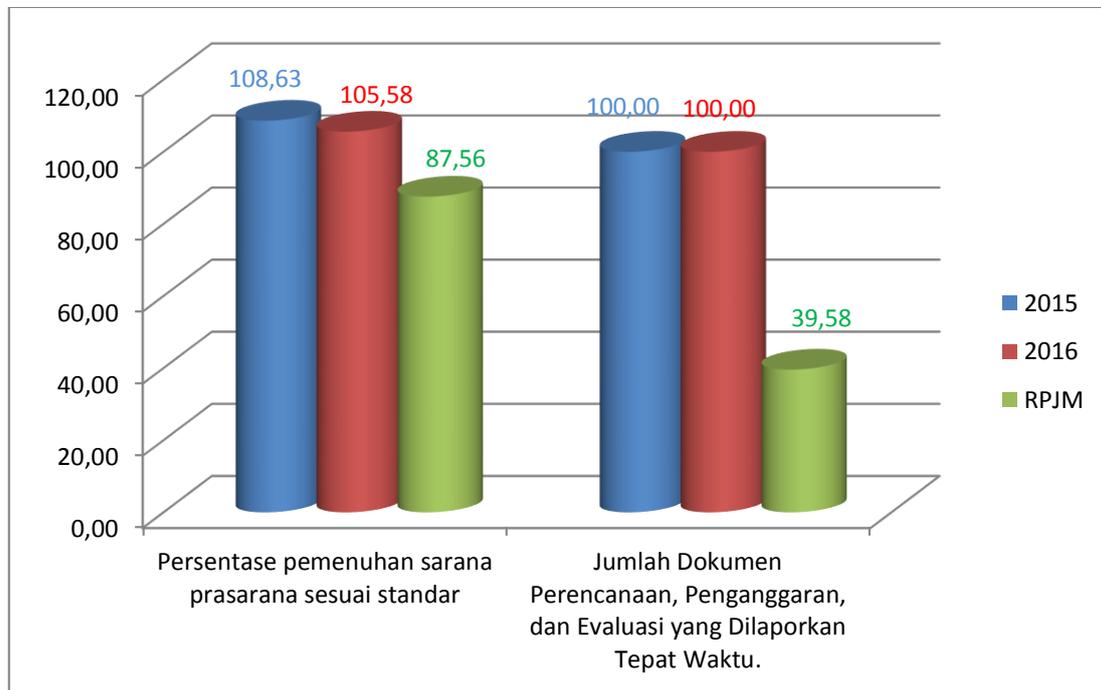


Diagram 3.12 Perbandingan Capaian Indikator Sasaran Kegiatan

**Masing-masing Indikator Sasaran Kegiatan dan Analisa Capaian Akuntabilitas dijelaskan sebagai berikut:**

### A.3.2. Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana Sesuai Standar

Pengukuran realisasi terhadap target yang telah ditetapkan pada indikator persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar yaitu terlihat bahwa capaian indikator kinerja sebesar 105,58% dengan kriteria **memuaskan**. Realisasi kinerja Indikator tersebut dihitung berdasarkan pemenuhan sarana dan prasarana *meubelair*, alat pengolah data dan alat laboratorium yang sesuai dengan laporan BMN dibandingkan dengan standar yang ditetapkan.

Dibandingkan dengan tahun 2015 terjadi peningkatan jumlah, jenis sarana dan prasarana yang dimiliki sedangkan terhadap target RPJM tahun 2019 capaian 2016 baru mencapai sebesar 87,60%.

Dengan lebih terpenuhinya sarana dan prasarana maka diharapkan kegiatan Pengawas Obat dan Makanan dapat lebih optimal sehingga mendukung peningkatan pencapaian kesehatan masyarakat.

Dibandingkan dengan BBPOM di Yogyakarta, dimana kondisi dan wilayahnya hampir sama dengan BBPOM di Denpasar, Persentase pemenuhan sarana dan prasarana sesuai standar di BBPOM Denpasar lebih kecil dibandingkan BBPOM Yogyakarta dengan selisih persentase sebesar 2%.

### A.3.3. Indikator Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang Dilaporkan Tepat Waktu

Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi yang Dilaporkan Tepat Waktu terlihat bahwa capaian indikator kinerja yaitu sebesar 100,00% dengan kriteria **baik**. Realisasi kinerja Indikator tersebut berdasarkan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dihasilkan meliputi dokumen berikut:

- Perjanjian Kinerja tahun 2016
- RKAKL/DIPA tahun 2017
- Laporan Kinerja tahun 2015,
- Laporan triwulanan I Tahun 2016
- Laporan triwulanan II Tahun 2016
- Laporan triwulanan III Tahun 2016
- LAPTAH tahun 2015,
- Laporan Keuangan tahun 2015,
- Laporan Keuangan Semester 1 tahun 2016,

Hal ini berarti bahwa sasaran strategis Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang Dilaporkan Tepat Waktu telah tercapai. Dengan tercapainya jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu 100,00% menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaporan yang dibuat untuk mendukung pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Provinsi Bali optimal. Kinerja indikator tersebut tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena setiap tahun jenis target/dokumen yang dihasilkan berbeda. Ketepatan waktu penyampaian laporan merupakan fokus yang tetap diterapkan untuk tahun berikutnya.

Dibandingkan dengan tahun 2015 ada perbedaan Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi yang Dilaporkan, karena pada tahun 2015 ada pembuatan dokumen Renstra , sedangkan tahun 2016 tidak ada. Target jumlah dokumen pada akhir RPJM tahun 2019 adalahh 48 dokumen sehingga capaian sampai dengan 2016 baru mencapai 39.58%.

Dibandingkan dengan BBPOM di Yogyakarta , dimana kondisi dan wilayahnya hampir sama dengan BBPOM di Denpasar untuk pemenuhan capaian target jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu BBPOM Denpasar sama dengan BBPOM Yogyakarta yaitu 100 %.

## B. REALISASI ANGGARAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Laporan Akuntabilitas Keuangan secara lengkap dan rinci dipertanggungjawabkan melalui Laporan Keuangan, berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) BBPOM di Denpasar tahun 2016.

Anggaran BBPOM di Denpasar pada tahun 2016 pada DIPA awal sebesar Rp. 32.618.542.000 kemudian mengalami pemotongan dari Badan POM untuk alokasi Tunjangan Kinerja sehingga Anggaran menjadi Rp 31.194.672.000. Setelah dilakukan self bloking dalam rangka penghematan yang disebabkan masalah keuangan pemerintah, anggaran BBPOM di Denpasar menjadi Rp 29.894.672.000 dengan realisasi Rp 29.236.125.357. Persentase realisasi anggaran sebelum self bloking adalah 93.72 % dan Realisasi anggaran setelah self bloking 97,80 %, Program dan kegiatan untuk mendukung sasaran strategis ditetapkan 15 program kegiatan dan 233 sub kegiatan, telah dilaksanakan 214 sub kegiatan dengan hasil 213 (99.53%) dilaksanakan dengan efisien dan 1(0,47%) sub kegiatan yang tidak efisien serta 19 sub kegiatan tidak dilaksanakan karena self bloking. Kegiatan yang tidak efisien adalah kegiatan pemberkasan di luar kota hal ini disebabkan karena lokasi kasus kejadian yang ditemukan di dalam kota, sedangkan anggaran yang tersedia untuk luar kota.

Faktor – faktor yang menyebabkan belum optimalnya realisasi anggaran di BBPOM di Denpasar antara lain penyerapan gaji karena ada pegawai yang meninggal dan pindah tugas, perjalanan dinas yang bersifat pasif seperti pengamanan makanan tamu negara, pengadaan sampel IFK yang tanpa menggunakan anggaran.

Hasil capaian kinerja maupun pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran efisiensi kegiatan dan sub kegiatan tidak terlepas dari komitmen dan dukungan seluruh pegawai di Lingkungan Balai Besar POM di Denpasar yang telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SPIP dan Reformasi Birokrasi serta budaya kerja organisasi

Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran BBPOM di Denpasar pada tahun 2015 dengan pagu sebesar Rp. 24.079.267.000 dengan realisasinya adalah Rp. 22.273.867.088 (92,50%) dari data tersebut terlihat bahwa pagu anggaran tahun 2016 lebih besar dari pada tahun 2015 (24,15%) dan realisasinya juga meningkat dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 5,3%.

Pengelolaan anggaran oleh BBPOM di Denpasar telah diupayakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan senantiasa berpedoman kepada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Realisasi anggaran dari seluruh program dan kegiatan Balai Besar POM di Denpasar Tahun 2016 untuk mendukung sasaran strategis dan sasaran kegiatan sebelum dan setelah self blocking dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Sasaran Strategis I  
Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan

<b>Sasaran Kegiatan 1</b> Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar		<b>Sasaran Kegiatan 2</b> Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar		<b>Sasaran Kegiatan 3</b> Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	
Sebelum Self Blocking	Setelah Self Blocking	Sebelum Self Blocking	Setelah Self Blocking	Sebelum Self Blocking	Setelah Self Blocking
Anggaran 5.308.500.000	Anggaran 5.164.321.000	Anggaran 270.419.000	Anggaran 254.707.000	Anggaran 817.953.000	Anggaran 731.576.000
Realisasi 5.039.941.210		Realisasi 231.648.600		Realisasi 703.060.500	
Capaian 94.94%	Capaian 97.59%	Capaian 85.66%	Capaian 90.95%	Capaian 85.95%	Capaian 96.10%

<b>Sasaran Kegiatan 4</b> Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap pelanggaran obat dan makanan	
Sebelum Self Blocking	Setelah Self Blocking
Anggaran 933.542.000	Anggaran 830.926.000
Realisasi 740.544.868	
Capaian 79.33%	Capaian 89.12%

Gambar 3.10 Realisasi anggaran sasaran kegiatan sebelum dan setelah self bloking pada Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis 2  
Meningkatnya Kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat

<b>Sasaran Kegiatan</b>	
<b>Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi</b>	
Sebelum Self Blocking	Setelah Self Blocking
Anggaran 1.574.457.000	Anggaran 1.369.107.000
Realisasi 1.339.187.850	
Capaian 85.06%	Capaian 97.81%

Gambar 3.11 Realisasi anggaran sasaran kegiatan sebelum dan setelah self blocking pada Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis 3  
Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM

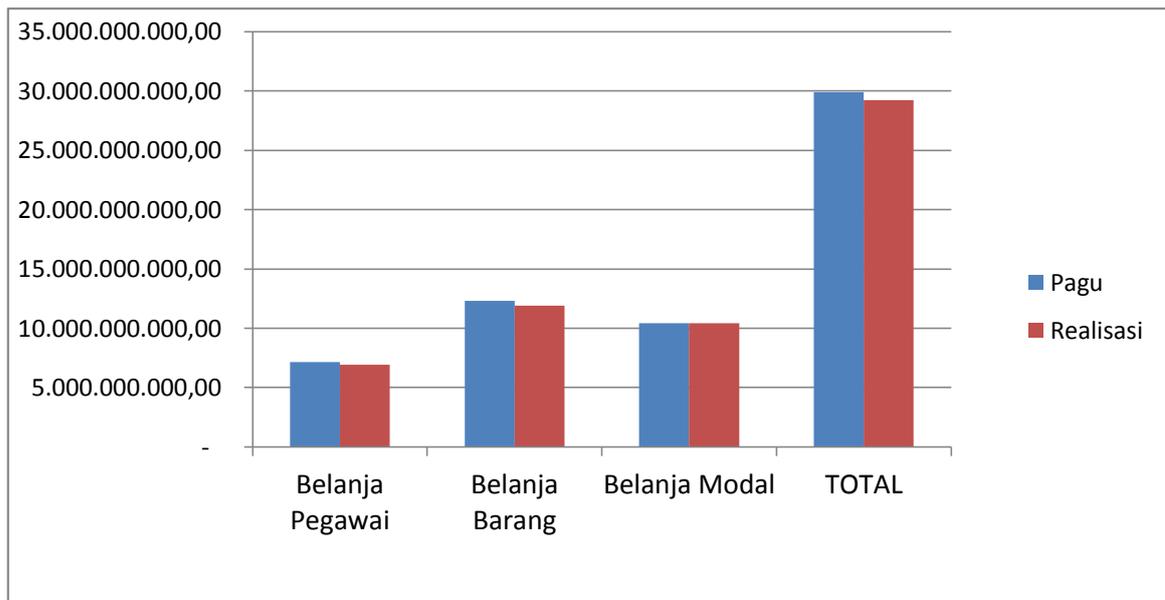
<b>Sasaran Kegiatan 1</b>	
<b>Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan</b>	
Sebelum Self Blocking	Setelah Self Blocking
Anggaran 11.317.000.000	Anggaran 10.590.665.000
Realisasi 10.550.832.502	
Capaian 93.23%	Capaian 99.62%

<b>Sasaran Kegiatan 2</b>	
<b>Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu</b>	
Sebelum Self Blocking	Setelah Self Blocking
Anggaran 10.972.801.000	Anggaran 10.953.370.000
Realisasi 10.630.909.827	
Capaian 96.88%	Capaian 97.06%

Gambar 3.12 Realisasi anggaran sasaran kegiatan sebelum dan setelah self blocking pada Sasaran Strategis 3

<b>Anggaran total</b>	
Sebelum Self Blocking	Setelah Self Blocking
Anggaran 31.194.672.000	Anggaran 29.236.125.357
Realisasi 29.236.125.357	
Capaian 93.72%	Capaian 97.80%

Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa sasaran strategis yang anggarannya terbanyak adalah sasaran strategis 3 hal ini disebabkan karena karena gaji , pengandaan dan pemeliharaan sarana prasarana cukup tinggi, begitupun realisasi anggaran sasaran ke 3 tertingi, hal ini disebabkan karena sisa anggaran efisiensi dari pengadaan alat direvisi menjadi pengadaan alat kedua sehingga anggaran terealisasi semuanya. Realisasi anggaran tahun 2016 setelah self blocking berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada diagram dibawah ini.



Gambar 3.13 Diagram Realisasi Anggaran tahun 2016 setelah self blocking

Dari gambar diatas terlihat anggaran yang terbesar adalah anggaran belanja barang , diikuti belanja modal dan belanja pegawai. Realisasi yang paling tinggi adalah belanja modal. Perbandingan Realisasi anggaran 2016 sebelum dan setelah self blocking terhadap anggaran 2015 berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Anggaran

NO.	JENIS BELANJA	TAHUN 2016			TAHUN 2015		
		PAGU sebelum self blocking	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%
		PAGU setelah self blocking					
1	Belanja Pegawai	7.159.851.000	6.936.000.297	96,87	6.928.783.000	6.294.919.881	90,85
		7.154.851.000		96,94			
2	Belanja Barang	12.867.821.000	11.892.442.458	92,42	9.258.639.000	8.800.031.433	95,05
		12.299.156.000		96,69			
3	Belanja Modal	11.167.000.000	10.407.682.602	93,20	7.891.845.000	7.178.915.774	90,97
		10.440.665.000		99,68			
<b>TOTAL</b>		31.194.672.000	29.236.125.357	93,72	24.079.267.000	22.273.867.088	92,50
		29.894.672.000		97,80			

Dibandingkan dengan tahun 2015, terlihat adanya peningkatan Pagu dan realisasi untuk semua jenis belanja di tahun 2016, pagu anggaran tahun 2016 setelah *self blocking* meningkat sebesar 24,15% dari tahun 2015 dan realisasinya juga meningkat sebesar 5,3%.

Pengelolaan anggaran oleh BBPOM di Denpasar telah diupayakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan senantiasa berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Hasil capaian kinerja maupun pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran efisiensi kegiatan dan sub kegiatan serta realisasi anggaran tidak terlepas dari komitmen dan dukungan seluruh pegawai di Lingkungan Balai Besar POM di Denpasar yang telah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SPIP dan Reformasi Birokrasi serta budaya kerja organisasi.

### C. ANALISIS EFISIENSI KEGIATAN

Untuk pengukuran efisiensi difokuskan pada pengukuran indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$\begin{aligned} SE &= \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} \\ &= \frac{100\%}{100\%} \\ &= 1 \end{aligned}$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika  $IE \geq SE$ , maka kegiatan dianggap efisien  
Jika  $IE < SE$ , maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Berdasarkan rumus diatas BBPOM di Denpasar telah mengukur indeks efisiensi dan tingkat efisiensi dari seluruh sub kegiatan pada Anggaran Balai Besar POM di Denpasar. Dari 15 program/kegiatan dan 233 sub kegiatan pada tahun 2016 untuk mendukung Pencapaian sasaran kegiatan dan sasaran strategis, telah dilaksanakan 214 sub kegiatan dengan hasil 213 (99.53%) dilaksanakan dengan efisien dan 1 (0,47%) sub kegiatan yang tidak efisien serta 19 sub kegiatan tidak dilaksanakan karena *self blocking*, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.12 Efisiensi Kegiatan pada Sasaran Strategis

No	SASARAN STRATEGIS	JUMLAH KEGIATAN		
		Terlaksana	Efisien	Tidak Efisien
1	Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan	121	120	1
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat	28	28	0
3	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM	65	65	0
	<b>TOTAL</b>	214	213 (99.53%)	1 (0.47%)

Ada satu kegiatan yang tidak efisien yaitu kegiatan pemberkasan di luar kota hal ini disebabkan karena lokasi kasus kejadian yang ditemukan di dalam kota, sedangkan anggaran yang tersedia untuk luar kota. Hasil pengukuran tingkat efisiensi terlihat bahwa banyak kegiatan dengan tingkat efisiensi melebihi standar efisiensi, ini menunjukkan bahwa Personil BBPOM di Denpasar memiliki tingkat integritas dan pemahaman pengelolaan anggaran sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas semakin baik. Dibandingkan dengan tahun 2015 Kegiatan yang tidak efisien pada tahun 2016 menurun, pada tahun 2015 sebanyak 7 kegiatan tidak efisien. Capaian efisiensi dan tingkat efisiensi yang meningkat dari tahun 2015

disebabkan karena komitmen seluruh pegawai dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SPIP dan Reformasi Birokrasi serta budaya kerja organisasi

Secara lengkap hasil pengukuran Kinerja kegiatan dan pengukuran efisiensi kinerja kegiatan serta tingkat efisiensinya dapat dilihat pada Lampiran 3 dan lampiran 4.

## BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah / Laporan Kinerja (LAPKIN) merupakan media pertanggungjawaban atas kinerja Instansi Pemerintah. LAPKIN juga dapat dipakai sebagai umpan balik pengambilan keputusan baik internal maupun pihak-pihak terkait dalam melakukan introspeksi untuk membuat langkah-langkah perbaikan dan/atau peningkatan kinerja di masa mendatang.

### 4.1. KESIMPULAN

Berdasarkan Pengukuran dan Evaluasi Kinerja yang dilakukan, secara garis besar diperoleh capaian kinerja sebagai berikut:

- Sasaran 1: Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan memiliki 5 indikator dengan capaian :
  - Persentase Obat yang memenuhi syarat : 106,88 % (memuaskan).
  - Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat : 97,82% (Cukup).
  - Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat : 108,78 % (memuaskan).
  - Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat : 124,29 % (Memuaskan).
  - Persentase Makanan yang memenuhi syarat : 104,62% (memuaskan).

Capaian Sasaran Strategis 1 sebesar 108,48% dengan kriteria **Memuaskan**

- Sasaran2: Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat memiliki 2 indikator dengan capaian :
  - Tingkat Kepuasan Masyarakat : 111,16% (memuaskan).
  - Jumlah Kabupaten / Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan : 125,00% (memuaskan)

Capaian Sasaran Strategis 2 sebesar 115,77% dengan kriteria **Memuaskan**.

- Sasaran 3: Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BBPOM di Denpasar memiliki 1 indikator dengan capaian :
  - Nilai SAKIP BBPOM di Denpasar Oleh Badan POM RI : 90,26% (cukup).

Capaian Sasaran Strategis 3 sebesar 90,26% dengan kriteria **Cukup**.

- ❖ Capaian Sasaran strategis 3 cukup, karena diukur hanya dengan satu indikator, mungkin perlu ditambah indikator pada saat review Renstra.
- ❖ Yang merupakan Indikator Kinerja Utama adalah kelima indikator kinerja pada sasaran strategis 1 dan indikator kinerja tingkat kepuasan masyarakat dari sasaran strategis 2 dengan capaian 5 memuaskan dan 1 cukup yaitu Indikator Obat Tradisional yang Memenuhi Syarat. Hal ini disebabkan karena Obat Tradisional yang beredar di Provinsi Bali sebagian besar merupakan produksi dari luar wilayah Provinsi Bali sehingga sulit melakukan intervensi terhadap produsen Obat Tradisional tersebut.
- ❖ Untuk mendukung capaian indikator kinerja BBPOM di Denpasar pada tahun 2016 telah melakukan kegiatan sebagai berikut :
  - Pengujian Obat sebanyak 700 sampel, dengan hasil jumlah obat yang memenuhi syarat 692 sampel (98,86%).
  - Pemeriksaan sarana distribusi Obat sebanyak 345 (34,39%) sarana dari 1003 sarana distribusi yang ada . Hasil pengawasan yang tidak memenuhi ketentuan selalu ditindaklanjuti dengan memberikan pembinaan tertulis baik langsung ke sarana yang bersangkutan maupun berupa rekomendasi ke instansi berwenang terkait (Dinas Kesehatan) untuk memberikan tindakan
  - Audit sarana distribusi dalam rangka izin PBF, sertifikasi dan resertifikasi CDOB sebanyak 9 sarana.
  - Dalam rangka peningkatan kepatuhan sarana terhadap peraturan dilakukan sosialisasi peraturan dan pedoman tentang Cara Distribusi Obat yang Baik.
  - Pengujian Obat Tradisional sebanyak 525 sampel dengan hasil jumlah Obat Tradisional yang memenuhi syarat 416 (79,24 %) sampel.
  - Dari 18 sarana produksi dan 165 sarana distribusi obat tradisional yang ada, telah diawasi sebanyak 12 (66,67%) sarana produksi dan 51(30,91%) sarana distribusi.
  - Dilakukan juga audit sarana produksi Obat Tradisional sebanyak 1 (satu) sarana dalam rangka pendaftaran produk Obat Tradisional.
  - Dari 15 kasus pelanggaran di bidang Obat Tradisional, sebanyak 3(tiga) pelaku usaha diproses *pro Justitia*.
  - Pembinaan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dilakukan kepada sarana produksi dan KIE kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih cerdas

- untuk tidak mengkonsumsi Obat Tradisional yang tidak memenuhi syarat dan tidak memiliki ijin edar.
- Pengujian kosmetik dengan ijin Edar Badan POM yang dilakukan sebanyak 1050 sampel dengan hasil kosmetik yang memenuhi syarat sebanyak 1028 sampel (97,90%).
  - Dari 31 sarana produksi dan 717 sarana distribusi yang ada, telah diawasi sebanyak 28 (90,32%) sarana produksi dan 112(15,62%) sarana distribusi.
  - Pengujian suplemen kesehatan dengan Ijin Edar Badan POM yang sebanyak 175 sampel dengan hasil suplemen kesehatan yang memenuhi syarat sebanyak 174 (99,43%) sampel.
  - Dari 56 sarana distribusi yang ada, telah diawasi sebanyak 10 (17,86%) sarana distribusi.
  - Anggaran BBPOM di Denpasar pada tahun 2016 setelah pemotongan sebesar Rp 31.194.672.000 setelah *self blocking* menjadi Rp 29.894.672.000 dengan realisasi Rp 29.236.125.357. Persentase realisasi anggaran sebelum self bloking adalah 93.72 % dan setelah *self blocking* 97,80 %
  - Dari 214 sub kegiatan yang telah dilaksanakan, 213 (99.53%) dilaksanakan dengan efisien dan 1 (0,47%) tidak efisien.

## 4.2. SARAN

Terkait dengan capaian kinerja tersebut, Balai Besar POM di Denpasar secara terus menerus berupaya melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Upaya perbaikan yang dilakukan antara lain:

- ❖ Evaluasi secara rutin terhadap target dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.
- ❖ Review renstra dan IKU agar dapat menghasilkan *outcome* yang lebih terukur.
- ❖ Menambahkan sasaran kegiatan dan indikatornya untuk mengukur tercapainya kemandirian pelaku usaha, untuk mencapai sasaran strategis "Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat",

- ❖ Meningkatkan kompetensi dan kapabilitas Sumber Daya Manusia Balai Besar POM di Denpasar melalui pendidikan dan pelatihan.
- ❖ Meningkatkan intensitas dan kualitas monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan serta pengelolaan anggaran dan kegiatan.
- ❖ Mengusulkan penambahan jumlah SDM sesuai dengan Analisa Beban Kerja (ABK)
- ❖ Memperkuat jejaring kerja dengan Lintas Sektor terkait.
- ❖ Meningkatkan koordinasi dengan Badan POM.
- ❖ Membuat sinkronisasi jadwal kegiatan antar bidang/sub bagian.
- ❖ Melakukan evaluasi secara rutin terhadap target dalam rangka meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

Demikian paparan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintahan BBPOM di Denpasar tahun 2016 , semoga laporan ini dapat bermanfaat untuk masyarakat, stake holder dan pihak-pihak yang berkepentingan, terutama Badan POM sebagai hasil evaluasi dari perjanjian kinerja tahun 2016 antara Kepala BBPOM di Denpasar dengan Kepala Badan POM.

**Rencana Strategis BBPOM di Denpasar tahun 2015-2019**  
**Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar**

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Lokasi	Baseline	Target					Alokasi (dalam Miliar rupiah)					
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
<b>Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar</b>														
	<b>SS 1 Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan</b>									3,74	4,11	4,53	4,98	5,48
	1.1. Persentase obat yang memenuhi syarat	Provinsi Bali	92,00	92,00	92,50	93,00	93,50	94,00						
	1.2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	Provinsi Bali	80,00	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00						
	1.3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	Provinsi Bali	89,00	89,00	90,00	91,00	92,00	93,00						
	1.4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	Provinsi Bali	79,00	79,00	80,00	81,00	82,00	83,00						
	1.5. Persentase makanan yang memenuhi syarat	Provinsi Bali	88,10	88,10	88,60	89,10	89,60	90,10						
	<b>SS 2 Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat</b>									0,96	1,06	1,16	1,28	1,41
	2.1. Tingkat Kepuasan Masyarakat	Provinsi Bali	80,00	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00						
	2.2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	Provinsi Bali	3,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00						
	<b>SS 3 Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM</b>									7,37	8,11	8,92	9,81	10,79
	3.1. Nilai SAKIP BBPOM di Denpasar oleh BPOM	Provinsi Bali	A	A	A	A	A	A						
<b>Program Pengawasan Obat dan Makanan</b>														
	<b>SP 1 Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan</b>									3,74	4,11	4,53	4,98	5,48
	1.1. Persentase obat yang memenuhi syarat	Provinsi Bali	92,00	92,00	92,50	93,00	93,50	94,00						
	1.2. Persentase obat Tradisional yang memenuhi syarat	Provinsi Bali	80,00	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00						
	1.3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	Provinsi Bali	89,00	89,00	90,00	91,00	92,00	93,00						
	1.4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	Provinsi Bali	79,00	79,00	80,00	81,00	82,00	83,00						
	1.5. Persentase makanan yang memenuhi syarat	Provinsi Bali	88,10	88,10	88,60	89,10	89,60	90,10						
	<b>SP 2 Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat</b>									0,96	1,06	1,16	1,28	1,41
	2.1. Tingkat Kepuasan Masyarakat	Provinsi Bali	80,00	80,00	80,50	81,00	81,50	82,00						
	2.2. Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	Provinsi Bali	3,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00						
	<b>SP 3 Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM</b>									7,37	8,11	8,92	9,81	10,79
	3.1. Nilai SAKIP BBPOM di Denpasar oleh BPOM	Provinsi Bali	A	A	A	A	A	A						
<b>Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Denpasar</b>														
	Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia	Provinsi Bali								12,07	13,28	14,60	16,07	17,67
	1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	Provinsi Bali	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	1,87	2,06	2,26	2,49	2,74	
	2. Pemenuhan target sampling produk Obat di sektor publik (IFK)	Provinsi Bali	100	100	100	100	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3. Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	Provinsi Bali	24,63	25	25	25	25	25	0,21	0,23	0,25	0,28	0,31	
	4. Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	Provinsi Bali	24	24	24	25	25	25	0,88	0,97	1,06	1,17	1,29	
	5. Jumlah Perkarja di bidang obat dan makanan	Provinsi Bali	9	9	10	10	10	10	0,78	0,86	0,94	1,04	1,14	
	6. Jumlah layanan publik BBPOM di Denpasar	Provinsi Bali	957	1.145	1.150	1.200	1.200	1.250	0,59	0,65	0,71	0,79	0,86	
	7. Jumlah Komunitas yang diberdayakan	Provinsi Bali	10	17	20	23	26	29	0,37	0,41	0,45	0,49	0,54	
	8. Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	Provinsi Bali	66	70	73	78	83	88	6,00	6,60	7,26	7,99	8,78	
	9. Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Provinsi Bali	8,00	10,00	9,00	10,00	9,00	10,00	1,37	1,51	1,66	1,82	2,01	

**RENCANA KINERJA TAHUN 2016  
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI DENPASAR**

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	<b>Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan</b>	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	92,50%
		2. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	81,00%
		3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	90,00%
		4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	80,00%
		5. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88,60%
2.	<b>Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat.</b>	1. Tingkat Kepuasan Masyarakat	80,50%
		2. Jumlah Kabupaten / Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	4
3.	<b>Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM</b>	Nilai SAKIP BBPOM di Denpasar Oleh Badan POM RI	A
<b>Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan</b>			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	3500
		2. Pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK)	100%
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	25
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	24
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	10
<b>Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat</b>			
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	1 Jumlah layanan publik BB/BPOM	1150
		2 Jumlah komunitas yang diberdayakan	20
<b>Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai BPOM</b>			
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	73%
2	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9

**Kegiatan**  
Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Denpasar

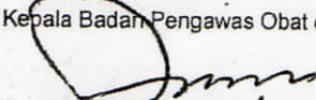
**Anggaran**  
Rp. 32.618.542.000

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	<b>Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan</b>	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat	92,50%
		2. Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	81,00%
		3. Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	90,00%
		4. Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	80,00%
		5. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	88,60%
2.	<b>Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat.</b>	1. Tingkat Kepuasan Masyarakat	80,50%
		2. Jumlah Kabupaten / Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	4
3.	<b>Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan BPOM</b>	Nilai SAKIP BBPOM di Denpasar Oleh Badan POM RI	A
<b>Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan</b>			
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk Obat dan Makanan yang beredar	1. Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	3500
		2. Pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK)	100%
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	25
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan	24
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	10
<b>Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat</b>			
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	1. Jumlah layanan publik BB/BPOM	1150
		2. Jumlah komunitas yang diberdayakan	20
<b>Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai BPOM</b>			
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan sarana prasarana sesuai standar	73%
2	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	9

Kegiatan  
Pengawasan Obat dan Makanan di Balai Besar POM di Denpasar

Anggaran  
Rp. 32.618.542.000

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

  
Dr. Roy A. Sparringa, M.App.Sc  
NIP. 19620501 198703 1 002

Denpasar, 5 Januari 2016  
Kepala Balai Besar POM di Denpasar

  
Dr. Endang Widowati, Apt.  
NIP. 19570905 198903 2 001

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016  
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI DENPASAR**

NO	SASARAN STRATEGIS/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN/ INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan Makanan	1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	92,50%	98,86%	106,88%
		2.	Persentase Obat Tradisional yang memenuhi syarat	81,00%	79,24%	97,82%
		3.	Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat	90,00%	97,90%	108,78%
		4.	Persentase Suplemen Kesehatan yang memenuhi syarat	80,00%	99,43%	124,29%
		5.	Persentase makanan yang memenuhi syarat	88,60%	92,69%	104,62%
2	Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat	1.	Tingkat Kepuasan Masyarakat	80,50%	89,48%	111,16%
		2.	Jumlah Kabupaten/Kota yang memberikan komitmen untuk pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan memberikan alokasi anggaran pelaksanaan regulasi Obat dan Makanan	4	5	125,00%
3	Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BPOM	Nilai SAKIP dari BPOM	A (80 - 90)	BB(72,21)	90,26%	
<b>Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan</b>						
1	Meningkatnya kualitas sampling dan pengujian terhadap produk obat dan makanan yang beredar	1.	Jumlah sampel yang diuji menggunakan parameter kritis	3.500	3.500	100,00%
		2.	Pemenuhan target sampling produk obat di sektor publik (IFK)	100,00%	82,86%	82,86%
2	Meningkatnya kualitas sarana produksi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana produksi Obat dan Makanan	25,00%	25,00%	100,00%	
3	Meningkatnya kualitas sarana distribusi yang memenuhi standar	Persentase cakupan pengawasan sarana distribusi Obat dan	24,00%	24,48%	102,00%	
4	Meningkatnya hasil tindak lanjut penyidikan terhadap Pelanggaran Obat dan Makanan	Jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan	10	10	100,00%	
<b>Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan dan partisipasi ma</b>						
1	Meningkatnya kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi	1	Jumlah layanan Publik BBPOM di Denpasar	1.150	1.412	122,78%
		2	Jumlah Komunitas yang diberdayakan	20	20	100,00%
<b>Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan Balai BPOM</b>						
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Terkait Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana sesuai standar	73,00%	77,07%	105,58%	
2	Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi yang dilaporkan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang dilaporka tepat waktu	9	9	100,00%	

PENGUKURAN KINERJA PROGRAM/KEGIATAN  
BALAI BESAR POM DI DENPASAR  
TAHUN 2016

PROGRAM/ KEGIATAN/		INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1.1	PENYUSUNAN PERENCANAAN SAMPLING	<u>Input</u> : Dana	4,880,000	4,880,000	100.00
		<u>Output</u> : Jumlah peserta yang mengikuti penyusunan perencanaan sampling	80	80	100.00
1.2	PENGADAAN SAMPEL	<u>Input</u> : Dana	780,010,000	759,169,314	97.33
		<u>Output</u> : Jumlah Sampel yang diadakan	3,500	3,500	100.00
1.3	PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL OBAT, OT, KOSMETIK, PK, PANGAN, KEMASAN PANGAN DAN PKRT	<u>Input</u> : Dana	1,095,500,000	951,540,200	86.86
		<u>Output</u> : Jumlah Sampel yang diuji	3,500	3,500	100.00
1.4	EVALUASI PENGUJIAN	<u>Input</u> : Dana	4,880,000	4,880,000	100.00
		<u>Output</u> : Jumlah Dokumen Rapat Evaluasi	4	4	100.00
1.5	PENINGKATAN SISTEM MUTU LABORATORIUM	<u>Input</u> : Dana	27,801,000	27,756,300	99.84
		<u>Output</u> : Konsistensi pelaksanaan Sistem Mutu Laboratorium	1	1	100.00
1.6	KALIBRASI ALAT LABORATORIUM (1 DOKUMEN)	<u>Input</u> : Dana	43,522,000	42,568,700	97.81
		<u>Output</u> : Jumlah Kegiatan Kalibrasi yang dilakukan	1	1	100.00
1.7	VERIFIKASI VOLUMETRIK INTERNAL DAN CEK ANTARA TIMBANGAN	<u>Input</u> : Dana	3,200,000	3,200,000	100.00
		<u>Output</u> : Jumlah Kegiatan Verifikasi yang dilakukan	1	1	100.00
1.8	VERIFIKASI METODE ANALISA	<u>Input</u> : Dana	165,460,000	165,350,000	99.93
		<u>Output</u> : Jumlah Kegiatan verifikasi metode analisa yang dilakukan	66	66	100.00
1.9	AUDIT INTERNAL SISTEM MUTU OLEH KJM DI DENPASAR (1 DOKUMEN)	<u>Input</u> : Dana	6,440,000	6,440,000	100.00
		<u>Output</u> : Terlaksananya audit internal Sistem Mutu	1	1	100.00
1.10	ASESMEN PENERAPAN PROGRAM LAB RUJUKAN/UNGGULAN DAN PENERAPAN SISTEM MUTU	<u>Input</u> : Dana	9,050,000	9,050,000	100.00
		<u>Output</u> : Terlaksananya Assesmen Penerapan Program Lab Rujukan/Unggulan dan Penerapan Sistem Mutu	1	1	100.00

PROGRAM/ KEGIATAN/		INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1.11	PENGEMBANGAN BAKU PEMBANDING SEKUNDER DAN BAKU KERJA	<u>Input</u> :			
		Dana	6,400,000	6,400,000	100.00
		<u>Output</u> :			
		Jumlah kegiatan pengembangan baku pembandingan sekunder dan baku kerja	1	1	100.00
1.12	PEMBAHASAN HASIL UJI KOLABORASI BAKU PEMBANDING DI JAKARTA	<u>Input</u> :			
		Dana	12,122,000	10,058,300	82.98
		<u>Output</u> :			
		Jumlah peserta yang mengikuti kolaborasi baku pembandingan	1	1	100.00
1.13	FORUM DISKUSI PENINGKATAN SISTEM JEJARING PENGUJIAN DI BADAN POM DI JAKARTA	<u>Input</u> :			
		Dana	29,210,000	29,206,300	99.99
		<u>Output</u> :			
		Jumlah peserta yang mengikuti Forum Diskusi Peningkatan Sistem Jejaring Pengujian di Badan POM di Jakarta	5	5	100.00
1.14	KAJI ULANG MANAJEMEN DAN TEKNIS LABORATORIUM	<u>Input</u> :			
		Dana	3,975,000	3,975,000	100.00
		<u>Output</u> :			
		kegiatan kaji ulang manajemen dan teknis yang dilakukan	1	1	100.00
1.15	KAJI ULANG DOKUMEN SISTEM MUTU	<u>Input</u> :			
		Dana	7,675,000	7,325,000	95.44
		<u>Output</u> :			
		Jumlah peserta kaji ulang dokumen sistem mutu	45	45	100.00
1.16	EVALUASI TEKNIS PENGUJIAN MELALUI UJI PROFISIENSI/UJI BANDING DAN UJI PETIK DI BBPOM/BPOM	<u>Input</u> :			
		Dana	106,230,000	103,523,549	97.45
		<u>Output</u> :			
		Jumlah kegiatan evaluasi teknis pengujian melalui uji profisiensi/uji banding dan uji petik di BBPOM/BPOM	11	11	100.00
1.17	PENGEMBANGAN METODE ANALISIS	<u>Input</u> :			
		Dana	26,500,000	25,240,000	95.25
		<u>Output</u> :			
		Jumlah kegiatan pengembangan metode analisa	5	5	100.00
1.18	FORUM DISKUSI TEKNIS PENGUJIAN LABORATORIUM BADAN POM DI JAKARTA	<u>Input</u> :			
		Dana	28,250,000	24,522,400	86.80
		<u>Output</u> :			
		Jumlah kegiatan pengembangan metode analisa	5	5	100.00
1.19	PEKAN ILMIAH DI YOGJAKARTA	<u>Input</u> :			
		Dana	46,030,000	40,370,500	87.70
		<u>Output</u> :			
		Jumlah peserta yang mengikuti Pekan Ilmiah di Yogyakarta	5	5	100.00
1.20	PENGADAAN MAKANAN MINUMAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH PNS	<u>Input</u> :			
		Dana	188,100,000	188,100,000	100.00
		<u>Output</u> :			
		Jumlah Pegawai yang ditingkatkan daya tahan tubuhnya	55	55	100.00

PROGRAM/ KEGIATAN/		INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1.21	FINALISASI PEDOMAN SAMPLING 2017	<u>Input</u> :			
		Dana	25,438,000	22,818,100	89.70
		<u>Output</u> :			
		Jumlah peserta yang mengikuti Finalisasi Pedoman Sampling	4	4	100.00
1.22	REAKREDITASI LABORATORIUM	<u>Input</u> :			
		Dana	6,000,000	5,500,000	91.67
		<u>Output</u> :			
		Jumlah pembayaran dan pendaftaran Akreditasi	1	1	100.00
1.23	PEMERIKSAAN KESEHATAN RESIKO PEKERJAAN	<u>Input</u> :			
		Dana	185,000,000	178,571,500	96.53
		<u>Output</u> :			
		Jumlah peserta yang mengikuti pemeriksaan kesehatan resiko pekerjaan	98	98	100.00
1.24	PENGAMANAN MAKANAN TAMU NEGARA	<u>Input</u> :			
		Dana	144,468,000	135,457,940	93.76
		<u>Output</u> :			
		Jumlah pemantauan pengamanan makanan tamu negara yang dilakukan	196	192	97.96
1.25	PENYELENGGARAAN LABORATORIUM	<u>Input</u> :			
		Dana	214,500,000	214,443,710	99.97
		<u>Output</u> :			
		Terselenggaranya kegiatan laboratorium	1	1	100.00
1.26	PENGADAAN TRIPLE AXIS ELECTRONMULTIPLIER	<u>Input</u> :			
		Dana	27,690,000	27,668,025	99.92
		<u>Output</u> :			
		Jumlah paket triple axis electron multiplier dan graphite tube	1	1	100.00
1.27	PENGADAAN GRAFITE TUBE	<u>Input</u> :			
		Dana	25,200,000	25,199,955	100.00
		<u>Output</u> :			
		Jumlah paket triple axis electron multiplier dan graphite tube	1	1	100.00
1.28	PENGADAAN ALAT GELAS	<u>Input</u> :			
		Dana	300,776,000	300,432,255	99.89
		<u>Output</u> :			
		Jumlah paket alat gelas yang diadakan	1	1	100.00
1.29	PENGADAAN SUKU CADANG	<u>Input</u> :			
		Dana	776,700,000	776,700,000	100.00
		<u>Output</u> :			
		Jumlah paket suku cadang yang diadakan	1	1	100.00
1.30	PENGADAAN BUFFER STOCK	<u>Input</u> :			
		Dana	103,500,000	102,998,500	99.52
		<u>Output</u> :			
		Jumlah paket buffer stock yang diadakan	1	1	100.00

PROGRAM/ KEGIATAN/		INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1.31	PELATIHAN ANALISIS SECARA KROMATOGRAFI PRODUK TERAPETIK DAN NAPZA, HPLC	<u>Input</u> : Dana	8,983,000	8,982,900	100.00
		<u>Output</u> : Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan analisis secara kromatografi produk terapetik san Napza, HPLC	1	1	100.00
1.32	PELATIHAN ANALISIS KOSMETIK, OBAT TRADISIONAL DAN PRODUK KOMPLEMEN HPLC	<u>Input</u> : Dana	18,852,000	18,702,000	99.20
		<u>Output</u> : Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan analisis kosmetik, Obat Tradisional dan Produk Komplemen HPLC	2	2	100.00
1.33	PELATIHAN ANALISIS AAS DAN GC UNTUK BB/BPOM	<u>Input</u> : Dana	8,697,000	8,696,900	100.00
		<u>Output</u> : Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan analisis AAS dan GC untuk BB/BPOM	1	1	100.00
1.34	PELATIHAN ANALISIS BAKU PEMBANDING DI JAKARTA	<u>Input</u> : Dana	8,825,000	8,825,000	100.00
		<u>Output</u> : Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan analisis baku pembeding di Jakarta	1	1	100.00
1.35	PELATIHAN KALIBRASI DAN CEK ANTARA DI JAKARTA	<u>Input</u> : Dana	7,885,000	6,176,150	78.33
		<u>Output</u> : Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kalibrasi dan cek antara di jakarta	1	1	100.00
1.36	BIMBINGAN TEKNIS JAMINAN MUTU HASIL PENGUJIAN	<u>Input</u> : Dana	35,200,000	35,186,150	99.96
		<u>Output</u> : Jumlah peserta yang mengikuti bimbingan teknis jaminan mutu hasil pengujian	42	42	100.00
1.37	MAGANG DI PPMN DALAM RANGKA KOMPETENSI PENGUJI DI LABORATORIUM PENGUJIAN KOSMETIK, OBAT TRADISIONAL DAN PRODUK KOMPLEMEN	<u>Input</u> : Dana	22,584,000	20,064,200	88.84
		<u>Output</u> : Jumlah peserta yang mengikuti magang di PPMN dalam rangka peningkatan kompetensi penguji di laboratoium pengujian kosmetik, obat tradisional, dan produk komplemen	2	2	100.00
1.38	MAGANG DI PPMN DALAM RANGKA KOMPETENSI PENGUJI DI LABORATORIUM PENGUJIAN PRODUK TERAPETIK DAN NAPZA	<u>Input</u> : Dana	40,768,000	35,304,400	86.60
		<u>Output</u> : Jumlah peserta yang mengikuti magang di PPMN dalam rangka peningkatan kompetensi penguji di laboratoium pengujian produk terapetik dan napza	4	4	100.00

PROGRAM/ KEGIATAN/		INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1.39	PENINGKATAN KOMPETENSI PENGUJI DI LABORATORIUM PENGUJIAN PRODUK PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA	<u>Input</u> :			
		Dana	39,954,000	34,018,700	85.14
		<u>Output</u> :			
		Jumlah peserta yang mengikuti magang di PPOMN	4	4	100.00
1.40	MAGANG DI PPOMN DALAM RANGKA PENINGKATAN KOMPETENSI PENGUJI DI LABORATORIUM PENGUJIAN PANGAN DAN MIKROBIOLOGI	<u>Input</u> :			
		Dana	33,876,000	26,928,540	79.49
		<u>Output</u> :			
		Jumlah peserta yang mengikuti magang di PPOMN dalam rangka peningkatan kompetensi penguji di laboratorium pengujian pangan dan bahan berbahaya dan mikrobiologi	3	3	100.00
1.41	PELATIHAN NILAI KETIDAKPASTIAN DI JAKARTA	<u>Input</u> :			
		Dana	59,260,000	55,185,400	93.12
		<u>Output</u> :			
		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan nilai ketidakpastian di Jakarta	5	5	100.00
1.42	PELATIHAN AUDITOR SISTEM MUTU	<u>Input</u> :			
		Dana	30,396,000	29,306,300	96.41
		<u>Output</u> :			
		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan auditor sistem mutu	3	3	100.00
1.43	PELATIHAN INTERNAL PENGUJIAN OBAT TRADISIONAL DENGAN INSTRUMEN	<u>Input</u> :			
		Dana	18,792,000	18,395,500	97.89
		<u>Output</u> :			
		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pelatihan internal pengujian obat tradisional dengan instrumen	15	15	100.00
1.44	PELATIHAN INTERNAL PENGUJIAN TERAPETIK DENGAN INSTRUMEN	<u>Input</u> :			
		Dana	34,204,000	33,425,315	97.72
		<u>Output</u> :			
		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan internal pengujian terapetik dengan instrumen	10	10	100.00
1.45	PELATIHAN INTERNAL PENGUJIAN KOSMETIK DENGAN INSTRUMEN	<u>Input</u> :			
		Dana	37,512,000	36,692,700	97.82
		<u>Output</u> :			
		Jumlah Dokumen Pelatihan	1	1	100.00
1.46	PELATIHAN INTERNAL PENGUJIAN PENGUJIAN NAPZA DENGAN INSTRUMEN	<u>Input</u> :			
		Dana	28,742,000	26,562,100	92.42
		<u>Output</u> :			
		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan internal pengujian pengujian Napza dengan instrumen	11	11	100.00

PROGRAM/ KEGIATAN/		INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1.47	PELATIHAN INTERNAL PENGUJIAN PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA DENGAN INSTRUMEN	<u>Input</u> :			
		Dana	40,442,000	34,458,700	85.21
		<u>Output</u> :			
		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan internal pengujian pangan dan bahan berbahaya dengan instrumen	15	15	100.00
1.48	PELATIHAN INTERNAL PENGUJIAN MIKROBIOLOGI	<u>Input</u> :			
		Dana	35,860,000	35,562,440	99.17
		<u>Output</u> :			
		Jumlah Documen Pelatihan	1	1	100.00
1.49	PELATIHAN INTERNAL UJI DISOLUSI	<u>Input</u> :			
		Dana	37,512,000	35,995,620	95.96
		<u>Output</u> :			
		Jumlah Documen Pelatihan	1	1	100.00
1.50	PELATIHAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	<u>Input</u> :			
		Dana	23,084,000	20,766,450	89.96
		<u>Output</u> :			
		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa	2	2	100.00
1.51	PELATIHAN APLIKASI SOFTWARE INSTRUMEN PENGUJIAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KOMPETENSI PENGUJI/USER	<u>Input</u> :			
		Dana	41,679,000	38,680,000	92.80
		<u>Output</u> :			
		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan software instrumen pengujian dalam rangka peningkatan kompetensi penguji/user	10	10	100.00
1.52	PELATIHAN CORRECTIVE ACTION DAN PREVENTIV ACTION (CAPA) SESUAI PERSYARATAN ISO 17025 DI JAKARTA	<u>Input</u> :			
		Dana	19,420,000	18,086,602	93.13
		<u>Output</u> :			
		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Corrective Action & Preventive Action (CAPA) sesuai persyaratan ISO 17025 di Jakarta	2	2	100.00
1.53	PELATIHAN TEKNIK INVESTIGASI DAN UPAYA TINDAK LANJUT HASIL UJI PROFISIENSI	<u>Input</u> :			
		Dana	22,864,000	20,590,400	90.06
		<u>Output</u> :			
		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Teknik Investigasi dan Upaya Tindak lanjut Hasil Uji profisiensi	2	2	100.00
1.54	PELATIHAN UNDERSTANDING AND DEVELOPING OF ISO/IEC 17025	<u>Input</u> :			
		Dana	10,132,000	8,794,700	86.80
		<u>Output</u> :			
		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Understanding and Developing ISO/IEC 17025	1	1	100.00
1.55	PELATIHAN CONTINUOUS IMPROVEMENT FOR LEADING LABORATORY DI JAKARTA	<u>Input</u> :			
		Dana	9,244,000	9,243,100	99.99
		<u>Output</u> :			
		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Continous Improvement for leading Laboratory di Jakarta	1	1	100.00

PROGRAM/ KEGIATAN/		INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1.56	PELATIHAN MANAGEMENT REVIEW DI JAKARTA	<u>Input</u> :			
		Dana	19,582,000	19,529,420	99.73
		<u>Output</u> :			
		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Management Review	2	2	100.00
1.57	PELATIHAN DESIGN DAN PERHITUNGAN STATISTIK DATA UJI BANDING DUA LABORATORIUM DAN UJI BANDING ANTAR ANALIS	<u>Input</u> :			
		Dana	22,740,000	22,707,000	99.85
		<u>Output</u> :			
		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan design dan perhitungan statistik data uji banding dua laboratorium dan uji banding antar analis	2	2	100.00
1.58	ESTIMASI KETIDAKPASTIAN PENGUKURAN UNTUK UJI MIKROBIOLOGI	<u>Input</u> :			
		Dana	18,302,000	16,138,875	88.18
		<u>Output</u> :			
		Jumlah peserta yang mengikuti Estimasi Ketidakpastian Pengukuran Untuk Uji Mikrobiologi	1	1	100.00
1.59	PELATIHAN IT	<u>Input</u> :			
		Dana	33,150,000	33,150,000	100.00
		<u>Output</u> :			
		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan IT	15	15	100.00
1.60	IN HOUSE TRAINING	<u>Input</u> :			
		Dana	29,150,000	29,150,000	100.00
		<u>Output</u> :			
		Jumlah kegiatan In house Training	53	53	100.00
1.61	BENCH MARK LINTAS SEKTOR	<u>Input</u> :			
		Dana	106,302,000	91,290,100	85.88
		<u>Output</u> :			
		Jumlah perjalanan Bench Mark Lintas Sektor	3	3	100.00
2.1	PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN OLEH PETUGAS BALAI (DALAM KOTA) DI PROVINSI BALI (64 SARANA)	<u>Input</u> :			
		Dana	17,250,000	17,200,100	99.71
		<u>Output</u> :			
		Jumlah sarana yang diperiksa	64	64	100.00
2.2	PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN OLEH PETUGAS BALAI (DI LUAR KOTA) DI PROVINSI BALI (140 SARANA)	<u>Input</u> :			
		Dana	108,550,000	107,230,000	98.78
		<u>Output</u> :			
		Jumlah sarana yang diperiksa	140	140	100.00
2.3	SOSIALISASI PERATURAN DI BIDANG PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN	<u>Input</u> :			
		Dana	15,712,000	-	-
		<u>Output</u> :			
		Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi	40	-	-
2.4	DESIMINASI HASIL PELATIHAN	<u>Input</u> :			
		Dana	8,400,000	8,400,000	100.00
		<u>Output</u> :			
		jumlah pegawai yang mengikuti deseminasi	120	120	100.00
2.5	PELATIHAN CPOTB DASAR DI JAKARTA	<u>Input</u> :			
		Dana	6,202,000	4,702,200	75.82
		<u>Output</u> :			
		Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan	1	1	100.00
2.6	PELATIHAN CPOTB LANJUTAN DI JAKARTA	<u>Input</u> :			
		Dana	2,280,000	1,710,500	75.02
		<u>Output</u> :			
		Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan	1	1	100.00

PROGRAM/ KEGIATAN/		INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
2.7	BIMBINGAN TEKNIS CPOTB TOPIK KHUSUS DI JAKARTA	Input : Dana	2,280,000	1,603,000	70.31
		Output : Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan	1	1	100.00
2.8	JOINT INSPECTION	Input : Dana	6,361,000	5,251,000	82.55
		Output : Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan	1	1	100.00
2.9	AUDIT DALAM RANGKA PRA SERTIFIKASI/SERTIFIKASI/REGISTRASI DAN HALAL	Input : Dana	59,100,000	42,455,000	71.84
		Output : Jumlah Sarana yang di audit	46	46	100.00
2.10	AUDIT CALON PENERIMA PIAGAM BINTANG KEAMANAN PANGAN (PBKP)	Input : Dana	7,000,000	6,919,700	98.85
		Output : Jumlah Sarana yang di audit	10	10	100.00
2.11	AUDIT SURVEILAN PENERIMA PIAGAM BINTANG KEAMANAN PANGAN (PBKP)	Input : Dana	22,680,000	22,523,800	99.31
		Output : Jumlah Sarana yang di audit	22	22	100.00
2.12	WORKSHOP ASPEK BANGUNAN, FASILITAS DAN PERALATAN INDUSTRI KOSMETIK DAN OBAT TRADISIONAL BAGI PETUGAS PUSAT DAN BALAI	Input : Dana	620,000	620,000	100.00
		Output : Jumlah Petugas Balai yang mengikuti Pelatihan Aspek Bangunan	1	1	100.00
2.13	BIMTEK CPKB DALAM RANGKA PELAYANAN PUBLIK BAGI PETUGAS DAERAH	Input : Dana	3,520,000	3,407,500	96.80
		Output : Jumlah Petugas Balai yang mengikuti Bimtek CPKB	1	1	100.00
2.14	IMPLEMENTASI PROGRAM PENGAWASAN PRODUK DAN BAHAN BERBAHAYA	Input : Dana	10,464,000	9,625,800	91.99
		Output : Jumlah Petugas Balai yang mengikuti pertemuan	2	2	100.00
3.1	PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI PRODUK OBAT DAN MAKANAN OLEH PETUGAS BALAI (DI DALAM KOTA) DI PROVINSI BALI ( 228 SARANA)	Input : Dana	51,850,000	51,798,000	99.90
		Output : Jumlah sarana yang diperiksa	228	228	100.00
3.2	PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI PRODUK OBAT DAN MAKANAN OLEH PETUGAS BALAI (DI LUAR KOTA) DI PROVINSI BALI ( 619 SARANA)	Input : Dana	365,850,000	362,093,000	98.97
		Output : Jumlah sarana yang diperiksa	619	636	102.75
3.3	PENGAWASAN PENANDAAN OBAT DAN MAKANAN	Input : Dana	36,280,000	26,785,000	73.83
		Output : Jumlah jumlah sarana yang diperiksa penandaan obatnya	56	56	100.00
3.4	PENGAWASAN PERIKLANAN OBAT DAN MAKANAN	Input : Dana	31,179,000	30,851,000	98.95
		Output : Jumlah iklan yang diawasi	580	701	120.86
3.5	PENGAWASAN DALAM RANGKA INTENSIFIKASI/PENERTIBAN PASAR	Input : Dana	93,200,000	92,200,000	98.93
		Output : Jumlah laporan	3	3	100.00
3.6	PENGAWASAN DALAM RANGKA TINDAK LANJUT PENGADUAN KONSUMEN	Input : Dana	18,200,000	18,000,000	98.90
		Output : Jumlah Pengaduan Yang Ditindak lanjuti	34	34	100.00

PROGRAM/ KEGIATAN/		INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
3.7	PENGAWASAN SARANA PRODUKSI/ DISTRIBUSI PRODUK FORTIFIKASI	Input : Dana	17,160,000	16,960,000	98.83
		Output : Jumlah Laporan	1	1	100.00
3.8	KOORDINASI PENGAWASAN LINTAS SEKTOR	Input : Dana	4,600,000	4,560,000	99.13
		Output : Jumlah Laporan Koordinasi	12	12	100.00
3.9	RAPAT KONSULTASI NASIONAL PENGAWASAN OT, KOSMETIK DAN SM 2016 DI JAKARTA	Input : Dana	13,484,000	11,291,800	83.74
		Output : Jumlah Pegawai yang mengikuti Pertemuan	2	2	100.00
3.10	FORUM EVALUASI SAMPLING 2016 DAN PENYUSUNAN RENCANA SAMPLING 2017 DI JAKARTA	Input : Dana	12,404,000	10,759,200	86.74
		Output : Jumlah Pegawai yang mengikuti Pertemuan	2	2	100.00
3.11	KONSULTASI PENGAWASAN	Input : Dana	39,360,000	-	-
		Output : Jumlah Pegawai yang mengikuti Konsultasi	5	-	-
3.12	KOORDINASI UNTUK PENINGKATAN KINERJA	Input : Dana	23,646,000	18,372,000	77.70
		Output : Jumlah Pegawai yang mengikuti Koordinasi	4	4	100.00
3.13	SOSIALISASI PERATURAN DI BIDANG DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN (PNP)	Input : Dana	44,990,000	22,340,000	49.66
		Output : Jumlah Pegawai yang mengikuti Sosialisasi	130	65	50.00
3.14	BIMBINGAN TEKNIS INSPEKTUR JUNIOR DI JAKARTA	Input : Dana	6,002,000	5,373,400	89.53
		Output : Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis	1	1	100.00
3.15	BIMBINGAN TEKNIS INSPEKTUR KEPALA DI JAKARTA	Input : Dana	2,280,000	2,054,500	90.11
		Output : Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis	1	1	100.00
3.16	BIMBINGAN TEKNIS INSPEKTUR SENIOR DI JAKARTA	Input : Dana	6,202,000	5,348,000	86.23
		Output : Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis	1	1	100.00
3.17	PELATIHAN PENGAWASAN PEREDARAN OT DAN SM DI BOGOR	Input : Dana	5,642,000	4,973,000	88.14
		Output : Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan	1	1	100.00
3.18	PELATIHAN PENGAWASAN PERIKLAMAN DAN PELABELAN PANGAN DI JAKARTA	Input : Dana	6,202,000	4,669,900	75.30
		Output : Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan	1	1	100.00
3.19	PELATIHAN INTERNAL CDOB	Input : Dana	24,522,000	-	-
		Output : Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan	30	-	-

PROGRAM/ KEGIATAN/		INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
3.20	AUDIT SKI / SKE	Input :			
		Dana	14,900,000	14,631,700	98.20
		Output :			
		Jumlah Sarana yang di audit	15	15	100.00
4.1	PENGUMPULAN BAHAN KETERANGAN, VERIFIKASI INFORMASI DAN RENCANA INVESTIGASI AWAL (DK)	Input :			
		Dana	1,830,000	1,830,000	100.00
		Output :			
		Jumlah Laporan	6	6	100.00
4.2	PELAKSANAAN INVESTIGASI AWAL (DK)	Input :			
		Dana	47,784,000	44,698,800	93.54
		Output :			
		Jumlah Laporan	12	12	100.00
4.3	EVALUASI INVESTIGASI AWAL, GELAR KASUS DAN PELAPORAN HASIL INVESTIGASI (DK)	Input :	2,196,000	2,196,000	100.00
		Dana			
		Output :	6	6	100.00
		Jumlah Laporan			
4.4	RAPAT PEMBAHASAN RENCANA PENYIDIKAN, SKENARIO PENINDAKAN DAN OLAH TKP (DK)	Input :	2,196,000	2,196,000	100.00
		Dana			
		Output :	6	6	100.00
		Jumlah Laporan			
4.5	PENINDAKAN (DK)	Input :	18,228,000	17,073,000	93.66
		Dana			
		Output :	6	6	100.00
		Jumlah Laporan			
4.6	OPERASI KHUSUS (TERMASUK SATGAS)	Input :	6,300,000	4,800,000	76.19
		Dana			
		Output :	3	3	100.00
		Jumlah Laporan			
4.7	PEMBERKASAN (DK)	Input :	20,160,000	17,158,000	85.11
		Dana			
		Output :	3	4	133.33
		Jumlah Perkara			
4.8	KONSULTASI PENYELESAIAN BERKAS PERKARA	Input :	9,792,000		-
		Dana			
		Output :			#DIV/0!
		Jumlah Perkara			
4.9	PENASEHAT HUKUM	Input :	3,000,000		-
		Dana			
		Output :			#DIV/0!
		Jumlah Perkara			
4.10	DISEMINASI HASIL KEGIATAN PPNS	Input :	7,320,000		-
		Dana			
		Output :			#DIV/0!
		Jumlah Perkara			
4.11	PENGUMPULAN BAHAN KETERANGAN, VERIFIKASI INFORMASI DAN RENCANA INVESTIGASI AWAL (LK)	Input :	4,270,000	3,355,000	78.57
		Dana			
		Output :	14	10	71.43
		Jumlah Laporan			
4.12	PELAKSANAAN INVESTIGASI AWAL (LK)	Input :	261,030,000	243,445,800	93.26
		Dana			
		Output :	28	28	100.00
		Jumlah Laporan			
4.13	EVALUASI INVESTIGASI AWAL, GELAR KASUS DAN PELAPORAN HASIL INVESTIGASI (LK)	Input :	5,124,000	4,026,000	78.57
		Dana			
		Output :	14	11	78.57
		Jumlah Laporan			
4.14	PEMBAHASAN RENCANA PENYIDIKAN, SKENARIO PENINDAKAN DAN OLAH TKP (LK)	Input :	5,124,000	2,928,000	57.14
		Dana			
		Output :	14	9	64.29
		Jumlah Laporan			
4.15	PENINDAKAN (LK)	Input :	122,312,000	108,391,500	88.62
		Dana			
		Output :	13	13	100.00
		Jumlah Laporan			
4.16	OPERASI KHUSUS (TERMASUK SATGAS)	Input :	53,880,000	48,742,000	90.46
		Dana			
		Output :	6	6	100.00
		Jumlah Laporan			
4.17	OPERASI DI PERBATASAN (LK)	Input :	18,000,000	17,364,000	96.47
		Dana			
		Output :	2	2	100.00
		Jumlah Laporan			

PROGRAM/ KEGIATAN/		INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
4.18	PEMBERKASAN (LK)	Input : Dana	66,740,000	57,598,400	86.30
		Output : Jumlah Perkara	7	6	85.71
4.19	KONSULTASI PENYELESAIAN BERKAS PERKARA	Input : Dana	25,410,000	-	-
		Output : Jumlah Perkara			#DIV/0!
4.20	PENASEHAT HUKUM	Input : Dana	7,000,000	-	-
		Output : Jumlah Perkara			#DIV/0!
4.21	PUBLIKASI HASIL OPERASI (LK)	Input : Dana	6,600,000	6,600,000	100.00
		Output : Jumlah Laporan	4	4	100.00
4.22	PENGEMBANGAN PENYIDIKAN LINTAS PROVINSI (LK)	Input : Dana	54,306,000	45,477,100	83.74
		Output : Jumlah Laporan	1	1	100.00
4.23	Forum Kordinasi PPNS BPOM (LK)	Input : Dana	7,872,000	7,252,800	92.13
		Output : Jumlah OT	1	1	100.00
4.24	PENGEMBANGAN KINERJA PPNS (LK)	Input : Dana	10,954,000	9,326,000	85.14
		Output : Jumlah OT	2	2	100.00
4.25	WORKSHOP RANCANGAN UNDANG UNDANG (LK)	Input : Dana	17,980,000	14,024,200	78.00
		Output : Jumlah OT	2	2	100.00
4.26	PERTEMUAN PERKUATAN PEMANTAPAN OPERASI PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG	Input : Dana	6,382,000	4,638,300	72.68
		Output : Jumlah OT	1	1	100.00
4.27	PENINGKATAN KINERJA PPNS	Input : Dana	10,954,000	9,326,000	85.14
		Output : Jumlah OT	2	2	100.00
4.28	PERTEMUAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR PENEGKAN HUKUM TINDAK PIDANA OBAT DAN MAKANAN	Input : Dana	21,246,000	15,636,797	73.60
		Output : Jumlah OT	3	3	100.00
4.29	RAPAT KOORDINASI LINTAS SEKTOR	Input : Dana	11,365,000	8,664,800	76.24
		Output : Jumlah Laporan	1	1	100.00
4.30	PEMUSNAHAN OMKABA TMK	Input : Dana	10,339,000	9,351,600	90.45
		Output : Jumlah Laporan	1	1	100.00
4.31	PERJALANAN DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM	Input 1 : Dana	6,050,000	5,970,000	98.68
		Output 1 : Jumlah Perjalanan (LK)	11	11	100.00
4.32	ADVOKASI DENGAN PENEGAK HUKUM	Input 2 : Dana	3,300,000	3,150,000	95.45
		Output 2 : Jumlah Perjalanan (DK)	22	21	95.45
4.33	KONSULTASI DAN PENAMBAHAN WAWASAN PENYIDIKAN	Input : Dana	16,000,000	14,320,000	89.50
		Output : Jumlah Laporan	9	9	100.00
4.34	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBENTUKAN PPNS BPOM DI BOGOR	Input : Dana	31,488,000	-	-
		Output : Jumlah Laporan	9	-	-
4.34	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBENTUKAN PPNS BPOM DI BOGOR	Input : Dana	6,202,000	5,211,272	84.03
		Output : Jumlah OT	1	1	100.00

PROGRAM/ KEGIATAN/		INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
4.35	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INTELEGENT	Input : Dana	6,202,000	5,793,499	93.41
		Output : Jumlah Laporan	1	1	100.00
4.36	PENINGKATAN KOMPETENSI DASAR PPNS DI BOGOR	Input : Dana	6,202,000	-	-
		Output : Jumlah Laporan	-	-	#DIV/0!
4.37	PENINGKATAN KEMAMPUAN PENYIDIKAN PPNS BADAN POM DI BOGOR	Input : Dana	6,202,000	-	-
		Output : Jumlah Laporan	-	-	#DIV/0!
4.38	PENINGKATAN KEMAMPUAN MANAJERIAL PENYIDIKAN DI BOGOR	Input : Dana	6,202,000	-	-
		Output : Jumlah Laporan	-	-	#DIV/0!
5.1	ADVOKASI /KOORDINASI BBPOM KE INSTANSI PEMERINTAH LAINNYA/STAKE HOLDER	Input : Dana	25,122,000	24,884,800	99.06
		Output : Jumlah Instansi yang di advokasi	9	9	100.00
5.2	PEMETAAN KASUS KERACUNAN KLB	Input : Dana	10,945,000	10,847,200	99.11
		Output : Jumlah peserta pertemuan	30	30	100.00
5.3	OPERASIONAL SENTRA INFORMASI KERACUNAN (SIKER) DAN SURVEILAN KLB KERACUNAN PANGAN	Input : Dana	20,100,000	20,040,000	99.70
		Output : Jumlah RS yang melaporkan kasus keracunan di 9 kab/kota	9	9	100.00
5.4	PAMERAN PEMBANGUNAN 17 AGUSTUS BBPOM DI DENPASAR	Input : Dana	96,860,000	96,717,800	99.85
		Output : Jumlah Pameran Pembangunan	1	1	100.00
5.5	PENYEBARAN INFORMASI PRODUK OBAT DAN MAKANAN	Input : Dana	108,230,000	107,919,600	99.71
		Output : Jumlah kegiatan peyebaran informasi	15	15	100.00
5.6	KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI	Input : Dana	58,578,000	58,455,000	99.79
		Output : Jumlah paket penayangan iklan	3	3	100.00
5.7	KIE DALAM RANGKA SOSIALISASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	Input : Dana	169,902,000	-	-
		Output :			#DIV/0!
5.8	PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS SERLIK	Input : Dana	32,108,000	28,386,000	88.41
		Output : Jumlah petugas yang ditingkatkan kemampuannya dalam rangka layanan publik	5	5	100.00
5.9	PELATIHAN KEHUMASAN BAGI PETUGAS BALAI	Input : Dana	12,790,000	12,697,000	99.27
		Output : Jumlah petugas yang ditingkatkan kemampuannya	30	30	100.00
5.10	KOORDINASI DAN DISEMINASI KEGIATAN BIDANG HUKUM DAN KEHUMASAN	Input : Dana	18,016,000	16,547,300	91.85
		Output : Jumlah petugas yang mengikuti pertemuan	3	3	100.00

PROGRAM/ KEGIATAN/		INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
5.11	PELATIHAN MEDSOS	<u>Input</u> :			
		Dana	9,804,000	8,458,300	86.27
		<u>Output</u> :			
		Jumlah petugas yang mengikuti pelatihan	2	2	100.00
5.12	PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS SERLIK KE SEMARANG	<u>Input</u> :			
		Dana	18,753,000	14,543,000	77.55
		<u>Output</u> :			
		Jumlah Petugas yang mengikuti kegiatan	3	3	100.00
5.13	FORUM ADVOKASI KOMITMEN PEMDA DAN LINTAS SEKTOR	<u>Input</u> :			
		Dana	9,444,000		-
		<u>Output</u> :			#DIV/0!
5.14	FORUM GROUP DISCUSION DALAM RANGKA FORTIFIKASI PANGAN	<u>Input</u> :			
		Dana	5,864,000		-
		<u>Output</u> :			#DIV/0!
5.15	OPERASIONAL MOBIL LABORATORIUM KELILING	<u>Input</u> :			
		Dana	255,514,000	254,247,300	99.50
		<u>Output</u> :			
		Jumlah kegiatan operasional mobil keliling	96	96	100.00
5.16	KAMPANYE DALAM RANGKA PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA	<u>Input</u> :			
		Dana	30,150,000	28,962,900	96.06
		<u>Output</u> :			
		Jumlah kegiatan	2	2	100.00
5.17	KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN KOMUNITAS	<u>Input</u> :			
		Dana	244,680,000	243,220,000	99.40
		<u>Output</u> :			
		Jumlah kegiatan KIE di radio dan TV	14	14	100.00
5.18	TOT FASILITATORPASAR AMAN	<u>Input</u> :			
		Dana	6,202,000	4,143,350	66.81
		<u>Output</u> :			
		Jumlah Petugas yang mengikuti Pelatihan TOT Fasilitator Pasar Aman	1	1	100.00
5.19	PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS SERLIK	<u>Input</u> :			
		Dana	51,468,000	47,411,200	92.12
		<u>Output</u> :			
		Jumlah petugas yang mengikuti peningkatan kompetensi dalam rangka pemberdayaan	8	8	100.00
5.20	REORIENTASI KEAMANAN PANGAN BALAI	<u>Input</u> :			
		Dana	43,455,000	42,184,000	97.08
		<u>Output</u> :			
		Jumlah kegiatan	1	1	100.00
5.21	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN USAHA PANGAN DESA DI BIDANG KEAMANAN PANGAN-BALAI	<u>Input</u> :			
		Dana	111,500,000	110,452,500	99.06
		<u>Output</u> :			
		Jumlah kegiatan	1	1	100.00
5.22	MONITORING DAN EVALUASI-BALAI	<u>Input</u> :			
		Dana	13,440,000	13,440,000	100.00
		<u>Output</u> :			
		jumlah kegiatan	5	5	100.00
5.23	PERTEMUAN ADVOKASI KELEMBAGAAN DESA	<u>Input</u> :			
		Dana	19,280,000	19,127,000	99.21
		<u>Output</u> :			
		Jumlah peserta pertemuan	30	30	100.00

PROGRAM/ KEGIATAN/		INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
5.24	WORKSHOP KEAMANAN PANGAN	Input : Dana	12,404,000	10,690,900	86.19
		Output : Jumlah peserta yang mengikuti workshop	2	2	100.00
5.25	BIMTEK KADER KEAMANAN PANGAN DESA	Input : Dana	37,250,000	36,297,000	97.44
		Output : Jumlah peserta yang di bimtek	50	50	100.00
5.26	GAP ASSES MEN KEAMANAN PANGAN	Input : Dana	20,820,000	20,795,000	99.88
		Output : Jumlah Desa yang dilakukan GAP Assesmen	3	3	100.00
5.27	BIMTEK KOMUNITAS KEAMANAN PANGAN DESA	Input : Dana	70,650,000	70,423,000	99.68
		Output : Jumlah peserta yang diberikan Bimtek	150	150	100.00
5.28	FASILITASI KEAMANAN PANGAN DESA	Input : Dana	20,820,000	20,815,000	99.98
		Output : Jumlah Desa yang dilakukan fasilitasi	3	3	100.00
5.29	LOMBA DESA PANGAN AMAN	Input : Dana	20,140,000	-	-
		Output : Jumlah Desa yang dilakukan fasilitasi			#DIV/0!
5.30	EVALUASI BIDANG SERLIK	Input : Dana	4,950,000	4,070,000	82.22
		Output : Jumlah evaluasi yang dilakukan di bidang serlik	9	9	100.00
5.31	PERTEMUAN EVALUASI NASIONAL DI PALEMBANG	Input : Dana	9,718,000	7,967,700	81.99
		Output : Jumlah peserta pertemuan sebagai peserta tambahan dari bidang serlik	1	1	100.00
5.32	IN HOUSE TRAINING/DISEMINASI HASIL PELATIHAN/PERTEMUAN	Input : Dana	5,500,000	5,445,000	99.00
		Output : Jumlah kegiatan	10	10	100.00
6.1	PENGADAAN ALAT LABORATORIUM	Input : Dana	9,279,000,000	9,239,595,300	99.58
		Output : Jumlah kegiatan	48	48	100.00
6.2	PENGADAAN PAKAIAN SERAGAM	Input : Dana	100,000,000	100,000,000	100.00
		Output : Jumlah kegiatan	1	1	100.00
6.3	ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	Input : Dana	50,000,000	43,149,900	86.30
		Output : Jumlah kegiatan	1	1	100.00
6.4	PENGADAAN BUKU PERPUSTAKAAN	Input : Dana	30,000,000	-	-
		Output : Jumlah buku yang diadakan	-	-	#DIV/0!
6.5	PENGADAAN JARINGAN PIPA GAS	Input : Dana	180,000,000	179,861,000	99.92
		Output : Jumlah kegiatan	1	1	100.00

Pengukuran Kinerja Kegiatan

PROGRAM/ KEGIATAN/		INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
6.6	PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL	<u>Input</u> :			
		Dana	308,000,000		-
		<u>Output</u> :			
		Jumlah Kendaraan yang diadakan	-	-	#DIV/0!
6.7	PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA	<u>Input</u> :			
		Dana	300,000,000	258,813,102	86.27
		<u>Output</u> :			
		Jumlah APD yang diadakan	35	35	100.00
6.8	PENGADAAN MEUBELAIR	<u>Input</u> :			
		Dana	284,400,000	-	-
		<u>Output</u> :			
		Jumlah Meubelair yang diadakan	-	-	#DIV/0!
6.9	PENGADAAN PERALATAN PERKANTORAN	<u>Input</u> :			
		Dana	122,200,000	120,980,000	99.00
		<u>Output</u> :			
		Jumlah Peralatan Perkantoran yang diadakan	33	33	100.00
6.10	PENGADAAN INSTALASI AIR	<u>Input</u> :			
		Dana	33,400,000	33,300,000	99.70
		<u>Output</u> :			
		Jumlah Peralatan Perkantoran yang diadakan	1	1	100.00
6.11	RENOVASI GEDUNG KANTOR DAN LAB	<u>Input</u> :			
		Dana	630,000,000	575,133,200	91.29
		<u>Output</u> :			
		Jumlah Peralatan Perkantoran yang diadakan	900	900	100.00
7.1	AUDIT SURVEILAN QMS ISO 9001	<u>Input</u> :			
		Dana	6,400,000	6,400,000	100.00
		<u>Output</u> :			
		Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi	30	30	100.00
7.2	AUDIT INTERNAL QMS ISO 9001	<u>Input</u> :			
		Dana	7,150,000	7,150,000	100.00
		<u>Output</u> :			
		Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi	30	30	100.00
7.3	AWERNESS QMS ISO 9001	<u>Input</u> :			
		Dana	2,200,000	2,200,000	100.00
		<u>Output</u> :			
		Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi	40	40	100.00
7.4	KAJI ULANG DOKUMEN QMS ISO 9001: 2008	<u>Input</u> :			
		Dana	3,300,000	3,300,000	100.00
		<u>Output</u> :			
		Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi	20	20	100.00
7.5	TINJAUAN MANAJEMEN	<u>Input</u> :			
		Dana	20,500,000	19,500,000	95.12
		<u>Output</u> :			
		Jumlah Dokumen yang dihasilkan	1	1	100.00
7.6	PENINGKATAN KOMPETENSI MR DAN AUDITOR INTERNAL QMS ISO 9001	<u>Input</u> :			
		Dana	31,536,000	28,132,710	89.21
		<u>Output</u> :			
		Jumlah Peserta yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi MR dan Auditor Internal QMS ISO 9001	3	3	100.00
7.7	RAPAT KERJA NASIONAL DI MATARAM	<u>Input</u> :			
		Dana	29,632,000	24,943,200	84.18
		<u>Output</u> :			
		Jumlah Peserta yang Mengikuti Rapat Kerja Nasional di Mataram	6	6	100.00

PROGRAM/ KEGIATAN/		INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
7.8	PERTEMUAN EVALUASI NASIONAL DIPALEMBANG	Input : Dana	38,570,000	28,915,999	74.97
		Output : Jumlah Peserta yang Mengikuti Pertemuan Evaluasi Nasional di Palembang	4	4	100.00
7.9	RAPAT KOORDINASI NASIONAL IMPLEMENTASI SPIP BADAN POM	Input : Dana	11,312,000	9,432,000	83.38
		Output : Jumlah Peserta Mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Implementasi SPIP Badan POM	2	2	100.00
7.10	EVALUASI IMPLEMENTASI SPIP	Input : Dana	8,324,000	8,324,000	100.00
		Output : Jumlah Peserta Mengikuti Evaluasi Implementasi SPIP	10	10	100.00
7.11	EVALUASI PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK/WBBM	Input : Dana	6,300,000	6,020,000	95.56
		Output : Jumlah Peserta Mengikuti rapat Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM	90	86	95.56
7.12	SOSIALISASI PENGUATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS BPOM	Input : Dana	7,000,000	6,370,000	91.00
		Output : Jumlah Pegawai yang mengikuti rapat Sosialisasi Penguatan Pengawasan dan Akuntabilitas BPOM	100	91	91.00
7.13	PENYUSUNAN PROGRAM RKAKL DAN DIPA (2 Dokumen)	Input : Dana	18,422,000	18,422,000	100.00
		Output : Dokumen RKAKL dan DIPA BBPOM di Denpasar	2	2	100.00
7.14	PENYUSUNAN LAKIP (1 Dokumen)	Input : Dana	9,850,000	9,850,000	100.00
		Output : Dokumen LAKIP BBPOM di Denpasar	1	1	100.00
7.15	PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN (1 Dokumen)	Input : Dana	9,850,000	9,653,000	98.00
		Output : Dokumen LAPTAH BBPOM di Denpasar	1	1	100.00
7.16	PENYUSUNAN LAPORAN BMN DAN SAKPA	Input : Dana	1,265,000	1,265,000	100.00
		Output : Dokumen Laporan BMN dan SAKPA BBPOM di Denpasar	2	2	100.00
7.17	PENYELENGGARAAN PENILAIAN JABATAN FUNGSIONAL (2 DOKUMEN)	Input : Dana	89,950,000	88,955,000	98.89
		Output : Dokumen Hasil Penilaian Pejabat Fungsional	2	2	100.00
7.18	PENYELENGGARAAN PENILAIAN DISIPLIN PEGAWAI	Input : Dana	2,860,000	2,200,000	76.92
		Output : Dokumen Hasil Penilaian Disiplin Pegawai	1	1	100.00
7.19	PEMBINAAN ADMINISTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN	Input : Dana	6,450,000	6,448,400	99.98
		Output : Jumlah Peserta Mengikuti rapat Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	32	32	100.00
7.20	KAJIAN PELAKSANAAN RENSTRA 2015-2019	Input : Dana	1,650,000	1,320,000	80.00
		Output : Dokumen Renstra	1	1	100.00

Pengukuran Kinerja Kegiatan

PROGRAM/ KEGIATAN/		INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
7.21	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI	Input :			
		Dana	25,986,000	23,980,800	92.28
		Output :			
		Jumlah Peserta Mengikuti Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	3	3	100.00
7.22	PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	Input :			
		Dana	4,330,000	4,220,000	97.46
		Output :			
		Jumlah Peserta Mengikuti Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	23	23	100.00
7.23	PENGELOLAAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN (SAK)	Input :			
		Dana	26,400,000	26,400,000	100.00
		Output :			
		Laporan Pengelolaan SAK	1	1	100.00
7.24	ADMINISTRASI KEGIATAN	Input :			
		Dana	738,872,000	703,652,048	95.23
		Output :			
		Laporan Administrasi Kegiatan	1	1	100.00
7.25	PENINGKATAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI PEGAWAI	Input :			
		Dana	32,275,000	30,425,000	94.27
		Output :			
		Jumlah Pegawai yang mengikuti Peningkatan Kesehatan Jasmani dan Rohani Pegawai	128	121	94.53
7.26	PEMBAHASAN OPTIMALISASI, EVALUASI DAN PELAPORAN KINERJA TATA USAHA	Input :			
		Dana	7,590,000	7,590,000	100.00
		Output :			
		Jumlah Pegawai yang mengikuti Pembahasan Optimalisasi, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Tata Usaha	23	23	100.00
7.27	WORKSHOP SDM DI JAKARTA	Input :			
		Dana	17,214,000	15,696,700	91.19
		Output :			
		Jumlah Pegawai yang Mengikuti Workshop SDM di Jakarta	2	2	100.00
7.28	DIKLAT PRA JABATAN	Input :			
		Dana	78,242,000	69,939,290	89.39
		Output :			
		Jumlah Pegawai yang Mengikuti Diklat Pra Jabatan	9	9	100.00
7.29	PENGELOLAAN BMN	Input :			
		Dana	14,400,000	14,400,000	100.00
		Output :			
		Laporan Pengelolaan BMN	1	1	100.00
7.30	PEMUTAHIRAN DATA BMN DI JAKARTA	Input :			
		Dana	15,100,000	15,088,600	99.92
		Output :			
		Jumlah Peserta yang Mengikuti Pelatihan	3	3	100.00
7.31	SOSIALISASI PENGELOLAAN BMN DI JAKARTA	Input :			
		Dana	12,570,000	11,273,600	89.69
		Output :			
		Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi	2	2	100.00
7.32	PEMUSNAHAN RETAIN SAMPEL &	Input :			
		Dana	6,300,000	6,300,000	100.00
		Output :			
		Jumlah Peserta yang mengikuti Pemusnahan Retain Sampel & Bahan Berbahaya	15	15	100.00

PROGRAM/ KEGIATAN/		INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
7.33	KOORDINASI DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA PERENCANAAN/EVALUASI KEUANGAN	Input : Dana	13,464,000	12,447,152	92.45
		Output : Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi dalam rangka Peningkatan kinerja Perencanaan/Evaluasi Keuangan	1	1	100.00
7.34	KOORDINASI DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA PENGURUSAN KEPANGKATAN/ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	Input : Dana	13,464,000	11,581,750	86.02
		Output : Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi dalam rangka Peningkatan kinerja Perencanaan/Evaluasi Keuangan	1	1	100.00
7.35	IN HOUSE TRAINING/DESIMINASI HASIL PELATIHAN SUB BAG TU	Input : Dana	11,000,000	10,945,000	99.50
		Output : Jumlah Peserta yang mengikuti In House Training/Desiminasi Hasil Pelatihan Sub Bag TU	10	10	100.00
7.36	KOORDINASI KEPEGAWAIAN DI SURABAYA	Input : Dana	4,090,000	4,089,900	100.00
		Output : Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi antar Balai di Surabaya	1	1	100.00
7.37	KOORDINASI ANTAR BALAI	Input : Dana	30,900,000	27,740,900	89.78
		Output : Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi antar Balai	5	5	100.00
7.38	PENINGKATAN KOMPETENSI WBK DI SEMARANG	Input : Dana	10,694,000	9,822,600	91.85
		Output : Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi antar Balai di Surabaya	2	2	100.00
7.39	KOORDINASI ANTAR BALAI	Input : Dana	60,300,000	51,843,900	85.98
		Output : Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi antar Balai	11	11	100.00
7.40	KOORDINASI ANTAR BALAI DI PONTIANAK	Input : Dana	21,300,000	21,174,600	99.41
		Output : Jumlah Peserta yang mengikuti Koordinasi antar Balai ke Pontianak	3	3	100.00
7.41	WORKSHOP KEARSIPAN DI JAKARTA	Input : Dana	6,120,000	6,106,200	99.77
		Output : Jumlah Peserta yang mengikuti workshop kearsipan di Jakarta	2	2	100.00
7.42	PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN	Input : Dana	7,059,851,000	6,841,021,297	96.90
		Output : Jumlah Bulan pembayaran Gaji	12	12	100.00
7.43	PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN (LEMBUR)	Input : Dana	100,000,000	94,979,000	94.98
		Output : Jumlah bulan lembur yang dilaksanakan	12	12	100.00
7.44	OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN	Input : Dana	848,104,000	842,821,350	99.38
		Output : Jumlah orang yang menerima honor	26	26	100.00
7.45	SEWA JARINGAN TELEKOMUNIKASI	Input : Dana	40,320,000	40,120,005	99.50
		Output : Paket Sewa jaringan telekomunikasi	1	1	100.00

PROGRAM/ KEGIATAN/		INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
7.46	KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN	<u>Input</u> :			
		Dana	119,670,000	118,492,220	99.02
		<u>Output</u> :			
		Terpenuhinya keperluan perkantoran pegawai	102	102	100.00
7.47	PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4	<u>Input</u> :			
		Dana	120,000,000	119,641,165	99.70
		<u>Output</u> :			
		Jumlah mobil yang dilakukan pemeliharannya	9	9	100.00
7.48	PERAWATAN KENDARAAN RODA 2	<u>Input</u> :			
		Dana	6,000,000	6,000,000	100.00
		<u>Output</u> :			
		Jumlah Motor yang dilakukan pemeliharannya	6	6	100.00
7.49	LANGGANAN LISTRIK	<u>Input</u> :			
		Dana	649,584,000	648,259,062	99.80
		<u>Output</u> :			
		Paket langganan listrik	1	1	100.00
7.50	LANGGANAN TELEPON	<u>Input</u> :			
		Dana	26,000,000	25,203,179	96.94
		<u>Output</u> :			
		Paket langganan telepon	1	1	100.00
7.51	LANGGANAN AIR	<u>Input</u> :			
		Dana	18,500,000	17,644,760	95.38
		<u>Output</u> :			
		Paket pembayaran langganan air	1	1	100.00
7.52	PERAWATAN GEDUNG KANTOR	<u>Input</u> :			
		Dana	222,615,000	212,097,940	95.28
		<u>Output</u> :			
		Paket perawatan gedung kantor	1	1	100.00
7.53	PEMELIHARAAN IPAL	<u>Input</u> :			
		Dana	50,000,000	50,000,000	100.00
		<u>Output</u> :			
		Paket pemeliharaan IPAL	1	1	100.00
7.54	PEMELIHARAAN ALAT LABORATORIUM	<u>Input</u> :			
		Dana	49,000,000	46,805,000	95.52
		<u>Output</u> :			
		Paket pemeliharaan alat laboratorium	1	1	100.00
7.55	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN PRASARANA OPERASI	<u>Input</u> :			
		Dana	28,000,000	27,982,000	99.94
		<u>Output</u> :			
		Paket pemeliharaan peralatan dan prasarana operasi	1	1	100.00
7.56	PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	<u>Input</u> :			
		Dana	87,025,000	81,323,500	93.45
		<u>Output</u> :			
		Paket pemeliharaan peralatan kantor	1	1	100.00
7.57	SEWA RUMAH DINAS	<u>Input</u> :			
		Dana	85,000,000	85,000,000	100.00
		<u>Output</u> :			
		Paket sewa rumah dinas	1	1	100.00

PENGUKURAN EFISIENSI KEGIATAN  
BALAI BESAR POM DI DENPASAR  
TAHUN 2016

SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET		IE	SE	KATEGORI	TE	
			INPUT	OUTPUT					
MENGUATNYA SISTEM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	MENINGKATNYA KUALITAS SAMPLING DAN PENGIJIAN TERHADAP PRODUK OBAT DAN MAKANAN YANG BEREDAR	1.1	PENYUSUNAN PERENCANAAN SAMPLING	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-
		1.2	PENGADAAN SAMPEL	97.33	100.00	1.03	1.00	Efisien	0.03
		1.3	PENGUJIAN LABORATORIUM SAMPEL OBAT, OT, KOSMETIK, PK, PANGAN, KEMASAN PANGAN & PKRT	86.86	100.00	1.15	1.00	Efisien	0.15
		1.4	EVALUASI PENGIJIAN	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-
		1.5	PENINGKATAN SISTEM MUTU LABORATORIUM	99.84	100.00	1.00	1.00	Efisien	0.00
		1.6	KALIBRASI ALAT LABORATORIUM (1 DOKUMEN)	97.81	100.00	1.02	1.00	Efisien	0.0224
		1.7	VERIFIKASI VOLUMETRIK INTERNAL DAN CEK ANTARA TIMBANGAN	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-
		1.8	VERIFIKASI METODE ANALISA	99.93	100.00	1.00	1.00	Efisien	0.0007
		1.9	AUDIT INTERNAL SISTEM MUTU OLEH KJM DI DENPASAR (1 DOKUMEN)	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-
		1.10	ASESMEN PENERAPAN PROGRAM LAB RUJUKAN/UNGGULAN DAN PENERAPAN SISTEM MUTU	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-
		1.11	PENGEMBANGAN BAKU PEMBANDING SEKUNDER DAN BAKU KERJA	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-
		1.12	PEMBAHASAN HASIL UJI KOLABORASI BAKU PEMBANDING DI JAKARTA	82.97	100.00	1.21	1.00	Efisien	0.2053
		1.13	FORUM DISKUSI PENINGKATAN SISTEM JEJARING PENGIJIAN DI BADAN POM DI JAKARTA	99.99	100.00	1.00	1.00	Efisien	0.0001
		1.14	KAJI ULANG MANAJEMEN DAN TEKNIS LABORATORIUM	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-
		1.15	KAJI ULANG DOKUMEN SISTEM MUTU	95.44	100.00	1.05	1.00	Efisien	0.0478
		1.16	EVALUASI TEKNIS PENGIJIAN MELALUI UJI PROFISIENSI/UJI BANDING DAN UJI PETIK DI BBPOM/BPOM	97.45	100.00	1.03	1.00	Efisien	0.0262
		1.17	PENGEMBANGAN METODE ANALISIS	99.02	100.00	1.01	1.00	Efisien	0.0099
		1.18	FORUM DISKUSI TEKNIS PENGIJIAN LABORATORIUM BADAN POM DI JAKARTA	86.80	100.00	1.15	1.00	Efisien	0.1521
		1.19	PEKAN ILMIAH DI YOGJAKARTA	87.7	100.00	1.14	1.00	Efisien	0.1403
		1.20	PENGADAAN MAKANAN MINUMAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH PNS	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-
		1.21	FINALISASI PEDOMAN SAMPLING 2017	89.70	100.00	1.11	1.00	Efisien	0.1148
		1.22	REKREDITASI LABORATORIUM	91.67	100.00	1.09	1.00	Efisien	0.0909
		1.23	PEMERIKSAAN KESEHATAN RESIKO PEKERJAAN	96.53	100.00	1.04	1.00	Efisien	0.0359
		1.24	PENGAMANAN MAKANAN TAMU NEGARA	93.76	97.96	1.04	1.00	Efisien	0.0448
		1.25	PENYELENGGARAAN LABORATORIUM	99.97	100.00	1.00	1.00	Efisien	0.0003
		1.26	PENGADAAN TRIPLE AXIS ELECTRON MULTIPLIER	99.92	100.00	1.00	1.00	Efisien	0.00
		1.27	PENGADAAN GRAFITE TUBE	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-
		1.28	PENGADAAN ALAT GELAS	99.89	100.00	1.00	1.00	Efisien	0.00
		1.29	PENGADAAN SUKU CADANG	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-
		1.30	PENGADAAN BUFFER STOCK	99.52	100.00	1.00	1.00	Efisien	0.00
		1.31	PELATIHAN ANALISIS SECARA KROMATOGRAFI PRODUK TERAPETIK DAN NAPZA, HPLC	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-
		1.32	PELATIHAN ANALISIS KOSMETIK, OBAT TRADISIONAL DAN PRODUK KOMPLEMEN HPLC	99.20	100.00	1.01	1.00	Efisien	0.01
		1.33	PELATIHAN ANALISIS AAS DAN GC UNTUK BB/BPOM	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-
		1.34	PELATIHAN ANALISIS BAKU PEMBANDING DI JAKARTA	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-
		1.35	PELATIHAN KALIBRASI DAN CEK ANTARA DI JAKARTA	78.33	100.00	1.28	1.00	Efisien	0.28
		1.36	BIMBINGAN TEKNIS JAMINAN MUTU HASIL PENGIJIAN	99.96	100.00	1.00	1.00	Efisien	0.00

SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET		IE	SE	KATEGORI	TE
			INPUT	OUTPUT				
		1.37 MAGANG DI PPOMN DALAM RANGKA KOMPETENSI PENGUJI DI LABORATORIUM PENGUJIAN KOSMETIK, OBAT TRADISIONAL DAN PRODUK KOMPLEMEN	88.84	100.00	1.13	1.00	Efisien	0.13
		1.38 MAGANG DI PPOMN DALAM RANGKA KOMPETENSI PENGUJI DI LABORATORIUM PENGUJIAN PRODUK TERAPETIK DAN NAPZA	86.60	100.00	1.15	1.00	Efisien	0.15
		1.39 PENINGKATAN KOMPETENSI PENGUJI DI LABORATORIUM PENGUJIAN PRODUK PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA	72.63	100.00	1.38	1.00	Efisien	0.38
		1.40 MAGANG DI PPOMN DALAM RANGKA PENINGKATAN KOMPETENSI PENGUJI DI LABORATORIUM PENGUJIAN PANGAN DAN MIKROBIOLOGI	79.49	100.00	1.26	1.00	Efisien	0.26
		1.41 PELATIHAN NILAI KETIDAKPASTIAN DI JAKARTA	93.12	100.00	1.07	1.00	Efisien	0.07
		1.42 PELATIHAN AUDITOR SISTEM MUTU	96.41	100.00	1.04	1.00	Efisien	0.04
		1.43 PELATIHAN INTERNAL PENGUJIAN OBAT TRADISIONAL DENGAN INSTRUMEN	97.89	100.00	1.02	1.00	Efisien	0.02
		1.44 PELATIHAN INTERNAL PENGUJIAN TERAPETIK DENGAN INSTRUMEN	97.72	100.00	1.02	1.00	Efisien	0.02
		1.45 PELATIHAN INTERNAL PENGUJIAN KOSMETIK DENGAN INSTRUMEN	97.82	100.00	1.02	1.00	Efisien	0.02
		1.46 PELATIHAN INTERNAL PENGUJIAN PENGUJIAN NAPZA DENGAN INSTRUMEN	92.42	100.00	1.08	1.00	Efisien	0.08
		1.47 PELATIHAN INTERNAL PENGUJIAN PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA DENGAN INSTRUMEN	85.21	100.00	1.17	1.00	Efisien	0.17
		1.48 PELATIHAN INTERNAL PENGUJIAN MIKROBIOLOGI	99.17	100.00	1.01	1.00	Efisien	0.01
		1.49 PELATIHAN INTERNAL UJI DISOLUSI	95.96	100.00	1.04	1.00	Efisien	0.0421
		1.50 PELATIHAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	89.96	100.00	1.11	1.00	Efisien	0.1116
		1.51 PELATIHAN APLIKASI SOFTWARE INSTRUMEN PENGUJIAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KOMPETENSI PENGUJI/USER	92.80	100.00	1.08	1.00	Efisien	0.0776
		1.52 PELATIHAN CORRECTIVE ACTION DAN PREVENTIV ACTION (CAPA) SESUAI PERSYARATAN ISO 17025 DI JAKARTA	93.13	100.00	1.07	1.00	Efisien	0.0738
		1.53 PELATIHAN TEKNIK INVESTIGASI DAN UPAYA TINDAK LANJUT HASIL UJI PROFISIENSI	90.06	100.00	1.11	1.00	Efisien	0.1104
		1.54 PELATIHAN UNDERSTANDING AND DEVELOPING OF ISO/IEC 17025	86.80	100.00	1.15	1.00	Efisien	0.1521
		1.55 PELATIHAN CONTINUOUS IMPROVEMENT FOR LEADING LABORATORY DI JAKARTA	99.99	100.00	1.00	1.00	Efisien	0.0001
		1.56 PELATIHAN MANAGEMENT REVIEW DI JAKARTA	99.73	100.00	1.00	1.00	Efisien	0.0027
		1.57 PELATIHAN DESIGN DAN PERHITUNGAN STATISTIK DATA UJI BANDING DUA LABORATORIUM DAN UJI BANDING ANTAR ANALIS	99.85	100.00	1.00	1.00	Efisien	0.0015
		1.58 ESTIMASI KETIDAKPASTIAN PENGUKURAN UNTUK UJI MIKROBIOLOGI	88.18	100.00	1.13	1.00	Efisien	0.1340
		1.59 PELATIHAN IT	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-
		1.60 IN HOUSE TRAINING	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-
		1.61 BENCH MARK LINTAS SEKTOR	85.88	100.00	1.16	1.00	Efisien	0.1644
	MENINGKATKAN KUALITAS SARANA PRODUKSI YANG MEMENUHI STANDAR	2.1 PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN OLEH PETUGAS BALAI (DALAM KOTA) DI PROVINSI BALI (64 SARANA)	99.71	100.00	1.00	1.00	Efisien	0.00
		2.2 PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN OLEH PETUGAS BALAI (DI LUAR KOTA) DI PROVINSI BALI (140 SARANA)	98.78	100.00	1.01	1.00	Efisien	0.01
		2.3 SOSIALISASI PERATURAN DI BIDANG PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN	-	-	#DIV/0!	1.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		2.4 DESIMINASI HASIL PELATIHAN	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-

SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET		IE	SE	KATEGORI	TE
			INPUT	OUTPUT				
		2.5 PELATIHAN CPOTB DASAR DI JAKARTA	75.82	100.00	1.32	1.00	Efisien	0.32
		2.6 PELATIHAN CPOTB LANJUTAN DI JAKARTA	75.02	100.00	1.33	1.00	Efisien	0.33
		2.7 PELATIHAN CPOTB TOPIK KHUSUS DI JAKARTA	70.31	100.00	1.42	1.00	Efisien	0.42
		2.8 JOINT INSPECTION DI SEMARANG	82.55	100.00	1.21	1.00	Efisien	0.21
		2.9 AUDIT DALAM RANGKA PRA SERTIFIKASI/SERTIFIKASI/REGISTRASI DAN HALAL	71.84	100.00	1.39	1.00	Efisien	0.39
		2.10 AUDIT CALON PENERIMA PIAGAM BINTANG KEAMANAN PANGAN (PBKP)	98.85	100.00	1.01	1.00	Efisien	0.01
		2.11 AUDIT SURVEILAN PENERIMA PIAGAM BINTANG KEAMANAN PANGAN (PBKP)	96.67	100.00	1.03	1.00	Efisien	0.03
		2.12 WORKSHOP ASPEK BANGUNAN, FASILITAS DAN PERALATAN INDUSTRI KOSMETIK DAN OBAT TRADISIONAL BAGI PETUGAS PUSAT DAN BALAI	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-
		2.13 BIMTEK CPKB DALAM RANGKA PELAYANAN PUBLIK BAGI PETUGAS DAERAH	96.80	100.00	1.03	1.00	Efisien	0.03
		2.14 IMPLEMENTASI PROGRAM PENGAWASAN PRODUK DAN BAHAN BERBAHAYA	91.99	100.00	1.09	1.00	Efisien	0.09
	MENINGKATKAN KUALITAS SARANA DISTRIBUSI YANG MEMENUHI STANDAR	3.1 PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI PRODUK OBAT DAN MAKANAN OLEH PETUGAS BALAI (DI DALAM KOTA) DI PROVINSI BALI ( 228 SARANA)	99.90	100.00	1.00	1.00	Efisien	0.00
		3.2 PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI PRODUK OBAT DAN MAKANAN OLEH PETUGAS BALAI (DI LUAR KOTA) DI PROVINSI BALI ( 619 SARANA)	98.97	102.75	1.04	1.00	Efisien	0.04
		3.3 PENGAWASAN PENANDAAN OBAT DAN MAKANAN	73.83	100.00	1.35	1.00	Efisien	0.35
		3.4 PENGAWASAN PERIKLANAN OBAT DAN MAKANAN	98.95	120.86	1.22	1.00	Efisien	0.22
		3.5 PENGAWASAN DALAM RANGKA INTENSIFIKASI/PENERTIBAN PASAR	98.93	100.00	1.01	1.00	Efisien	0.01
		3.6 PENGAWASAN DALAM RANGKA TINDAK LANJUT PENGADUAN KONSUMEN	98.90	100.00	1.01	1.00	Efisien	0.01
		3.7 PENGAWASAN SARANA PRODUKSI/ DISTRIBUSI PRODUK FORTIFIKASI	98.83	100.00	1.01	1.00	Efisien	0.01
		3.8 KOORDINASI PENGAWASAN LINTAS SEKTOR (PNP)	99.13	100.00	1.01	1.00	Efisien	0.01
		3.9 RAPAT KONSULTASI NASIONAL PENGAWASAN OT, KOSMETIK DAN SM 2016 DI JAKARTA	83.74	100.00	1.19	1.00	Efisien	0.19
		3.10 FORUM EVALUASI SAMPLING 2016 DAN PENYUSUNAN RENCANA SAMPLING 2017 DI JAKARTA	86.74	100.00	1.15	1.00	Efisien	0.15
		3.11 KONSULTASI PENGAWASAN	-	-	#DIV/0!	1.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		3.12 KOORDINASI UNTUK PENINGKATAN KINERJA	77.70	100.00	1.29	1.00	Efisien	0.29
		3.13 SOSIALISASI PERATURAN DI BIDANG DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN (PNP)	49.66	50.00	1.01	1.00	Efisien	0.01
		3.14 BIMBINGAN TEKNIS INSPEKTUR JUNIOR DI JAKARTA	89.53	100.00	1.12	1.00	Efisien	0.12
		3.15 BIMBINGAN TEKNIS INSPEKTUR KEPALA DI JAKARTA	90.11	100.00	1.11	1.00	Efisien	0.11
		3.16 BIMBINGAN TEKNIS INSPEKTUR SENIOR DI JAKARTA	86.23	100.00	1.16	1.00	Efisien	0.16
		3.17 PELATIHAN PENGAWASAN PEREDARAN OT DAN SM DI BOGOR	88.14	100.00	1.13	1.00	Efisien	0.13
		3.18 PELATIHAN PENGAWASAN PERIKLANAN DAN PELABELAN PANGAN DI JAKARTA	75.30	100.00	1.33	1.00	Efisien	0.33
		3.19 PELATIHAN INTERNAL CDOB	-	-	#DIV/0!	1.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		3.20 AUDIT SKI / SKE	98.20	100.00	1.02	1.00	Efisien	0.02

SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET		IE	SE	KATEGORI	TE	
			INPUT	OUTPUT					
	JUMLAH PERKARA DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN	4.1	PENGUMPULAN BAHAN KETERANGAN, VERIFIKASI INFORMASI DAN RENCANA INVESTIGASI AWAL (DK)	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-
4.2		PELAKSANAAN INVESTIGASI AWAL	93.54	100.00	1.07	1.00	Efisien	0.07	
4.3		EVALUASI INVESTIGASI AWAL, GELAR KASUS DAN PELAPORAN HASIL INVESTIGASI (DK)	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-	
4.4		RAPAT PEMBAHASAN RENCANA PENYIDIKAN, SKENARIO PENINDAKAN DAN OLAH TKP (DK)	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-	
4.5		PENINDAKAN (DK)	93.66	100.00	1.07	1.00	Efisien	0.07	
4.6		OPERASI KHUSUS (TERMASUK SATGAS) (DK)	76.19	100.00	1.31	1.00	Efisien	0.31	
4.7		PEMBERKASAN (DK)	85.11	166.67	1.96	1.00	Efisien	0.96	
4.8		KONSULTASI PENYELESAIAN BERKAS PERKARA	85.11	166.67	1.96	1.00	Efisien	0.96	
4.9		PENASEHAT HUKUM	85.11	166.67	1.96	1.00	Efisien	0.96	
4.10		DISEMINASI HASIL KEGIATAN PPNS	85.11	166.67	1.96	1.00	Efisien	0.96	
4.11		PENGUMPULAN BAHAN KETERANGAN, VERIFIKASI INFORMASI DAN RENCANA INVESTIGASI AWAL (LK)	78.57	78.57	1.00	1.00	Efisien	-	
4.12		PELAKSANAAN INVESTIGASI AWAL (LK)	93.26	100.00	1.07	1.00	Efisien	0.07	
4.13		EVALUASI INVESTIGASI AWAL, GELAR KASUS DAN PELAPORAN HASIL INVESTIGASI (LK)	78.57	78.57	1.00	1.00	Efisien	-	
4.14		PEMBAHASAN RENCANA PENYIDIKAN, SKENARIO PENINDAKAN DAN OLAH TKP (LK)	57.14	57.14	1.00	1.00	Efisien	-	
4.15		PENINDAKAN (LK)	88.62	100.00	1.13	1.00	Efisien	0.13	
4.16		OPERASI KHUSUS (TERMASUK SATGAS) (LK)	90.46	100.00	1.11	1.00	Efisien	0.11	
4.17		OPERASI DI PERBATASAN	96.47	100.00	1.04	1.00	Efisien	0.04	
4.18		PEMBERKASAN (LK)	86.30	71.43	0.83	1.00	Tidak Efisien	(0.17)	
4.19		KONSULTASI PENYELESAIAN BERKAS PERKARA	-	-	#DIV/0!	1.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
4.20		PENASEHAT HUKUM	-	-	#DIV/0!	1.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
4.21		PUBLIKASI HASIL OPERASI	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-	
4.22		PENGEMBANGAN PENYIDIKAN LINTAS PROVINSI	83.74	100.00	1.19	1.00	Efisien	0.19	
4.23		FORUM KOORDINASI PPNS BADAN POM	92.13	100.00	1.09	1.00	Efisien	0.09	
4.24		PENGEMBANGAN KINERJA PPNS	85.14	100.00	1.17	1.00	Efisien	0.17	
4.25		WORKSHOP RANCANGAN UNDANG UNDANG	78.00	100.00	1.28	1.00	Efisien	0.28	
4.26		PERTEMUAN PERKUATAN PEMANTAPAN OPERASI PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG	72.68	100.00	1.38	1.00	Efisien	0.38	
4.27		PENINGKATAN KINERJA PPNS	85.14	100.00	1.17	1.00	Efisien	0.17	
4.28		PERTEMUAN KOORDINASI LINTAS SEKTOR PENEGKAN HUKUM TINDAK PIDANA OBAT DAN MAKANAN	73.60	100.00	1.36	1.00	Efisien	0.36	
4.29		RAPAT KOORDINASI LINTAS SEKTOR	76.24	100.00	1.31	1.00	Efisien	0.31	
4.30		PEMUSNAHAN OMKABA TMK	90.45	100.00	1.11	1.00	Efisien	0.11	
4.31		PERJALANAN DALAM RANGKA PENEGAKAN HUKUM		98.68	100.00	1.01	1.00	Efisien	0.01
				95.45	95.45	1.00	1.00	Efisien	-
4.32		ADVOKASI DENGAN PENEGAK HUKUM	89.50	100.00	1.12	1.00	Efisien	0.12	
4.33		KONSULTASI DAN PENAMBAHAN WAWASAN PPNS	45.48	100.00	2.20	1.00	Efisien	1.20	
4.34		PENINGKATAN KEMAMPUAN MANAJERIAL PENYIDIKAN DI BOGOR	84.03	100.00	1.19	1.00	Efisien	0.19	
4.35	PENINGKATAN KEMAMPUAN PENYIDIKAN PPNS BADAN POM DI BOGOR	93.41	100.00	1.07	1.00	Efisien	0.07		

SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET		IE	SE	KATEGORI	TE	
			INPUT	OUTPUT					
		4.36	PENINGKATAN KOMPETENSI DASAR PPNS BADAN POM DI BOGOR	93.41	100.00	1.07	1.00	Efisien	0.07
		4.37	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBENTUKAN PPNS BPOM DI BOGOR	84.03	100.00	1.19	1.00	Efisien	0.19
		4.38	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INTELEGENT	93.41	100.00	1.07	1.00	Efisien	0.07
MENINGKATNYA KEMANDIRIAN PELAKU USAHA, KEMITRAAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT	MENINGKATNYA KERJASAMA, KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI	5.1	ADVOKASI /KOORDINASI BBPOM KE INSTANSI PEMERINTAH LAINNYA/STAKE HOLDER	99.06	100.00	1.01	1.00	Efisien	0.01
		5.2	PEMETAAN KASUS KERACUNAN KLB	99.11	100.00	1.01	1.00	Efisien	0.01
		5.3	OPERASIONAL SENTRA INFORMASI KERACUNAN (SIKER) DAN SURVEILAN KLB KERACUNAN PANGAN	99.70	100.00	1.00	1.00	Efisien	0.00
		5.4	PAMERAN PEMBANGUNAN 17 AGUSTUS BBPOM DI DENPASAR	99.85	100.00	1.00	1.00	Efisien	0.00
		5.5	PENYEBARAN INFORMASI PRODUK OBAT DAN MAKANAN	99.71	100.00	1.00	1.00	Efisien	0.00
		5.6	KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI	99.79	100.00	1.00	1.00	Efisien	0.00
		5.7	PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS SERLIK	88.41	100.00	1.13	1.00	Efisien	0.13
		5.8	PELATIHAN KEHUMASAN BAGI PETUGAS BALAI	99.27	100.00	1.01	1.00	Efisien	0.01
		5.9	KOORDINASI DAN DISEMINASI KEGIATAN BIDANG HUKUM DAN KEHUMASAN	91.85	100.00	1.09	1.00	Efisien	0.09
		5.10	PELATIHAN MEDSOS	86.27	100.00	1.16	1.00	Efisien	0.16
		5.11	PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS SERLIK KE SEMARANG	77.55	100.00	1.29	1.00	Efisien	0.29
		5.12	OPERASIONAL MOBIL LABORATORIUM KELILING	99.50	100.00	1.01	1.00	Efisien	0.01
		5.13	KAMPANYE DALAM RANGKA PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA	96.06	100.00	1.04	1.00	Efisien	0.04
		5.14	KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN KOMUNITAS	99.40	100.00	1.01	1.00	Efisien	0.01
		5.15	FASILITATOR PASAR AMAN DARI BAHAN BERBAHAYA (TOT FASILITATOR)	66.81	100.00	1.50	1.00	Efisien	0.50
		5.16	PENINGKATAN KOMPETENSI PETUGAS SERLIK	92.12	100.00	1.09	1.00	Efisien	0.09
		5.17	REORIENTASI KEAMANAN PANGAN BALAI	97.08	100.00	1.03	1.00	Efisien	0.03
		5.18	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN USAHA PANGAN DESA DI BIDANG KEAMANAN PANGAN-BALAI	99.06	100.00	1.01	1.00	Efisien	0.01
		5.19	MONITORING DAN EVALUASI-BALAI	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-
		5.20	PERTEMUAN ADVOKASI KELEMBAGAAN DESA	99.21	100.00	1.01	1.00	Efisien	0.01
		5.21	WORKSHOP KEAMANAN PANGAN	86.19	100.00	1.16	1.00	Efisien	0.16
		5.22	BIMTEK KADER KEAMANAN PANGAN DESA	97.44	100.00	1.03	1.00	Efisien	0.03
		5.23	GAP ASSESMEN KEAMANAN PANGAN	99.88	100.00	1.00	1.00	Efisien	0.00
		5.24	BIMTEK KOMUNITAS KEAMANAN PANGAN DESA	99.68	100.00	1.00	1.00	Efisien	0.00
		5.25	FASILITASI KEAMANAN PANGAN DESA	99.98	100.00	1.00	1.00	Efisien	0.00
		5.26	KIE DALAM RANGKA SOSIALISASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	-	-	#DIV/0!	1.00	#DIV/0!	#DIV/0!

SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/		RATA-RATA % CAPAIAN TARGET		IE	SE	KATEGORI	TE	
				INPUT	OUTPUT					
		5.27	FORUM ADVOKASI KOMITMEN PEMDA DAN LINTAS SEKTOR	-	-	#DIV/0!	1.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
		5.28	FORUM GROUP DISCUSSION DALAM RANGKA FORTIFIKASI PANGAN	-	-	#DIV/0!	1.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
		5.29	LOMBA DESA PANGAN AMAN	-	-	#DIV/0!	1.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
		5.30	EVALUASI BIDANG SERLIK	82.22	100.00	1.22	1.00	Efisien	0.22	
		5.31	PERTEMUAN EVALUASI NASIONAL DI PALEMBANG	81.99	100.00	1.22	1.00	Efisien	0.22	
		5.32	IN HOUSE TRAINING/DISEMINASI HASIL PELATIHAN/PERTEMUAN	99.00	100.00	1.01	1.00	Efisien	0.01	
MENINGKATKAN KUALITAS KAPASITAS KELEMBAGAAN BPOM	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA YANG TERKAIT PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	6.1	PENGADAAN ALAT LABORATORIUM	99.58	100.00	1.00	1.00	Efisien	0.00	
		6.2	PENGADAAN PAKAIAN SERAGAM	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-	
		6.3	ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG DAN JASA	86.30	100.00	1.16	1.00	Efisien	0.16	
		6.4	PENGADAAN BUKU PERPUSTAKAAN	-	-	#DIV/0!	1.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
		6.5	PENGADAAN JARINGAN PIPA GAS	99.92	100.00	1.00	1.00	Efisien	0.00	
		6.6	PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL	-	-	#DIV/0!	1.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
		6.7	PENGADAAN PERANGKAT PENGOLAH DATA	86.27	100.00	1.16	1.00	Efisien	0.16	
		6.8	PENGADAAN MUBELAIR	-	-	#DIV/0!	1.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
		6.9	PENGADAAN PERALATAN PERKANTORAN	99.00	100.00	1.01	1.00	Efisien	0.01	
		6.10	PENGADAAN INSTALASI AIR	99.70	100.00	1.00	1.00	Efisien	0.00	
		6.11	RENOVASI GEDUNG KANTOR DAN LAB	91.29	100.00	1.10	1.00	Efisien	0.10	
		PENYUSUNAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, KEUANGAN DAN EVALUASI YANG DILAPORKAN TEPAT WAKTU	7.1	AUDIT SURVEILAND OMS ISO 9001	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-
	7.2		AUDIT INTERNAL OMS ISO 9001	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-	
	7.3		AWERNESS OMS ISO 9001	100	100.00	1.00	1.00	Efisien	-	
	7.40		KAJI ULANG DOKUMEN OMS ISO 9001	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-	
	7.50		TINJAUAN MANAJEMEN	95.12	100.00	1.05	1.00	Efisien	0.05	
	7.6		PENINGKATAN KOMPETENSI MR DAN AUDITOR INTERNAL OMS ISO 9001	100	100.00	1.00	1.00	Efisien	-	
	7.7		RAKERNAS DIMATARAM	84.18	100.00	1.19	1.00	Efisien	0.19	
	7.8		PERTEMUAN EVALUASI NASIONAL DI PALEMBANG	74.97	100.00	1.33	1.00	Efisien	0.33	
	7.9		RAPAT KOORDINASI NASIONAL IMPELEMENTASI SPIP BADAN POM	83.38	100.00	1.20	1.00	Efisien	0.20	
	7.1		EVALUASI IMPLEMENTASI SPIP	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-	
	7.11		EVALUASI PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK/WBBM	95.56	95.56	1.00	1.00	Efisien	-	
	7.12		SOSIALISASI PENGUATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS BPOM	91.00	91.00	1.00	1.00	Efisien	-	
	7.13		PENYUSUNAN PROGRAM RKAKL DAN DIPA	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-	
	7.14		PENYUSUNAN LAKIP	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-	
	7.15		PENYUSUNAN LAPTAH	98.00	100.00	1.02	1.00	Efisien	0.02	
	7.16		PENYUSUNAN LAPORAN BMN DAN SAKPA	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-	
	7.17		PENILAIAN JABATAN FUNGSIONAL	98.89	100.00	1.01	1.00	Efisien	0.01	
	7.18		PENYELENGGARAAN PENILAIAN DISIPLIN PEGAWAI	76.92	100.00	1.30	1.00	Efisien	0.30	
	7.19		PEMBINAAN ADMINSTRASI DAN PENGELOLAAN KEUANGAN	99.98	100.00	1.00	1.00	Efisien	0.00	
	7.2		PENYUSUNAN RENSTRA 2015-2019	80.00	100.00	1.25	1.00	Efisien	0.25	
	7.21		PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASI	92.28	100.00	1.08	1.00	Efisien	0.08	
	7.22		PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	97.46	100.00	1.03	1.00	Efisien	0.03	
7.23	PENGELOLAAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN (SAK)		100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-		
7.24	ADMINISTRASI KEGIATAN	95.23	100.00	1.05	1.00	Efisien	0.05			

SASARAN STRATEGIS	SASARAN KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/	RATA-RATA % CAPAIAN TARGET		IE	SE	KATEGORI	TE	
			INPUT	OUTPUT					
		7.25	PENINGKATAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI	94.27	94.53	1.00	1.00	Efisien	0.00
		7.26	PEMBAHASAN OPTIMALISASI,EVALUASI DAN PELAPORAN KINERJA TATA USAHA	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-
		7.27	WORKSHOP SDM DI JAKARTA	91.19	100.00	1.10	1.00	Efisien	0.10
		7.28	DIKLAT PRAJABATAN	89.39	100.00	1.12	1.00	Efisien	0.12
		7.29	PENGELOLAAN BMN	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-
		7.3	PEMUTAHIRAN DATA BMN DAN SAKPA	99.92	100.00	1.00	1.00	Efisien	0.00
		7.31	SOSIALISASI PENGELOLAAN BMN DI JAKARTA	89.69	100.00	1.11	1.00	Efisien	0.11
		7.32	PEMUSNAHAN RETAIL SAMPEL & BAHAN BERBAHAYA	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-
		7.33	KOORDINASI DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA PERENCANAAN/EVALUASI KEUANGAN	92.45	100.00	1.08	1.00	Efisien	0.08
		7.34	KOORDINASI DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA PENGURUSAN KEPANGKATAN/ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	86.02	100.00	1.16	1.00	Efisien	0.16
		7.35	IN HOUSE TRAINING/DESIMINASI HASIL PELATIHAN SUB BAG TU	99.50	100.00	1.01	1.00	Efisien	0.01
		7.36	KOORDINASI ANTAR BALAI DI SURABAYA	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-
		7.37	KOORDINASI ANTAR BALAI.	89.78	100.00	1.11	1.00	Efisien	0.11
		7.38	PENINGKATAN KOMPETENSI WBK DI SEMARANG	91.85	100.00	1.09	1.00	Efisien	0.09
		7.39	KOORDINASI ANTAR BALAI	85.98	100.00	1.16	1.00	Efisien	0.16
		7.4	KOORDINASI ANTAR BALAI KE PONTIANAK	99.41	100.00	1.01	1.00	Efisien	0.01
		7.41	WORKSHOP KEARSIPAN DI JAKARTA	99.77	100.00	1.00	1.00	Efisien	0.00
		7.42	PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN	95.55	100.00	1.05	1.00	Efisien	0.05
		7.43	PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN (LEMBUR )	94.98	100.00	1.05	1.00	Efisien	0.05
		7.44	OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN	99.38	100.00	1.01	1.00	Efisien	0.01
		7.45	SEWA JARINGAN TELEKOMUNIKASI	99.50	100.00	1.01	1.00	Efisien	0.01
		7.46	KEPERLUAN SEHARI-HARI PERKANTORAN	99.02	100.00	1.01	1.00	Efisien	0.01
		7.47	PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4	99.70	100.00	1.00	1.00	Efisien	0.00
		7.48	PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 2	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-
		7.49	LANGGANAN LISTRIK	99.80	100.00	1.00	1.00	Efisien	0.00
		7.50	LANGGANAN TELPON	96.94	100.00	1.03	1.00	Efisien	0.03
		7.51	LANGGANAN AIR	95.38	100.00	1.05	1.00	Efisien	0.05
		7.52	PERAWATAN GEDUNG KANTOR	95.28	100.00	1.05	1.00	Efisien	0.05
		7.53	PEMELIHARAAN IPAL	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-
		7.54	PEMELIHARAAN ALAT LAB	95.52	100.00	1.05	1.00	Efisien	0.05
		7.55	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN PPRASARANA DAN OPERASI	99.94	100	1.00	1.00	Efisien	0.00
		7.56	PEMELIHARAAN PERALATAN KANTOR	93.45	100.00	1.07	1.00	Efisien	0.07
		7.57	SEWA RUMAH DINAS	100.00	100.00	1.00	1.00	Efisien	-

**PERSENTASE OBAT DAN MAKANAN  
MEMENUHI SYARAT ( Sesuai DO)  
BBPOM DI DENPASAR  
TAHUN 2016**

NO	KOMODITI ( Ijin Edar BPOM)	JUMLAH SAMPEL	TMS				% TMS	% MS
			KIMIA	MIKRO	KIMIA MIKRO	TOTAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Obat	700	8	0	0	8	1,14	98,86
	Obat yang disampling di IFK (dari 700 sampel)	174	2	0	0	2	1,15	98,85
2	Obat Tradisional	525	5	101	3	109	20,76	79,24
3	Kosmetik	1050	10	12	0	22	2,10	97,90
4	Suplemen Kesehatan	175	1	0	0	1	0,57	99,43
5	Makanan	793	49	9	0	58	7,31	92,69

## DATA AUDIT SERTIFIKASI TAHUN 2016

NO	KOMODITI	JUMLAH SARANA		KETERANGAN
		PRODUKSI	DISTRIBUSI	
1	OBAT	0	9	Audit sarana distribusi dalam rangka izin PBF, Sertifikasi CDOB dan Resertifikasi CDOB
2	PANGAN	26	3	Audit sarana produksi dalam rangka pendaftaran produk Makanan Dalam Negeri (MD)
				Audit sarana distribusi dalam rangka pendaftaran produk Makanan Luar Negeri (ML)
3	OBAT TRADISIONAL	1	0	Audit sarana produksi dalam rangka pendaftaran produk Obat Tradisional (TR)
4	KOSMETIKA	10	0	Audit sarana produksi dalam rangka izin produksi dan penambahan bentuk sediaan
5	SUPLEMEN KESEHATAN	0	1	Audit sarana distribusi dalam rangka pendaftaran produk Suplemen Impor (SI)
<b>TOTAL</b>		<b>37</b>	<b>13</b>	

**JUMLAH SAMPEL YANG DIUJI DENGAN PARAMATER KRITIS  
BBPOM DI DENPASAR  
TAHUN 2016**

<b>NO</b>	<b>KOMODITI</b>	<b>JUMLAH SAMPEL</b>
(1)	(2)	(3)
1	Pangan	1050
2	Obat	700
3	Obat Tradisional	525
4	Kosmetik	1050
5	Suplemen Kesehatan	175
<b>TOTAL</b>		<b>3500</b>

**PEMENUHAN TARGET SAMPLING  
PRODUK OBAT DI SEKTOR PUBLIK (IFK)  
BBPOM DI DENPASAR  
TAHUN 2016**

No	Nama Instalasi Kabupaten/Kota yang dilakukan Sampling	Target Sampel	Realisasi	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	IFK Kabupaten Tabanan	21	24	114,29
2	IFK Kabupaten Bangli	21	41	195,24
3	IFK Kabupaten Jembrana	21	29	138,10
4	IFK Kabupaten Buleleng	21	7	33,33
5	IFK Kota Denpasar	42	50	119,05
6	IFK Kabupaten Klungkung	21	12	57,14
7	IFK Kabupaten Karangasem	21	9	42,86
8	IFK Kabupaten Badung	21	2	9,52
9	IFK Kabupaten Gianyar	21	0	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>210</b>	<b>174</b>	<b>82,86</b>

**PERSENTASE CAKUPAN PENGAWASAN  
BBPOM DI DENPASAR  
TAHUN 2016**

**SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN**

NO	JENIS SARANA	JUMLAH		%	HASIL PENGAWASAN	
		SARANA DI PROVINSI BALI	SARANA YANG DIPERIKSA		MEMENUHI KETENTUAN	%
1	Obat Tradisional	18	12	66.67	4	33.33
2	Kosmetik	31	28	90.32	2	7.14
3	Pangan	398	164	41.21	27	16.46
<b>TOTAL</b>		<b>447</b>	<b>204</b>	<b>45.64</b>	<b>33</b>	<b>16.18</b>

**SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN**

NO	JENIS SARANA	JUMLAH		%	HASIL PENGAWASAN	
		SARANA DI PROVINSI BALI	SARANA YANG DIPERIKSA		MEMENUHI KETENTUAN	%
1	Terapetik dan NAPZA	1003	345	34.40	32	9.28
2	Bahan Berbahaya	72	10	13.89	5	50.00
3	Obat Tradisional	165	51	30.91	27	52.94
4	Produk Komplemen	56	10	17.86	8	80.00
5	Kosmetik	717	112	15.62	57	50.89
6	Pangan	1295	336	25.95	173	51.49
<b>TOTAL</b>		<b>3308</b>	<b>864</b>	<b>26.12</b>	<b>302</b>	<b>34.95</b>

**Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sesuai Standar  
BBPOM di Denpasar  
Tahun 2016**

No	Nama Sarana dan Prasaranan	% Realisasi
1	Alat laboratorium	80,43
2	Mebelair	73,70
		77,07

**LAYANAN PUBLIK BBPOM DI DENPASAR**  
**BBPOM DI DENPASAR**  
**TAHUN 2016**

<b>NO</b>	<b>LAYANAN PUBLIK</b>	<b>TARGET</b>	<b>REALISASI</b>
1	ULPK	1043	1169
2	SKI/SKE	50	114
3	AUDIT REGISTRASI	30	50
4	PAMERAN	1	1
5	PENYEBARAN INFORMASI	15	15
6	KIE	1	0
7	KIE PEMBERDAYAAN	0	5
8	UJI LAB PIHAK III	10	62
	<b>JUMLAH</b>	<b>1150</b>	<b>1416</b>

**Komunitas yang Diberdayakan BBPOM di Denpasar Tahun 2016**

<b>No</b>	<b>KOMUNITAS</b>
1	Pasar Agung
2	Pasar Shindu
3	Pasar Intaran
4	Pasar Gianyar
5	Desa Takmung
6	Desa Kawasan
7	Desa kusamba
8	Desa Penatih
9	Desa Pemecutan
10	Desa Sanur kauh
11	Desa Peguyangan Kangin
12	Kelurahan Sumerta
13	Kelurahan Gianyar
14	Desa Blahbatuh
15	Desa Batubulan
16	Desa Sukawati
17	Desa Melinggih
18	Kelurahan Banyuning
19	Desa Pamaron
20	Desa Penglatan

**HASIL PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN KASUS TINDAK PIDANA  
DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN BBPOM DI DENPASAR  
TAHUN 2016**

No	JENIS PRODUK	JUMLAH KASUS	TINDAK LANJUT			
			NON JUSTITIA	%	PRO JUSTITIA	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	OBAT	4	4	100,00	0	0,00
2	PANGAN	2	2	100,00	0	0,0
3	KOSMETIKA	20	13	65,00	7	35,00
4	OBAT TRADISIONAL	15	12	80,00	3	20,00
5	SUPLEMEN	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>41</b>	<b>31</b>	<b>75,6</b>	<b>10</b>	<b>24,4</b>
Nilai Barang Bukti		<b>Rp573.918.370</b>	<b>Rp417.530.370</b>		<b>Rp156.388.000</b>	